



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

Tahun 2017

**Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kepulauan Riau
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kepulauan Riau Tahun 2017 dapat diselesaikan. Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP ini sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan kebermanfaatannya, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada LPMP Kepulauan Riau dalam pengelolaan pendidikan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) LPMP Kepulauan Riau tahun 2015-2019.

Keberadaan LAKIP ini merupakan bukti komitmen LPMP Kepulauan Riau dalam melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik *output* maupun *outcome*. Semoga keberadaan LAKIP ini dapat menjadi gambaran bagi semua pihak untuk mengevaluasi kinerja selama 1 tahun, agar kinerja ke depan dapat lebih ditingkatkan, baik dari aspek dalam mengelola perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan, maupun koordinasi pelaksanaannya.

Dengan telah tersusunnya LAKIP LPMP Kepulauan Riau Tahun 2017 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan dari bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2017.

Penyusunan LAKIP Tahun 2017 LPMP Kepulauan Riau ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian LPMP Kepulauan Riau telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga LAKIP LPMP Kepulauan Riau ini telah dapat mencerminkan kinerja LPMP Kepulauan Riau dari bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2017.

Bintan, Desember 2017
Kepala LPMP Kepulauan Riau

Dr. Hj. Ulfa Maria, M.Pd.
NIP196408031990032005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kepulauan Riau dari bulan Januari sampai dengan *Desember* tahun 2017. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2017 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2017, sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) LPMP Propinsi Kepulauan Riau sebagai Unit Eselon III Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjabarkan berbagai kegiatan satu semester dari bulan Januari hingga bulan Desember Tahun 2017 sesuai dengan tugas dan fungsi yang meliputi kegiatan-kegiatan dan program penjaminan mutu pendidikan di tingkat propinsi. LPMP Kepulauan Riau melaporkan capaian kinerja hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) program yang mendukung hasil tersebut. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada program/kebijakan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran lembaga. Laporan ini menyatakan capaian kinerja lembaga sesuai dengan kebijakan dalam tujuan dan sasaran strategis dari rencana strategis LPMP Kepulauan Riau.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

LPMP Kepulauan Riau, sesuai dengan tugas dan fungsi, melaksanakan layanan penjaminan mutu pendidikan di tingkat provinsi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, sedangkan kegiatannya terdiri dari kegiatan pemetaan mutu satuan pendidikan, supervisi hasil peta mutu pendidikan, fasilitasi peningkatan mutu 8 standar satuan pendidikan di tingkat propinsi yang menjadi tanggung jawabnya, dan kegiatan rutin yang meliputi berbagai kegiatan administratif dan sifatnya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Kepulauan Riau.

Keuangan yang dialokasikan Pemerintah dari APBN LPMP Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2017, dengan nomor DIPA: SP-DIPA-023.03.2.419511/2017, tanggal 7 Desember 2016 sebesar Rp 38.566.841.000,00 (*Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang kemudian mengalami pemotongan anggaran menjadi Rp 36.508.347.000,00 (*Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Juta Ribu Rupiah*) dengan daya serap per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 34.542.546.924,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) atau 94,62%.

Setiap tahun anggaran, instansi berwenang selalu melakukan penilaian terhadap kinerja lembaga pemerintah. LPMP Kepulauan Riau berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk LAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai media pertanggungjawaban yang berisi informasi tentang kinerja instansi pemerintah dan kebermanfaatannya, antara lain:

- a. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintah (*good governance*) yang didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Menjadikan instansi

pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

- b. Menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah.
- c. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya LPMP Kepulauan Riau.
- d. LAKIP juga digunakan sebagai bahan masukan bagi Kemdikbud dan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Selanjutnya, selama kurun waktu satu tahun pelaksanaan program/kegiatan, LPMP Kepulauan Riau menghadapi beberapa kendala dan permasalahan. Kendala dan permasalahan tersebut mempengaruhi capaian target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

1. Juknis kegiatan belum terbit
2. Letak Geografis Kepulauan Riau

Capaian kinerja LPMP Kepulauan Riau sampai dengan Desember tahun 2017 yang meliputi: capaian kinerja atas tiga tujuan strategis terkait program layanan penjaminan mutu pendidikan di provinsi, yaitu:

1. Terpetakannya mutu pendidikan, dan dilakukan supervisi peta mutu pendidikan dasar, menengah dan kesetaraan sesuai 8 Standar Nasional Pendidikan;
2. Terlaksananya fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar, menengah dan kesetaraan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan; dan
3. Terlaksananya sistem tata kelola yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan peningkatan mutu pendidikan di dasar, menengah, dan kesetaraan di propinsi Kepulauan Riau.

Bintan, Desember 2017

Kepala LPMP Kepulauan Riau

Dr. Hj. Ulfa Maria, M.Pd.

NIP196408031990032005

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	8
A. Gambaran Umum.....	8
B. Dasar Hukum	8
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	9
D. Permasalahan Utama yang dihadapi LPMP Kepulauan Riau	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	18
B. Realisasi Anggaran.....	92
BAB IV PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Rekomendasi	102
LAMPIRAN	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, Pasal 31 memperjelas bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Sebagai lembaga pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka LPMP sebagai instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan tugas dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Barat, Papua Barat, dan Kepulauan Riau;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Kepulauan Riau Nomor: SP DIPA-023.03.2.419511/2016 tanggal 7 Desember 2016.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi

1) Tugas dan Fungsi Organisasi

Tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dinyatakan

memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya LPMP menyelenggarakan fungsi:

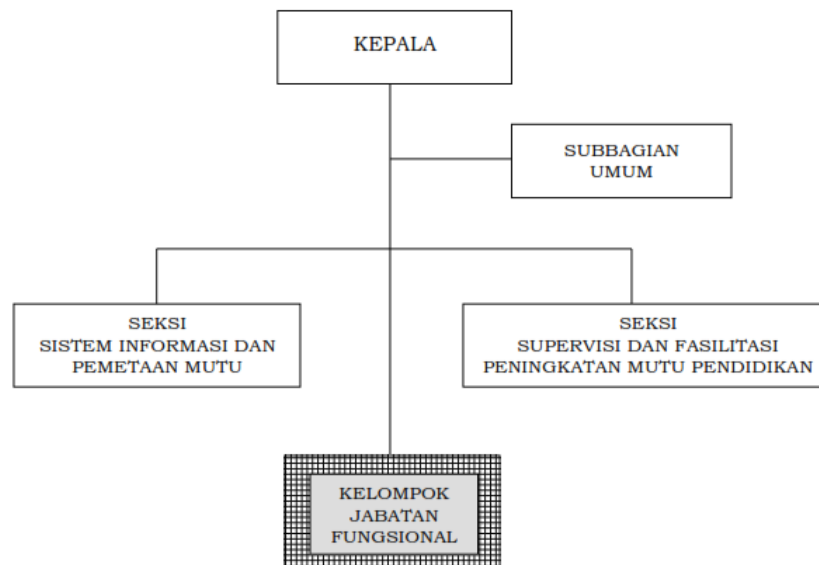
1. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.

2) Struktur Organisasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, susunan organisasi LPMP Kepulauan Riau terdiri atas:

1. Kepala;
2. Subbagian Umum;
3. Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu;
4. Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Struktur Organisasi LPMP Kepulauan Riau
(Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2017)**



Dimana masing-masing memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, ketatalaksanaan, kepegawaian, ketatausahaan, kehumasan, dan kerumahtanggaan LPMP.
- 2) Seksi Sistem Informasi dan Pemetaan Mutu mempunyai tugas melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi serta pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- 3) Seksi Supervisi dan Fasilitasi Peningkatan Mutu mempunyai tugas melakukan supervisi, fasilitasi, dan kerja sama peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan.

LPMP dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan menyampaikan laporan hasil pemetaan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan kesetaraan dengan tembusan kepada unit organisasi yang secara fungsional berhubungan kerja dengan LPMP. Disamping itu diwajibkan LPMP menyampaikan hasil pemetaan mutu tersebut kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi.

D. Permasalahan Utama yang dihadapi LPMP Kepulauan Riau

Permasalahan yang dihadapi LPMP Kepulauan Riau dengan letak geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau sehingga alat transportasinya adalah kapal, memang ada sebagian yang menggunakan pesawat terbang namun terbatas. Jadwal keberangkatan kapal, maupun pesawat sudah ditentukan terutama untuk daerah-daerah tertentu dan untuk daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Sehingga jika LPMP Kepulauan Riau ingin mengundang peserta harus disesuaikan dengan jadwal keberangkatan kapal. Bahkan jika gelombang laut tinggi akan menyebabkan jadwal kapal dibatalkan dan terkadang menyebabkan keterlambatan kehadiran bahkan ketidakhadiran peserta dikarenakan tidak diberangkatkannya kapal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah, pelaksanaan program dan kegiatan satuan kerja/unit kerja perlu disusun ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Berdasarkan ketentuan tersebut LPMP Kepulauan Riau menyusun Rencana Kinerja Tahunan.

A. Penetapan Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pasal 3 menyatakan Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja (PK) antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Dengan demikian LPMP Kepulauan Riau wajib menyusun perjanjian kinerja dalam bentuk Penetapan Kinerja tingkat eselon III yang ditandatangani oleh Kepala LPMP sebagai Perjanjian Kinerja. Penetapan kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja LPMP Kepulauan Riau yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun (2017) sesuai rencana strategis LPMP Kepulauan Riau.

Target capaian program/kegiatan LPMP Kepulauan Riau yaitu peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan. Untuk itu melalui sasaran strategis yaitu meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang Pendidikan. Dimana selanjutnya sasaran strategis tersebut direalisasikan melalui 12 indikator kinerja yaitu:

1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya
2. Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya
3. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya
4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya
5. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya
6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya
7. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya
8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya
9. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
10. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
11. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP
12. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Yang akan menghasilkan output berikut ini:

1. Satuan Pendidikan (SD) yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau
2. Satuan Pendidikan (SMP) yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau
3. Satuan Pendidikan (SMA) yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau
4. Satuan Pendidikan (SMK) yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau
5. Satuan Pendidikan (SD) yang difasilitasi melalui 8 SNP
6. Satuan Pendidikan (SD) yang melaksanakan Kurikulum 2013
7. Satuan Pendidikan (SD) yang telah difasilitasi melalui Kemitraan
8. Satuan Pendidikan (SMP) yang difasilitasi melalui 8 SNP
9. Satuan Pendidikan (SMP) yang melaksanakan Kurikulum 2013
10. Satuan Pendidikan (SMP) yang telah difasilitasi melalui Kemitraan
11. Satuan Pendidikan (SMA) yang difasilitasi melalui 8 SNP

12. Satuan Pendidikan (SMA) yang melaksanakan Kurikulum 2013
13. Satuan Pendidikan (SMA) yang telah difasilitasi melalui Kemitraan
14. Satuan Pendidikan (SMK) yang difasilitasi melalui 8 SNP
15. Satuan Pendidikan (SMK) yang melaksanakan Kurikulum 2013
16. Satuan Pendidikan (SMK) yang telah difasilitasi melalui Kemitraan

B. Perjanjian Kinerja LPMP Kepulauan Riau dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Perjanjian Kinerja antara Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah target minimal yang diamanahkan selama lima tahun ke depan. Perjanjian Kinerja menetapkan target yang terukur dalam satuan waktu tertentu dan menjadi arah yang ingin dicapai sebagai landasan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Selanjutnya Perjanjian Kinerja LPMP Kepulauan Riau dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah harus mampu mendukung dan memberikan kontribusi kepada Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Perjanjian Kinerja dirinci dalam rencana aksi setiap tahun, yang ditetapkan dalam mendukung Prioritas Pembangunan Nasional. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2017 bidang Pendidikan yang menjadi tanggung jawab LPMP Kepulauan Riau dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2011 terdapat dalam tabel berikut ini.

Perjanjian Kinerja LPMP Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya 2. Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya Output : - Satuan Pendidikan (SD) yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau	100% 40% 919 Sekolah	1.908.741.000
	3. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya 4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya Output : - Satuan Pendidikan (SMP) yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau	100% 60% 335 Sekolah	
	5. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya 6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya Output : - Satuan Pendidikan (SMA) yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau	100% 60% 126 Sekolah	
	7. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya 8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya Output : - Satuan Pendidikan (SMP) yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau	100% 45% 98 Sekolah	
	9. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output: - Satuan Pendidikan (SD) yang difasilitasi melalui 8 SNP - Satuan Pendidikan (SD) yang melaksanakan Kurikulum 2013 - Satuan Pendidikan (SD) yang telah difasilitasi melalui Kemitraan	40% 28 Sekolah 325 Sekolah 28 Sekolah	14.584.783.000
	10. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output: - Satuan Pendidikan (SMP) yang difasilitasi melalui 8 SNP - Satuan Pendidikan (SMP) yang melaksanakan Kurikulum 2013	40% 28 Sekolah 113 Sekolah	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	- Satuan Pendidikan (SMP) yang telah difasilitasi melalui Kemitraan	23 Sekolah	
	11.Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output:	40%	
	- Satuan Pendidikan (SMA) yang difasilitasi melalui 8 SNP	28 Sekolah	
	- Satuan Pendidikan (SMA) yang melaksanakan Kurikulum 2013	42 Sekolah	
	- Satuan Pendidikan (SMA) yang telah difasilitasi melalui Kemitraan	10 Sekolah	
	12.Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output:	40%	
	- Satuan Pendidikan (SMK) yang difasilitasi melalui 8 SNP	28 Sekolah	
	- Satuan Pendidikan (SMK) yang melaksanakan Kurikulum 2013	33 Sekolah	
	- Satuan Pendidikan (SMK) yang telah difasilitasi melalui Kemitraan	8 Sekolah	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2017, LPMP Kepulauan Riau wajib melaksanakan target-target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan selama tahun 2017 dengan menggunakan DIPA Tahun Anggaran 2017.

Sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan harus dicapai maksimal, maka LPMP Kepulauan Riau telah melaksanakan program/kegiatan yang bertujuan untuk mencapai target yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Tahun Anggaran 2017

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan					
	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI		
				TARGET	%	ANGGARAN
	1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya	100%	1.422.526.000	96.41%	96.41	1.289.956.650
	2. Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya	40%		0%	0.00	
	Output: - Satuan Pendidikan (SD) yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau	919		886	96.41	
	3. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya	100%		98.81%	98.81	
	4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya	60%	335	0%	0.00	
	Output: - Satuan Pendidikan (SMP) yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau	335		331	98.81	
	5. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya	100%		89.68%	89.68	
	6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya	60%		0%	0.00	
	Output: - Satuan Pendidikan (SMA) yang dipetakan	126		113	89.68	

SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan					
INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI			
			TARGET	%	ANGGARAN	%
mutunya di Kepulauan Riau						
7. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya	100%		87.76%	87.76		
8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya	45%		0%	0.00		
Output:						
- Satuan Pendidikan (SMK) yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau	98		86	87.76		
9. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	40%	13.469.474.000	41.02%	102.56	13.133.487.000	97.51
Output:						
- Satuan Pendidikan (SD) yang difasilitasi melalui 8 SNP	28		42	150.00		
- Satuan Pendidikan (SD) yang melaksanakan Kurikulum 2013	325		325	100.00		
- Satuan Pendidikan (SD) yang telah difasilitasi melalui Kemitraan	28		10	35.71		
10. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	40%		45.67%	114.18		
Output:						
- Satuan Pendidikan (SMP) yang difasilitasi melalui 8 SNP	28		28	100.00		
- Satuan Pendidikan (SMP) yang melaksanakan Kurikulum 2013	113		113	100.00		
- Satuan Pendidikan (SMP) yang telah difasilitasi melalui Kemitraan	23		12	52.17		
11. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	40%		51.59%	128.97		
Output:						
- Satuan Pendidikan (SMA) yang difasilitasi melalui 8 SNP	28		22	78.57		
- Satuan Pendidikan (SMA) yang melaksanakan Kurikulum 2013	42		42	100.00		
- Satuan Pendidikan (SMA) yang telah difasilitasi melalui Kemitraan	10		1	10.00		

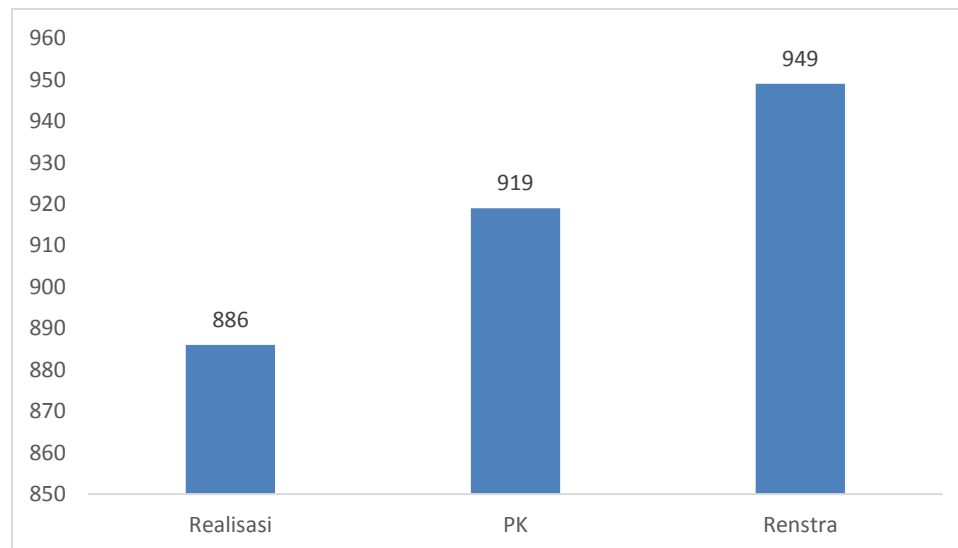
SASARAN STRATEGIS	Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan					
INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN	REALISASI			
			TARGET	%	ANGGARAN	%
<i>difasilitasi melalui Kemitraan</i>						
12. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP	40%		57.14%	142.86		
Output:						
- Satuan Pendidikan (SMK) yang difasilitasi melalui 8 SNP	28		20	71.43		
- Satuan Pendidikan (SMK) yang melaksanakan Kurikulum 2013	33		33	100.00		
- Satuan Pendidikan (SMK) yang telah difasilitasi melalui Kemitraan	8		3	37.50		

Berdasarkan data di atas, capaian indikator kinerja LPMP Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2017 secara detail sebagai berikut:

1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya

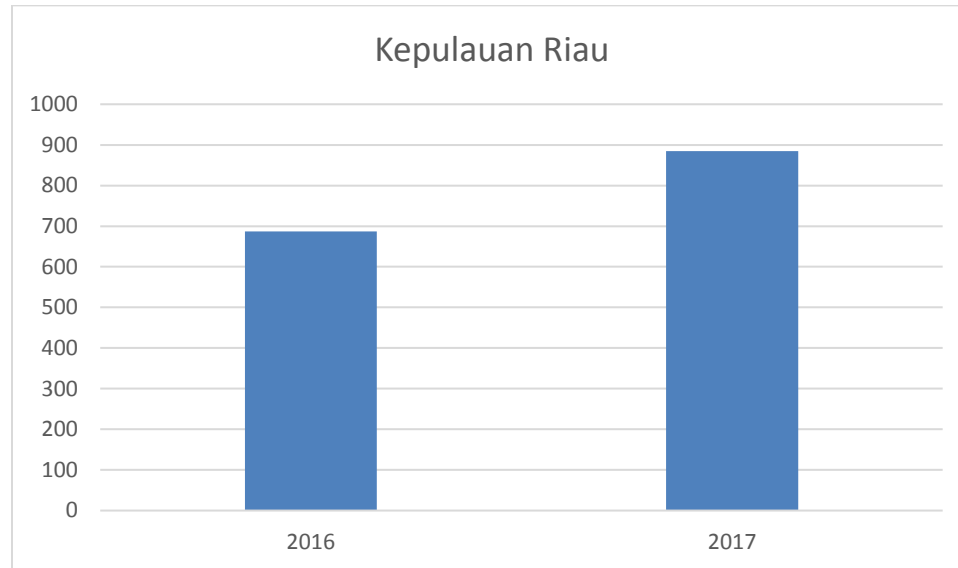
Indikator kinerja persentase SD yang telah dipetakan mutunya di Kepulauan Riau adalah sebesar 96.41% atau sebanyak 886 SD dari total 919 SD yang ada di Kepulauan Riau. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019, SD yang berhasil dipetakan 93.36% atau 886 SD dari target Renstra 2015-2019 yaitu 949 SD.

Capaian Kinerja Pemetaan Mutu SD vs Perjanjian Kinerja vs Renstra 2015-2019



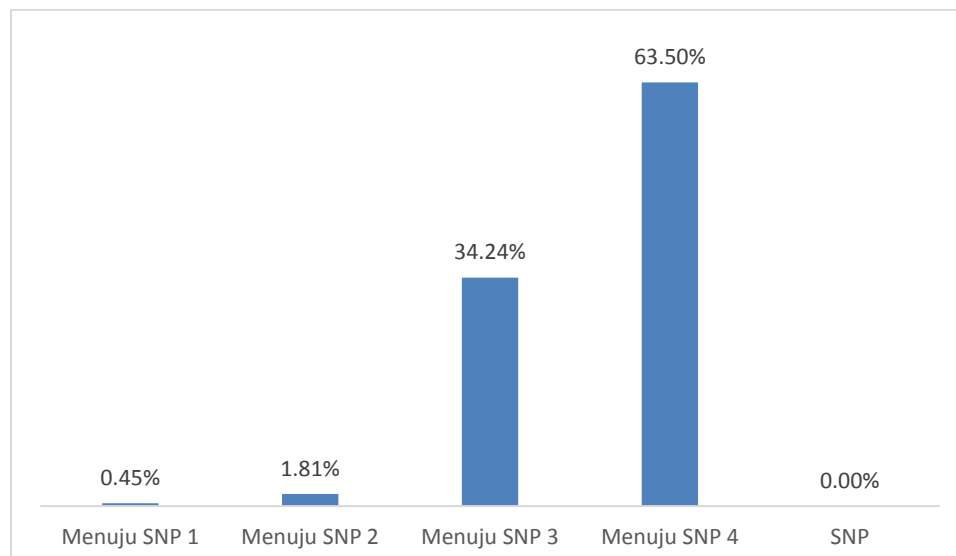
SD yang berhasil dipetakan mutunya pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. SD yang dipetakan mutunya tahun 2017 sebanyak 886 sekolah sedangkan SD yang dipetakan mutunya tahun 2016 sebanyak 837 sekolah.

Jumlah Sekolah yang dipetakan mutunya Tahun 2017 vs 2016



Pada tahun 2017, dari 886 sekolah yang berhasil dipetakan mutunya, 885 sekolah menghasilkan rapor mutu atau sebesar 99.89%. Sedangkan pada tahun 2016, hanya 687 sekolah dari 837 sekolah atau sebesar 82.08% yang menghasilkan rapor mutu di mana SD yang ada di Kepulauan Riau semuanya belum mencapai SNP. 63.50% SD menuju SNP 4, detail pada gambar berikut.

Capaian SNP Jenjang Sekolah Dasar Kepulauan Riau Tahun 2017



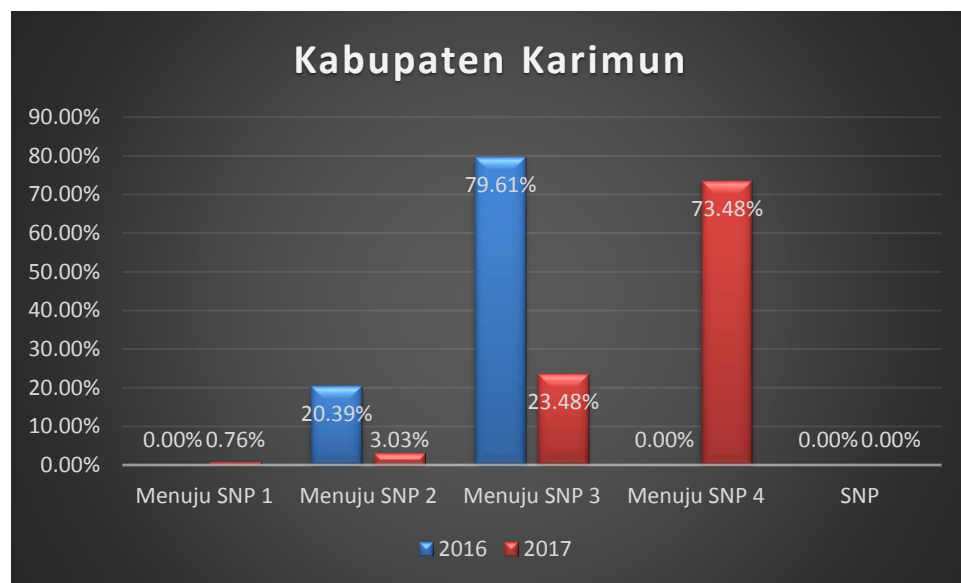
Kategori SNP tercapai bila skor mutu berada antara 6.67 s.d. 7.

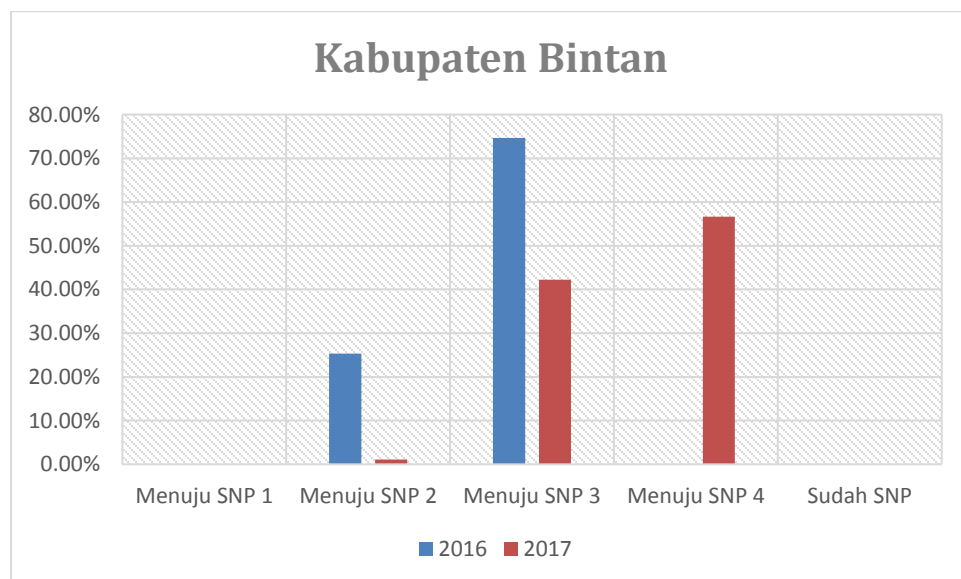
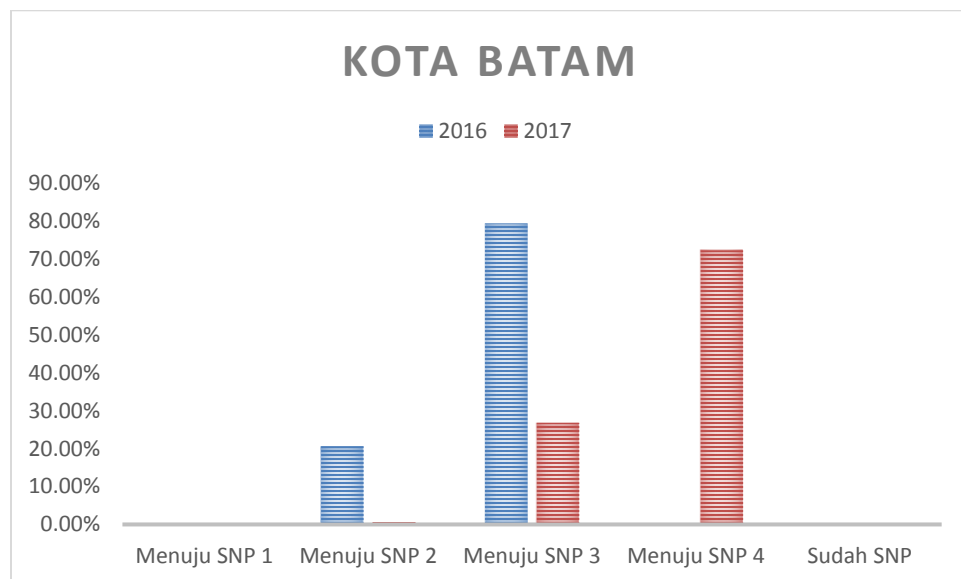
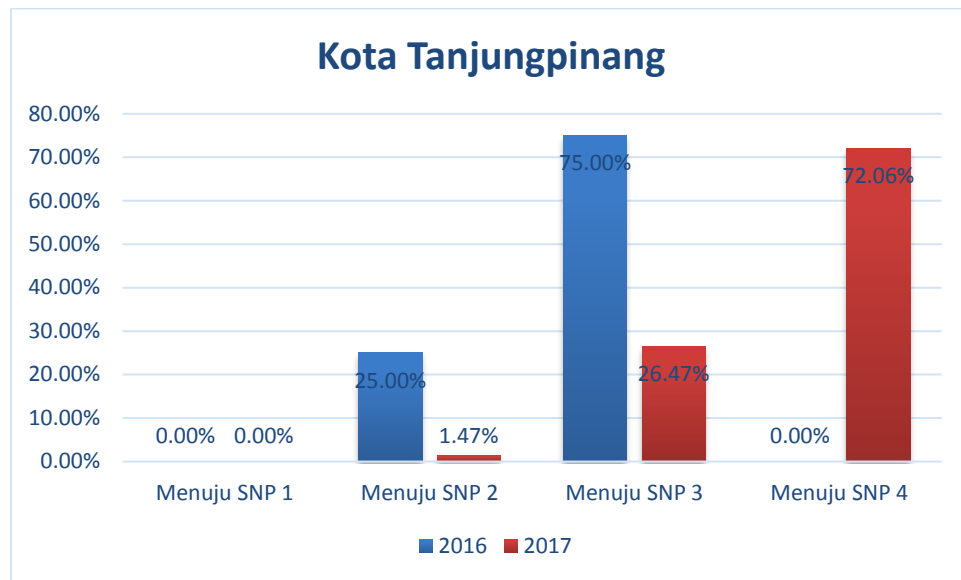
Kategori SNP

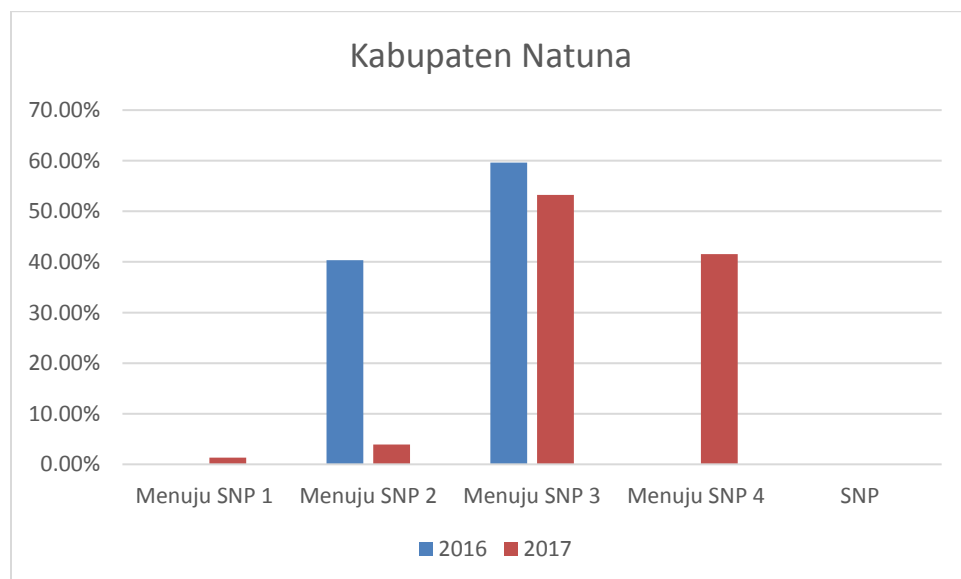
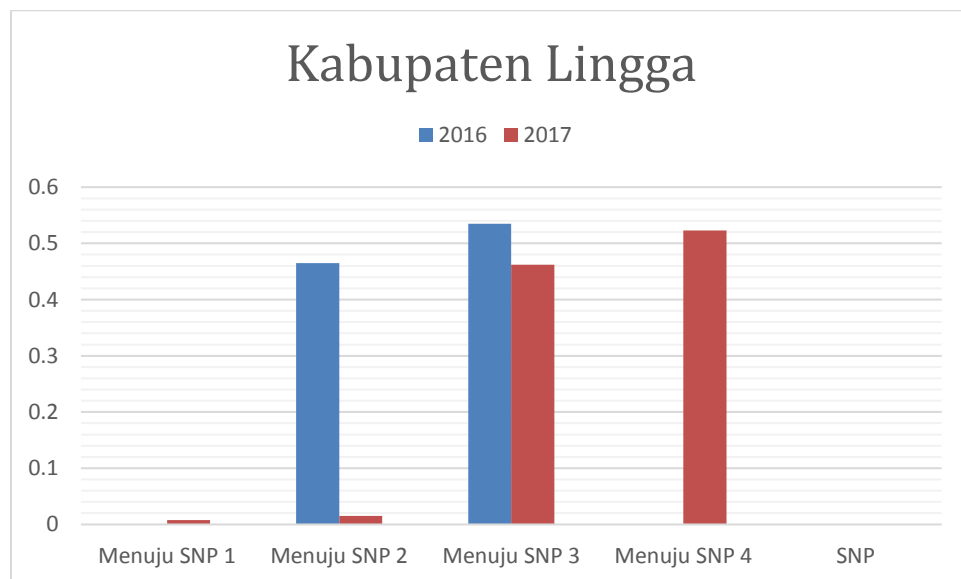
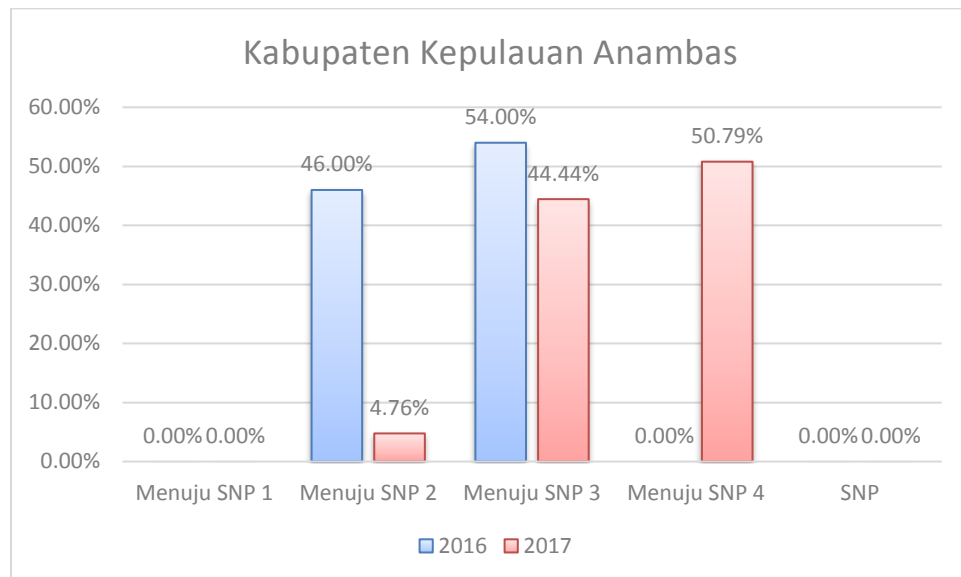
Kategori	Batas Bawah	Batas Atas
Menuju SNP 1	0	2.04
Menuju SNP 2	2.05	3.7
Menuju SNP 3	3.71	5.06
Menuju SNP 4	5.07	6.66
SNP	6.67	7

Walaupun capaian SNP jenjang SD belum memenuhi SNP, namun terjadi peningkatan capaian SNP per Kabupaten/Kota pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Capaian SNP jenjang SD masing-masing Kabupaten/Kota pada grafik berikut.

Capaian SNP Jenjang SD Tahun 2017 vs 2016 per Kabupaten/Kota

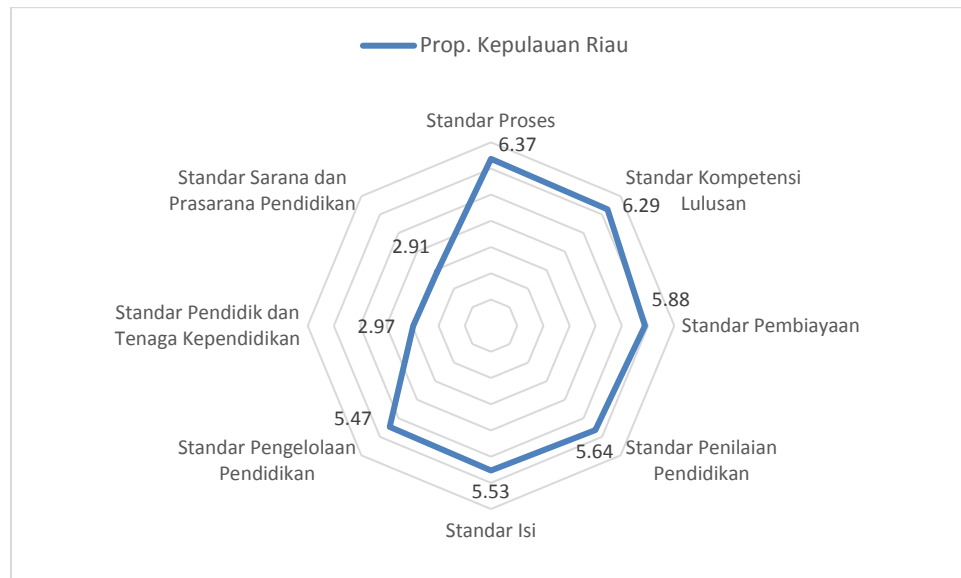






Capaian per standar jenjang Sekolah Dasar di Kepulauan Riau adalah:

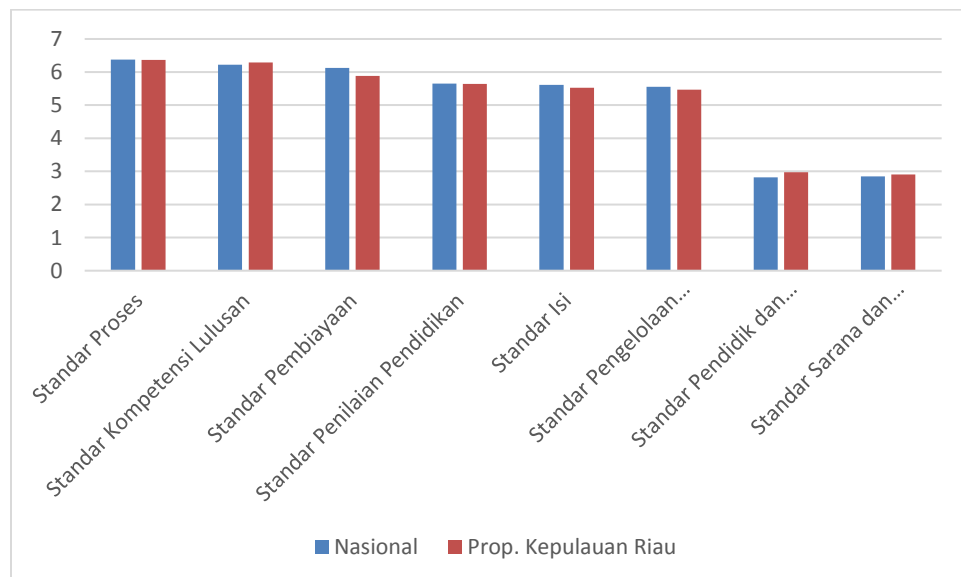
Capaian SNP per Standar Jenjang SD Tahun 2017



Capaian SNP terbaik pada Standar Proses dengan skor mutu sebesar 6.37. Sedangkan skor mutu terkecil terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebesar 2.91.

Capaian SNP per Standar Jenjang SD Tahun 2017

Kepulauan Riau vs Nasional



Tetapi bila dibandingkan dengan capaian skor mutu Nasional, skor mutu jenjang Sekolah Dasar di Kepulauan Riau lebih baik daripada skor mutu jenjang Sekolah Dasar Nasional pada Standar Kompetensi Lulusan. Sedangkan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan walaupun dengan kategori Menuju SNP 2 tetapi secara Nasional capaian SNP kedua standar tersebut termasuk kategori Menuju SNP 2 juga.

Skor Capaian SNP per Standar Jenjang Sekolah Dasar Tahun 2017
Kepulauan Riau vs Nasional

Standar Nasional Pendidikan	Nasional	Kepulauan Riau	Kategori
Standar Proses	6.38	6.37	Menuju SNP 4
Standar Kompetensi Lulusan	6.22	6.29	Menuju SNP 4
Standar Pembiayaan	6.13	5.88	Menuju SNP 4
Standar Penilaian Pendidikan	5.65	5.64	Menuju SNP 4
Standar Isi	5.61	5.53	Menuju SNP 4
Standar Pengelolaan Pendidikan	5.56	5.47	Menuju SNP 4
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.82	2.97	Menuju SNP 2
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.85	2.91	Menuju SNP 2

Target pemetaan mutu terhadap 919 SD tidak terpenuhi disebabkan beberapa sekolah yang sudah tutup masih terdata dalam Dapodik. Sehingga pemetaan mutu tidak dapat dilakukan maksimal pada seluruh sekolah. Dari 886 Sekolah Dasar yang dipetakan mutunya, 885 Sekolah Dasar yang dapat diolah peta mutunya, sedangkan 1 SD tidak berhasil diolah peta mutunya disebabkan karena masih dalam proses pengolahan data mutu oleh Pusat. Untuk itu perlu diambil langkah antisipasi agar permasalahan tersebut di atas tidak terjadi kembali di masa depan dengan melakukan koordinasi yang lebih mendalam antara LPMP Kepulauan Riau, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat.

Capaian realisasi persentase SD yang terpetakan mutu pendidikannya karena ada dukungan dari kegiatan:

- a. Konsolidasi Data Pengawas Sebagai Verifikator dan Validator Pengumpulan Data Mutu melibatkan 7 orang Pengawas SD (Dinas Pendidikan 7 Kabupaten/Kota).

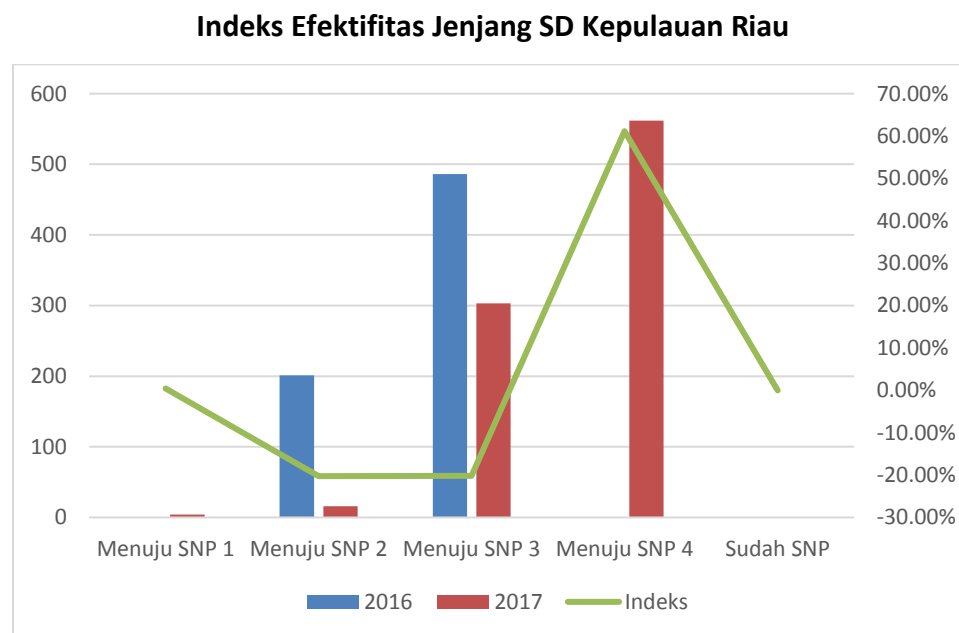
- b. Bimbingan Teknis (Penyegaran) Fasilitator Daerah Pemetaan Mutu 7 orang Pengawas SD (Dinas Pendidikan 7 Kabupaten/Kota), 1 orang Ketua KKPS Kabupaten Karimun dan 1 orang Ketua MKPS Kabupaten Karimun
- c. Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu bagi Pengawas Sekolah yang melibatkan 7 orang Pengawas SD Kota Tanjungpinang, 19 orang Pengawas SD Kabupaten Batam, 8 orang Pengawas Kabupaten Karimun, 10 orang Pengawas SD Kabupaten Lingga, 12 orang Pengawas SD Kabupaten Natuna, dan 5 orang Pengawas SD Kabupaten Kepulauan Anambas.
- d. Pendampingan Pengumpulan Data pada 68 SD di Kota Tanjungpinang, 94 SD di Kabupaten Bintan, 335 SD di Kota Batam, 130 SD di Kabupaten Karimun, 100 SD di Lingga, 80 SD di Kabupaten Natuna, 52 SD di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- e. Monitoring dan Evaluasi Pengumpulan Data pada 6 SD di Kota Tanjungpinang, 6 SD di Kabupaten Bintan, 6 SD di Kota Batam, 5 SD di Kabupaten Karimun, 6 SD di Kabupaten Lingga, 6 SD di Kabupaten Natuna, dan 6 SD di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu bagi Pengawas Sekolah



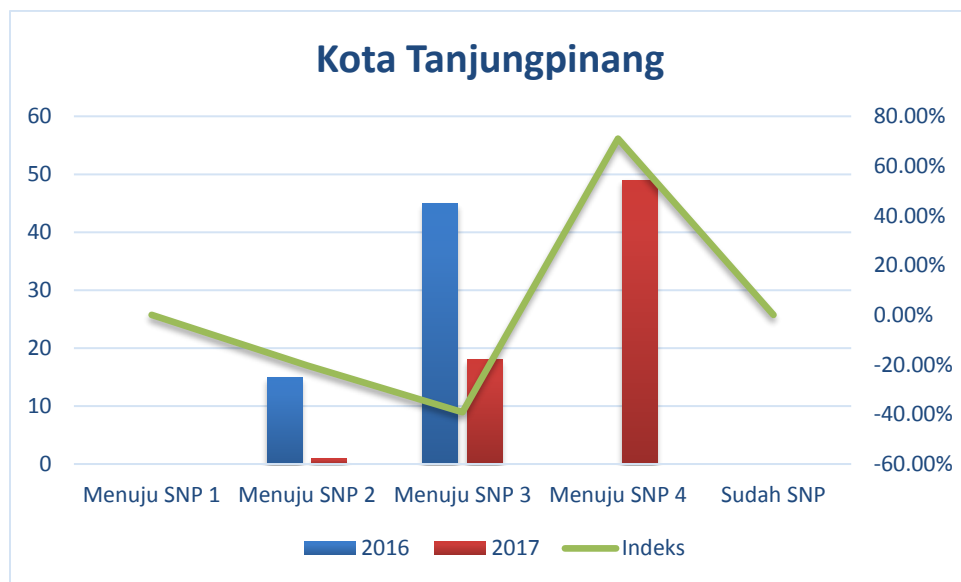
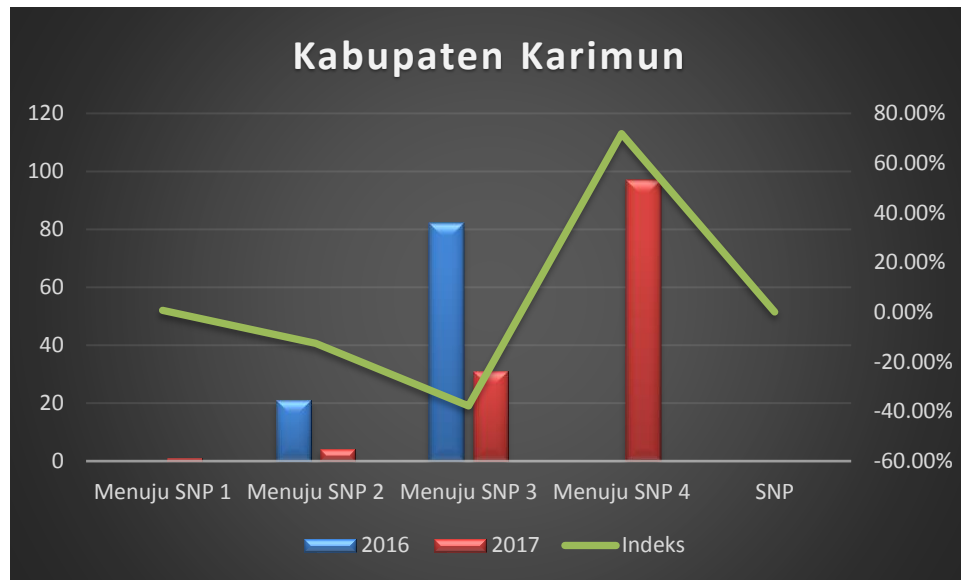
2. Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya

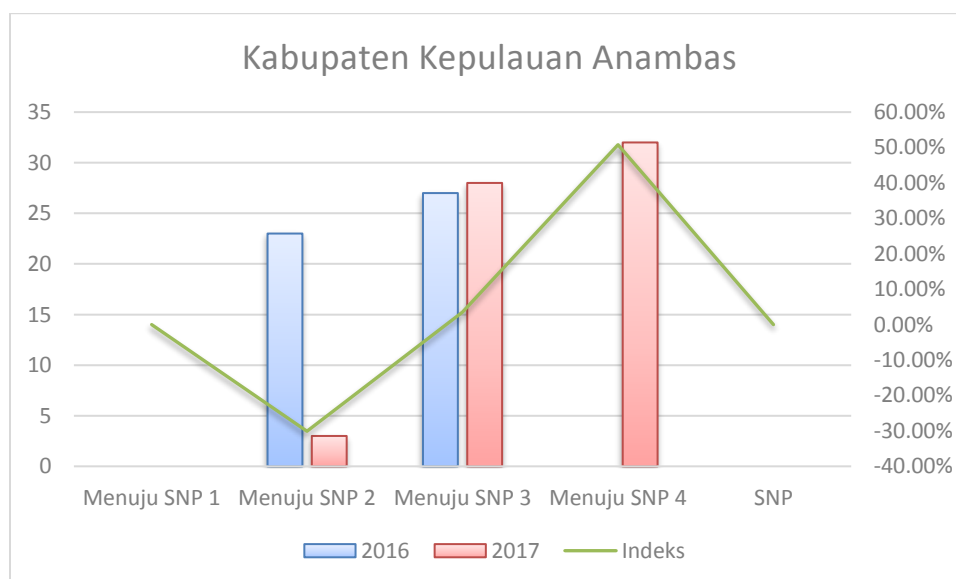
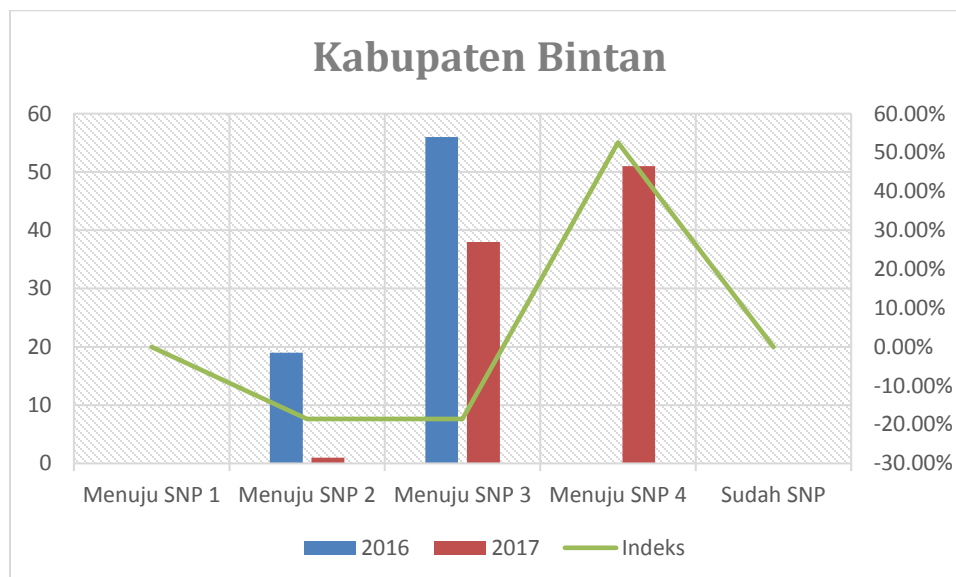
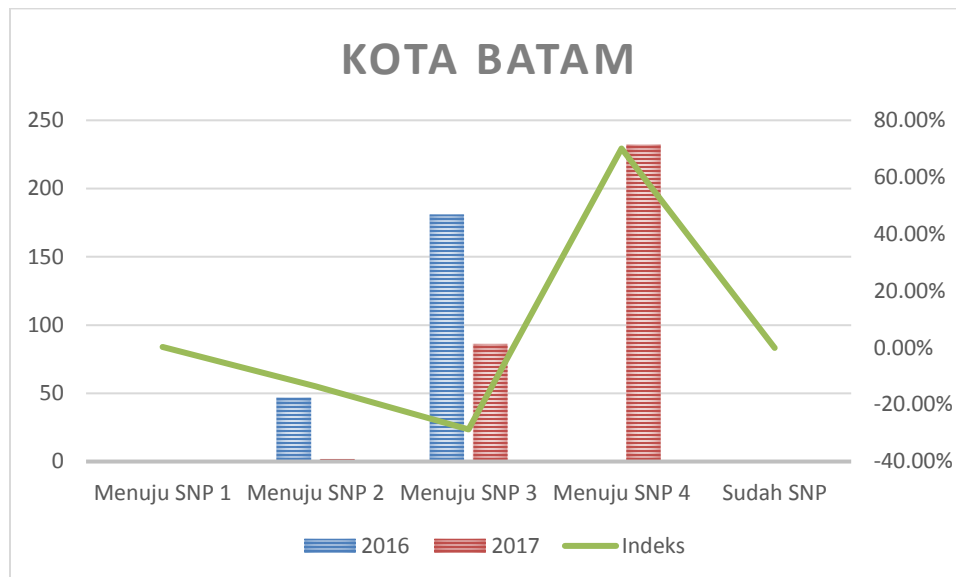
Indikator kinerja persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya di Kepulauan Riau adalah 61.15% pada kategori Menuju SNP 4. Pada rapor mutu tahun 2016 belum ada satu sekolah pun yang memenuhi kategori SNP, bahkan belum ada satu sekolah pun yang memenuhi kategori Menuju SNP 4, 70.74% SD yang ada di Kepulauan Riau termasuk kategori Menuju SNP 3. Sedangkan pada rapor mutu tahun 2017 menunjukkan 34.24% SD berkategori Menuju SNP 3 dan terjadi peningkatan yang signifikan di mana 63.50% SD sudah memenuhi kategori Menuju SNP 4.

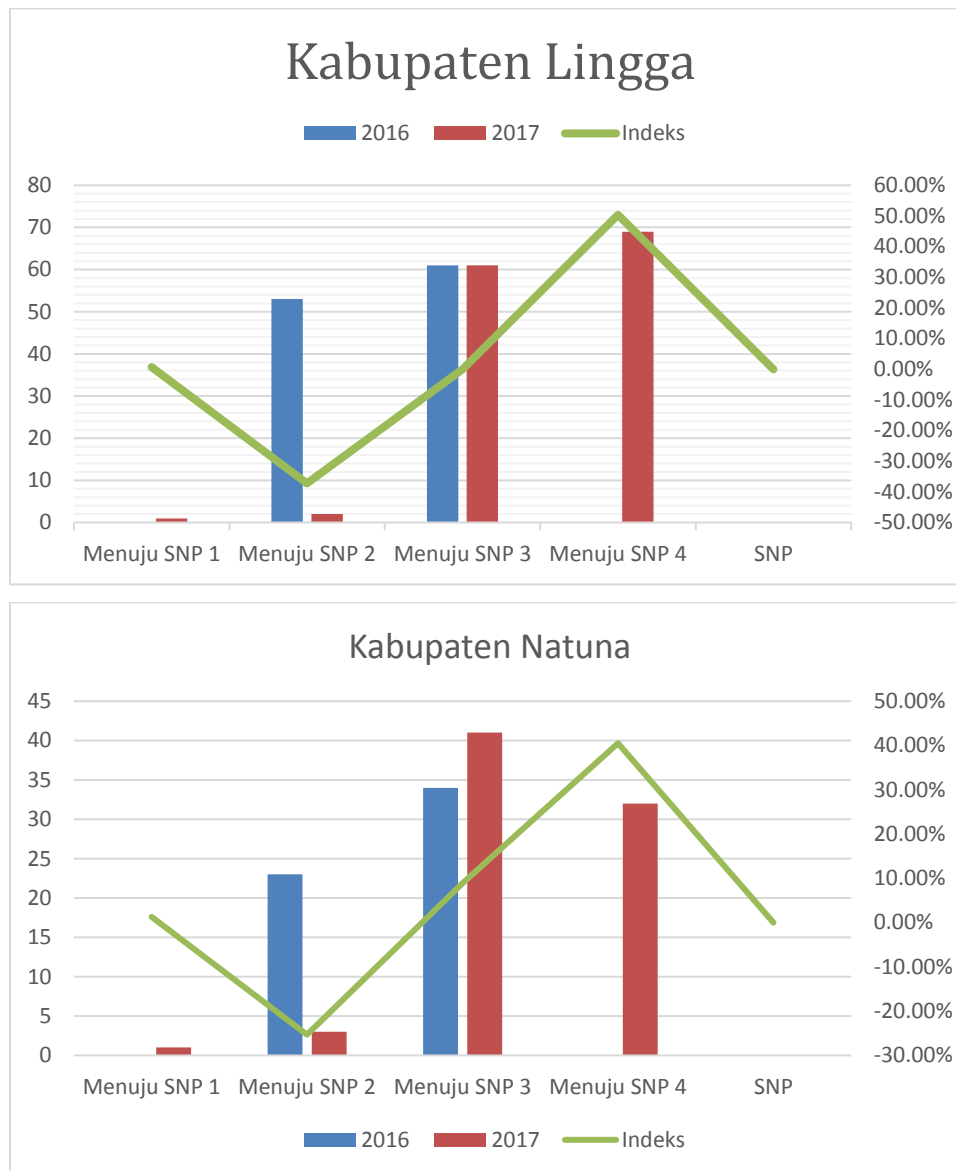


Peningkatan indeks efektifitas kategori Menuju SNP 4 terbesar pada Kabupaten Karimun sebesar 71.85% diikuti oleh Kota Tanjungpinang sebesar 71,91%, Kota Batam 70.09%, Kabupaten Bintan 52.58%, Kabupaten Kepulauan Anambas 50.79%, Kabupaten Lingga 50.36%, dan terakhir Kabupaten Natuna 40.51%.

Indeks Efektifitas Jenjang SD per Kabupaten/Kota



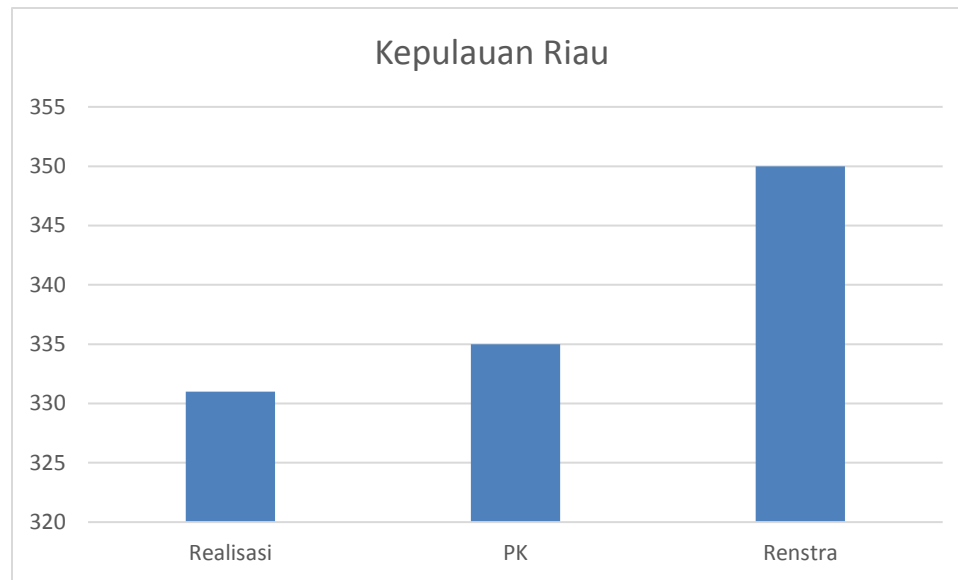




3. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya

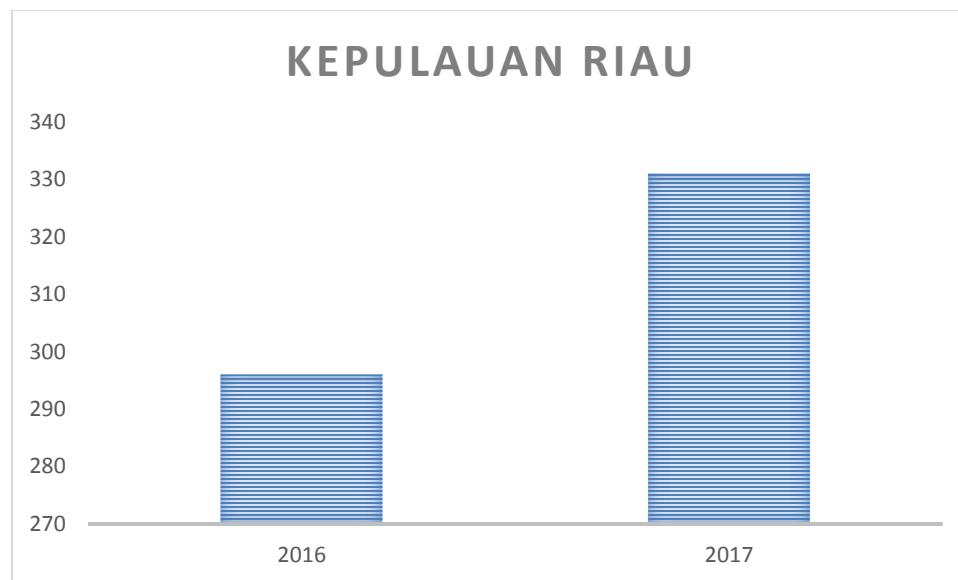
Indikator kinerja persentase SMP yang telah dipetakan mutunya di Kepulauan Riau adalah sebesar 98.81% atau sebanyak 331 SMP dari 335 SMP yang ada di Kepulauan Riau. Jika dibandingkan dengan target Renstra 2015-2019, SMP yang berhasil dipetakan 94.57% atau 331 SMP dari target Renstra 2015-2019 yaitu 350 SMP.

Capaian Kinerja Pemetaan Mutu SMP vs Perjanjian Kinerja vs Renstra 2015-2019



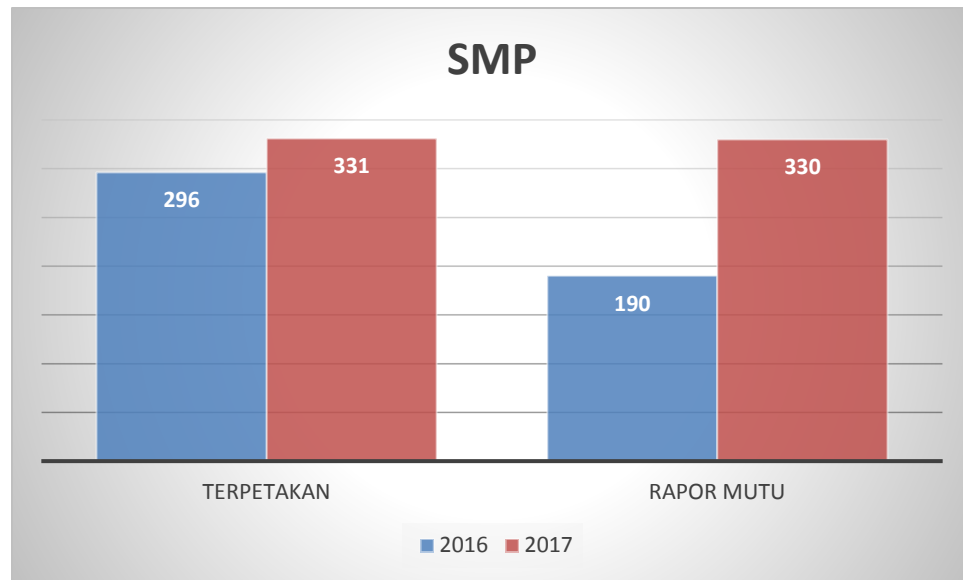
SMP yang berhasil dipetakan mutunya pada tahun 2017 mengalami peningkatan 11.82% dibandingkan tahun 2016. SMP yang dipetakan mutunya tahun 2017 sebanyak 331 sedangkan SD yang dipetakan mutunya tahun 2016 sebanyak 296 sekolah.

Jumlah SMP yang dipetakan mutunya Tahun 2017 vs 2016



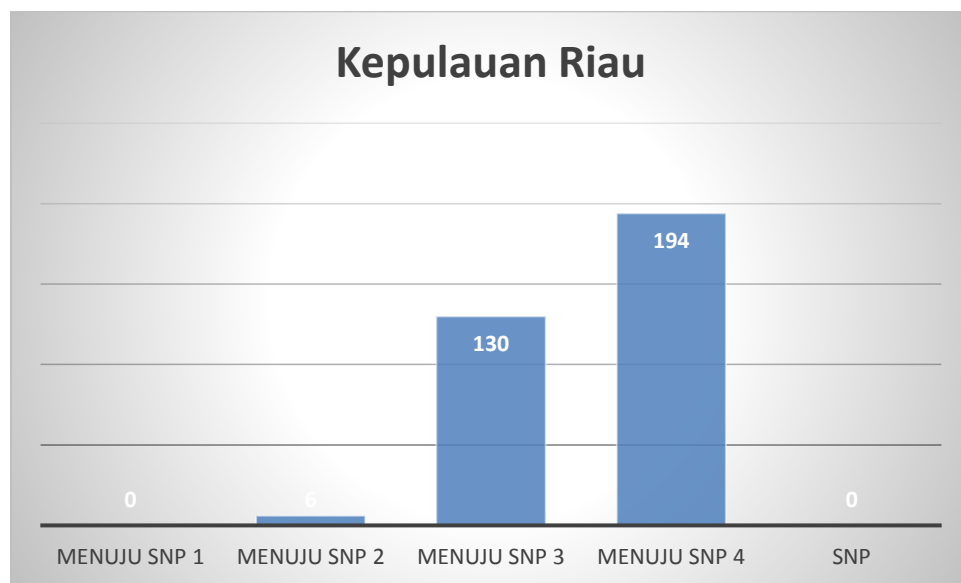
Pada tahun 2017, dari 331 sekolah yang berhasil dipetakan mutunya, 330 sekolah berhasil diproses atau 99.70% dihasilkan rapor mutu. Sedangkan pada tahun 2016, hanya 190 sekolah dari 296 SMP atau sebesar 64.19% yang menghasilkan rapor mutu.

Jumlah Rapor Mutu yang dihasilkan Tahun 2016 vs 2017



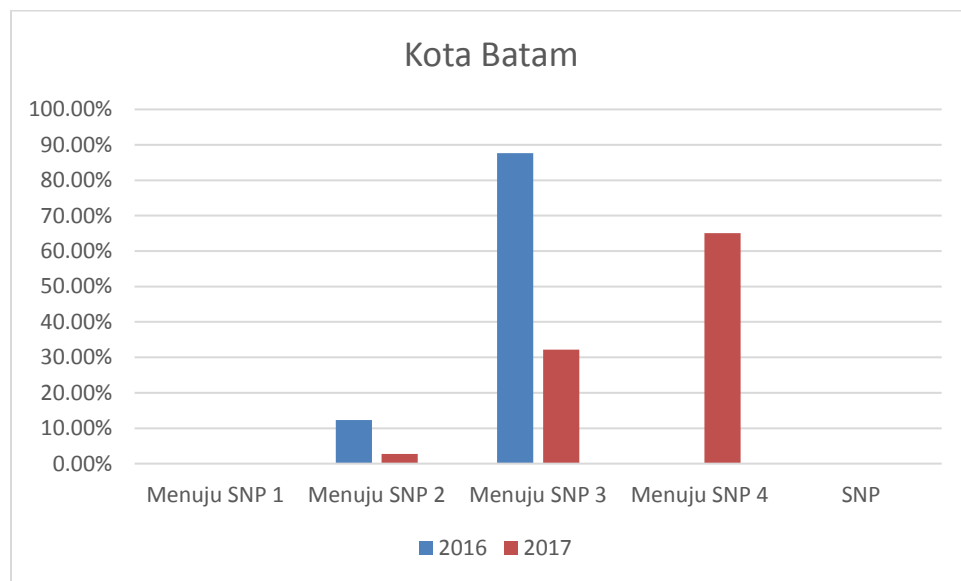
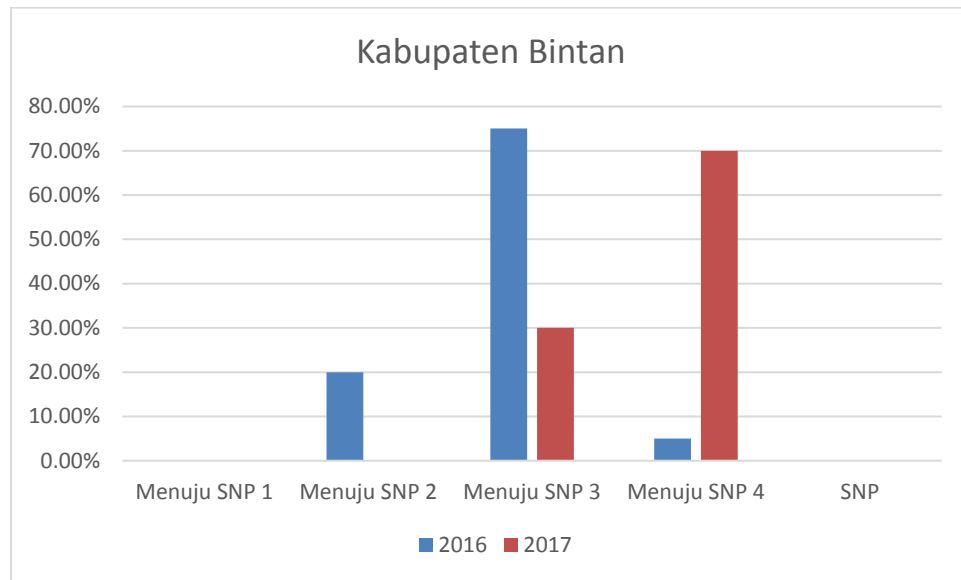
Dari 330 SMP yang berhasil diolah mutunya, semuanya belum mencapai SNP. 58.79% SMP menuju SNP 4, detail pada gambar berikut.

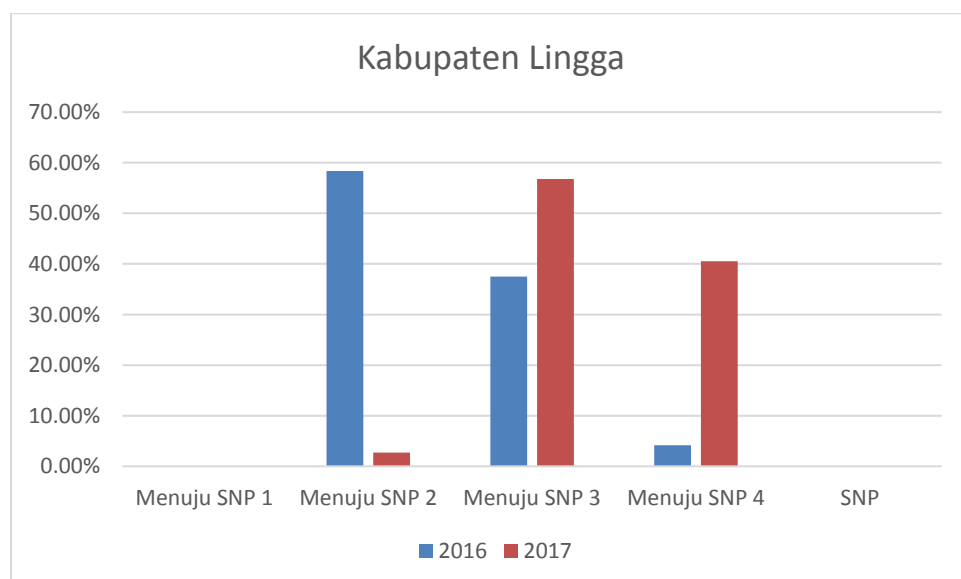
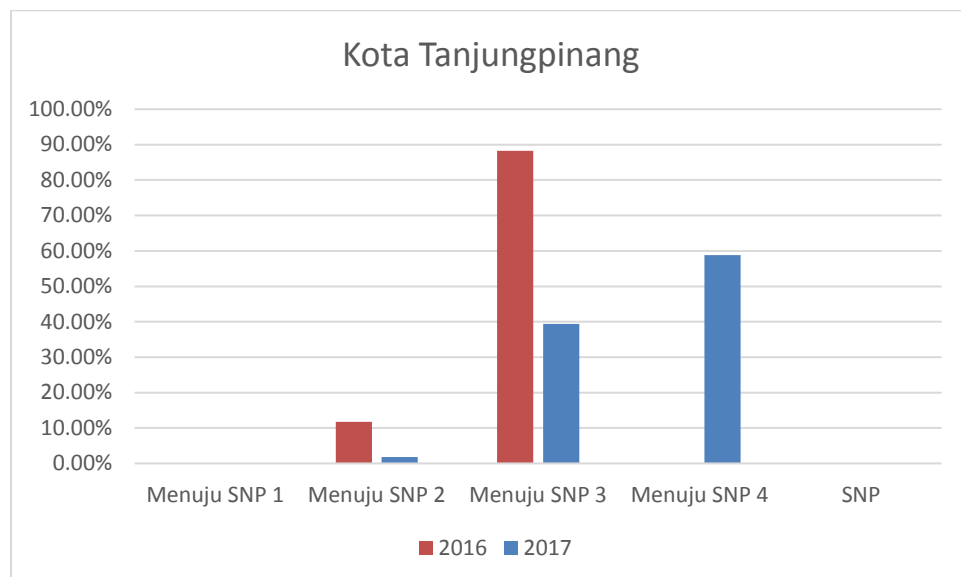
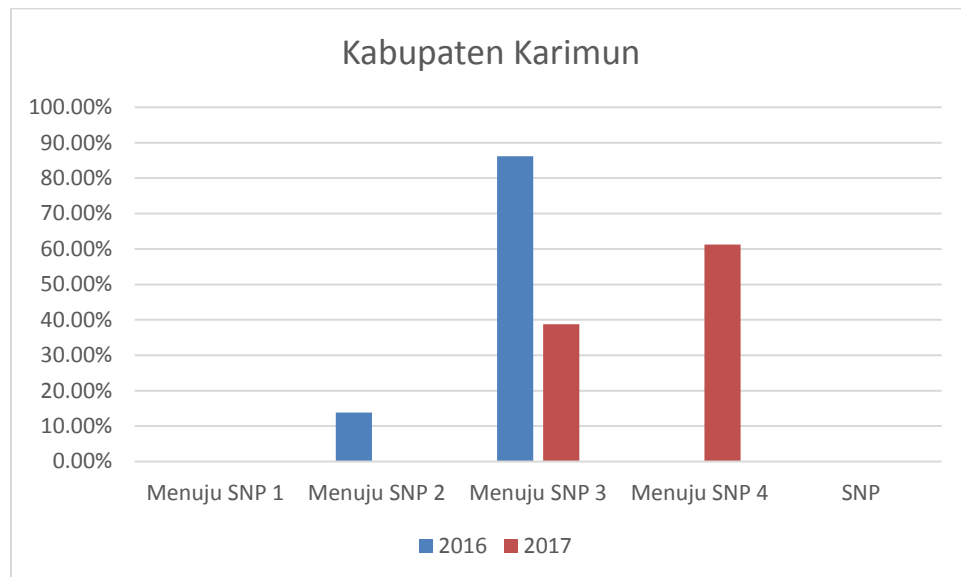
Capaian SNP Jenjang SMP Tahun 2017

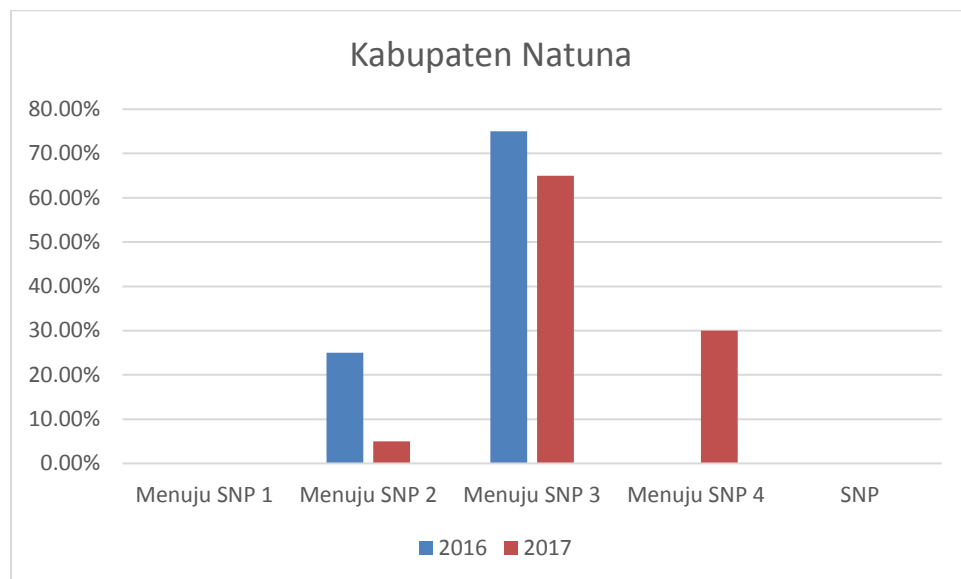
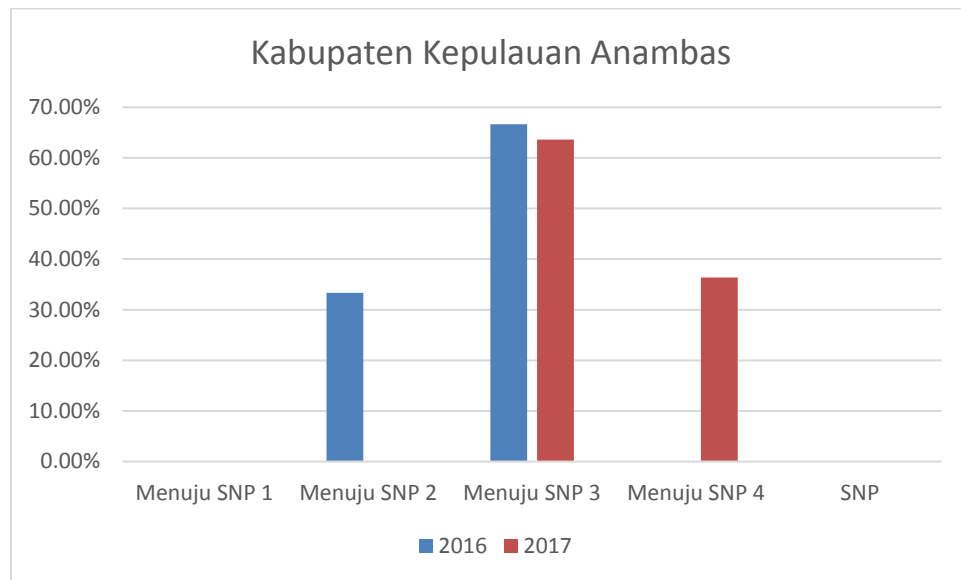


Walaupun capaian SNP jenjang SMP belum memenuhi SNP, namun terjadi peningkatan capaian SNP per Kabupaten/Kota pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Capaian SNP jenjang SMP masing-masing Kabupaten/Kota pada grafik berikut.

**Capaian SNP Jenjang SMP Tahun 2017 vs 2016
per Kabupaten/Kota**

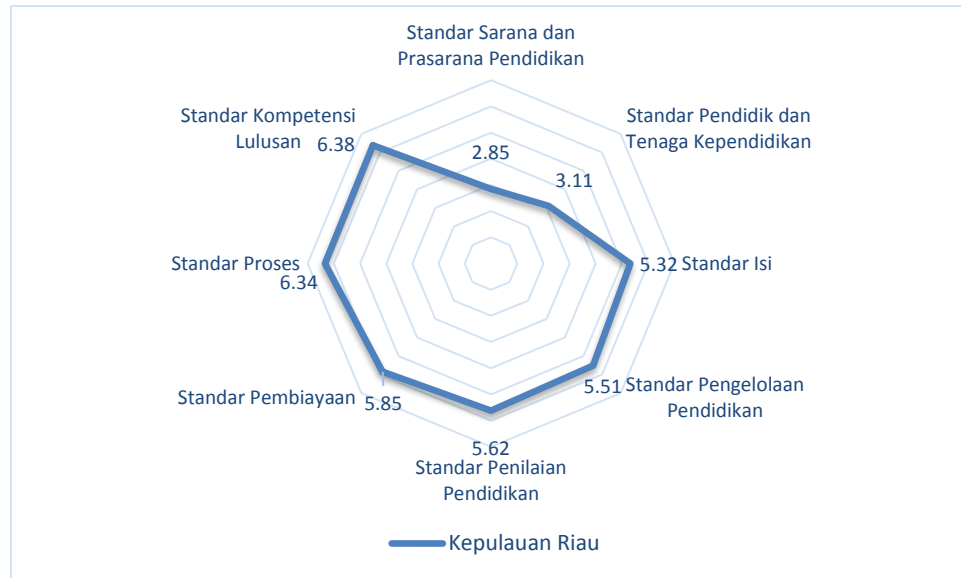






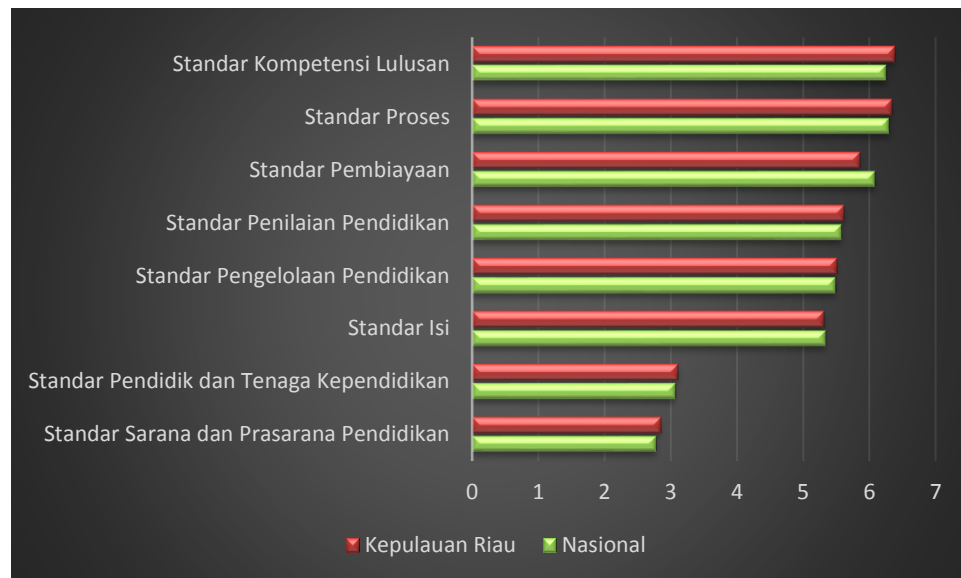
Capaian per standar jenjang SMP di Kepulauan Riau adalah:

Capaian SNP per Standar Jenjang SMP Tahun 2017



Capaian SNP terbaik pada Standar Kompetensi Lulusan dengan skor mutu sebesar 6.38. Sedangkan skor mutu terkecil terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebesar 2.85.

Capaian SNP per Standar Jenjang SMP Tahun 2017



Bila membandingkan capaian skor mutu Nasional dengan skor mutu Kepulauan Riau, skor mutu jenjang SMP di Kepulauan Riau lebih baik daripada skor mutu Nasional pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Proses, Standar Penilaian Pendidikan, Standar

Pengelolaan Pendidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. Tetapi Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan masih kategori Menuju SNP 2 dan sebagai pembanding secara Nasional capaian SNP kedua standar tersebut termasuk kategori Menuju SNP 2 juga.

Skor Capaian SNP per Standar Jenjang SMP Tahun 2017

Kepulauan Riau vs Nasional

Standar Nasional Pendidikan	Nasional	Kepulauan Riau	Kategori
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.78	2.85	Menuju SNP 2
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.07	3.11	Menuju SNP 2
Standar Isi	5.34	5.32	Menuju SNP 4
Standar Pengelolaan Pendidikan	5.49	5.51	Menuju SNP 4
Standar Penilaian Pendidikan	5.58	5.62	Menuju SNP 4
Standar Pembiayaan	6.09	5.85	Menuju SNP 4
Standar Proses	6.30	6.34	Menuju SNP 4
Standar Kompetensi Lulusan	6.26	6.38	Menuju SNP 4

Capaian realisasi persentase SMP yang terpetakan mutu pendidikannya karena ada dukungan dari kegiatan:

- Konsolidasi Data Pengawas Sebagai Verifikator dan Validator Pengumpulan Data Mutu melibatkan 1 orang Pengawas SMP dari Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun.
- Bimbingan Teknis (Penyegaran) Fasilitator Daerah Pemetaan Mutu 7 orang Pengawas SMP (Dinas Pendidikan 7 Kabupaten/Kota).
- Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu bagi Pengawas Sekolah yang melibatkan 2 orang Pengawas SMP Kota Tanjungpinang, 3 orang Pengawas Kabupaten Bintan, 9 orang Pengawas SMP Kabupaten Batam, 3 orang Pengawas SMP Kabupaten Karimun, 5 orang Pengawas SMP Kabupaten Lingga, 4 orang Pengawas SMP Kabupaten Natuna, dan 1 orang Pengawas SMP Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Pendampingan Pengumpulan Data pada 26 SMP di Kota Tanjungpinang, 32 SMP di Kabupaten Bintan, 141 SMP di Kota Batam, 36 SMP di Kabupaten Karimun, 35 SMP di Kabupaten Lingga, 21 SMP di Kabupaten Natuna, dan 15 SMP di Kabupaten Kepulauan Anambas.

- e. Monitoring dan Evaluasi Pengumpulan Data pada 4 SMP di Kota Tanjungpinang, 4 SMP di Kabupaten Bintan, 5 SMP di Kota Batam, 3 SMP di Kabupaten Karimun, 4 SMP di Kabupaten Lingga, 3 SMP di Kabupaten Natuna, dan 4 SMP di Kabupaten Kepulauan Anambas.

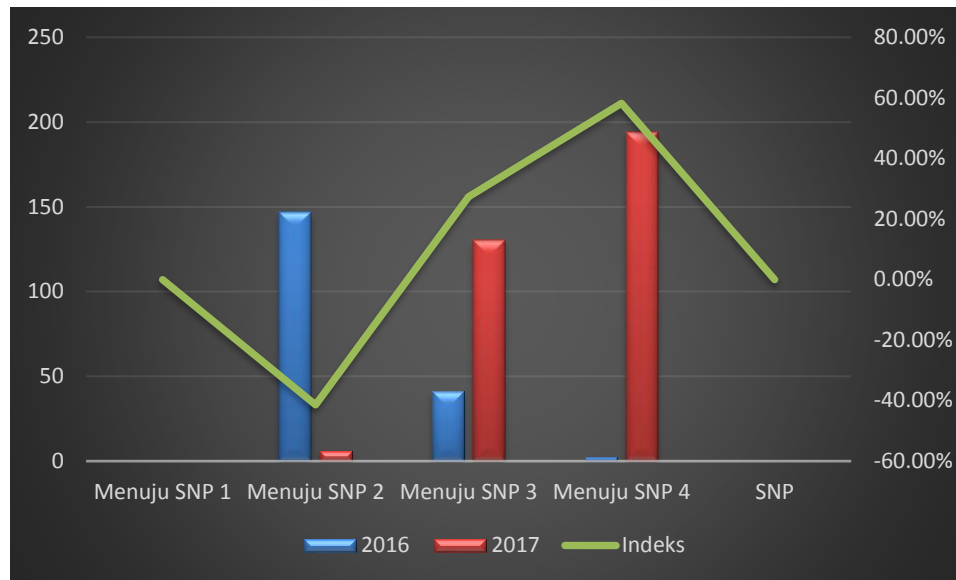
Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu bagi Pengawas Sekolah



4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya

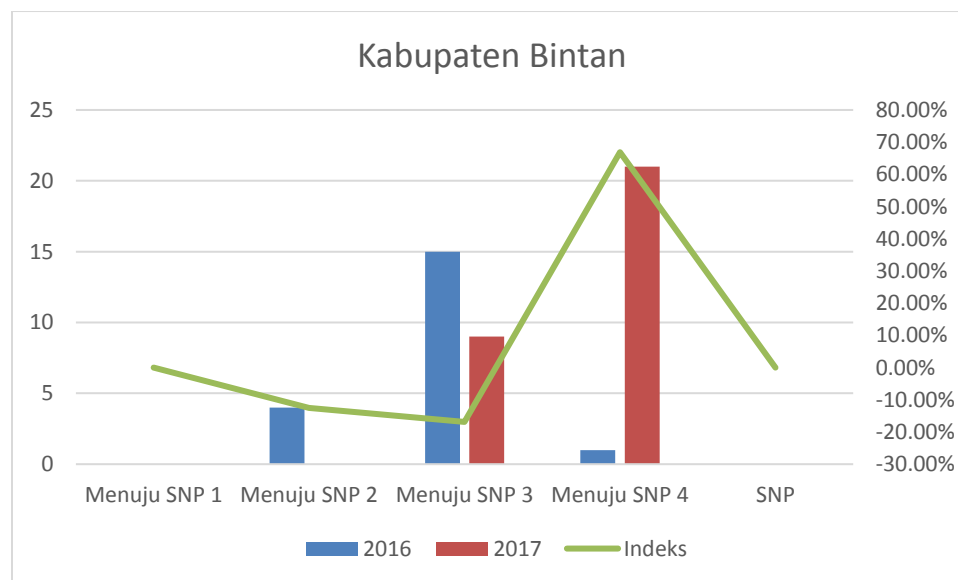
Indikator kinerja persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya di Kepulauan Riau adalah 58.20% pada kategori Menuju SNP 4. Pada rapor mutu tahun 2016 belum ada satu sekolah pun yang memenuhi kategori SNP, hanya 0.59% sekolah yang memenuhi kategori Menuju SNP 4, sisanya termasuk kategori Menuju SNP 2 dan Menuju SNP 3. Sedangkan pada rapor mutu tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang signifikan di mana 58.79% SMP sudah memenuhi kategori Menuju SNP 4.

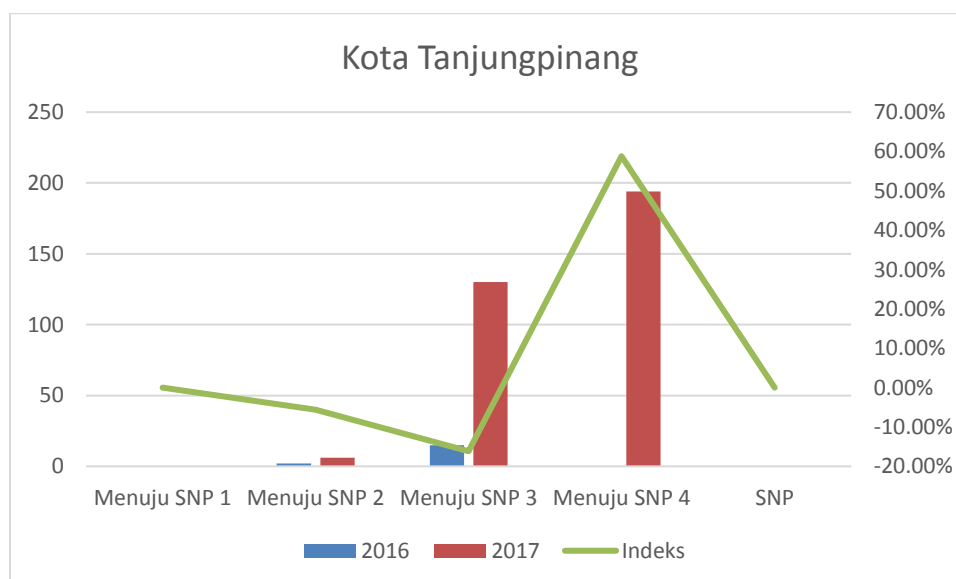
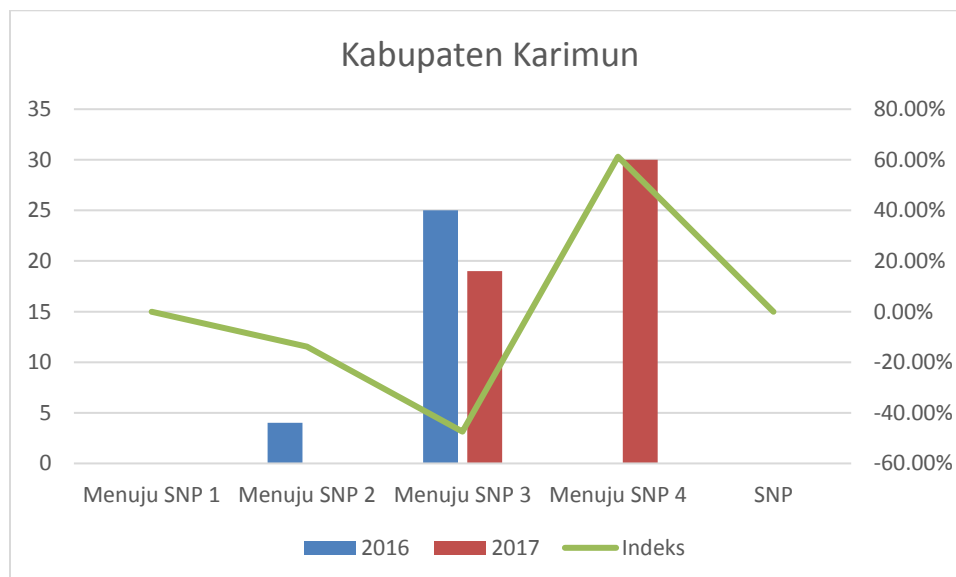
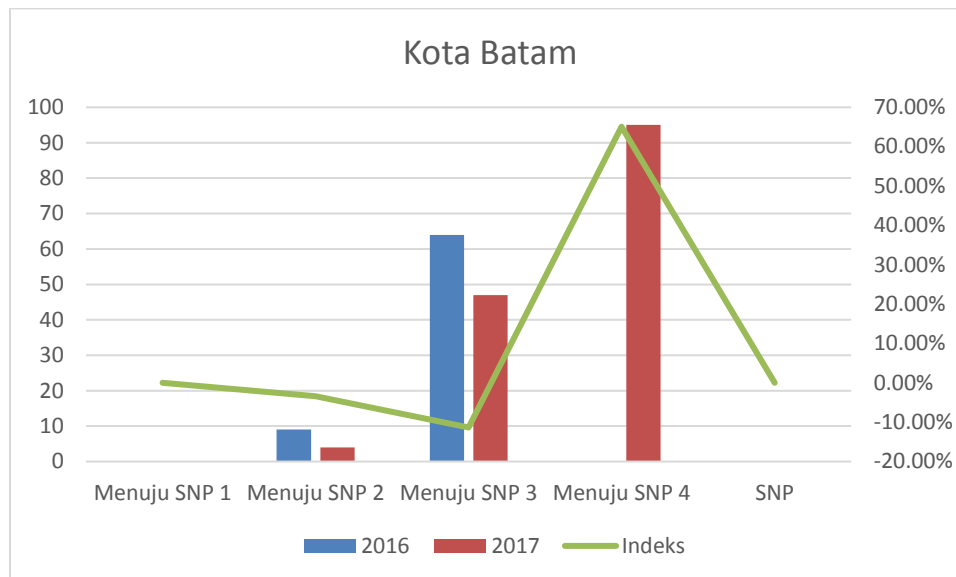
Indeks Efektifitas Kepulauan Riau

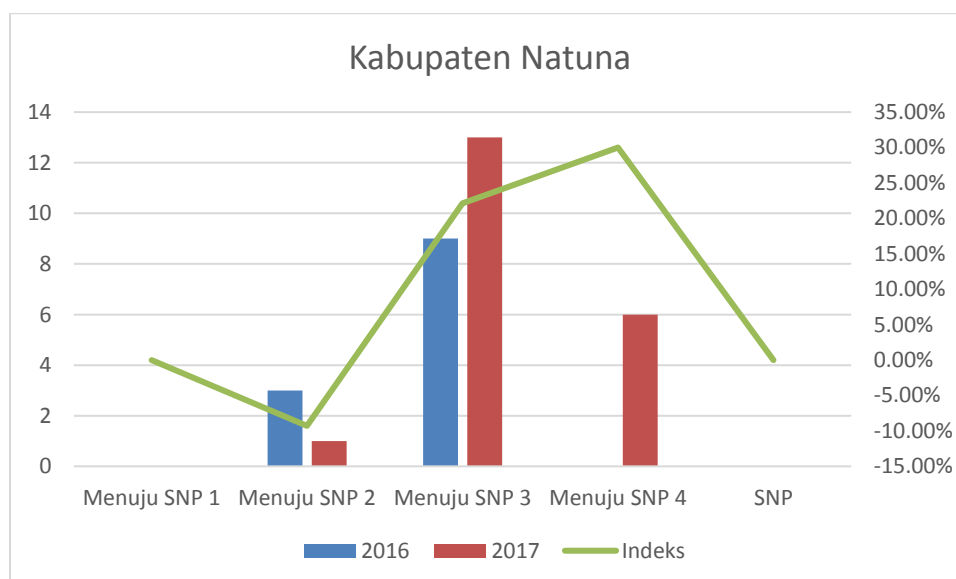
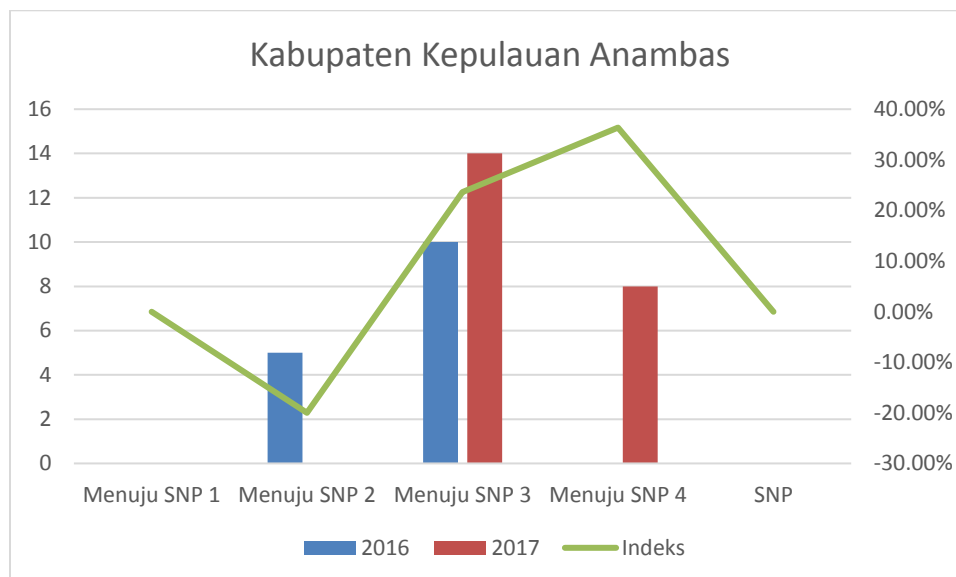
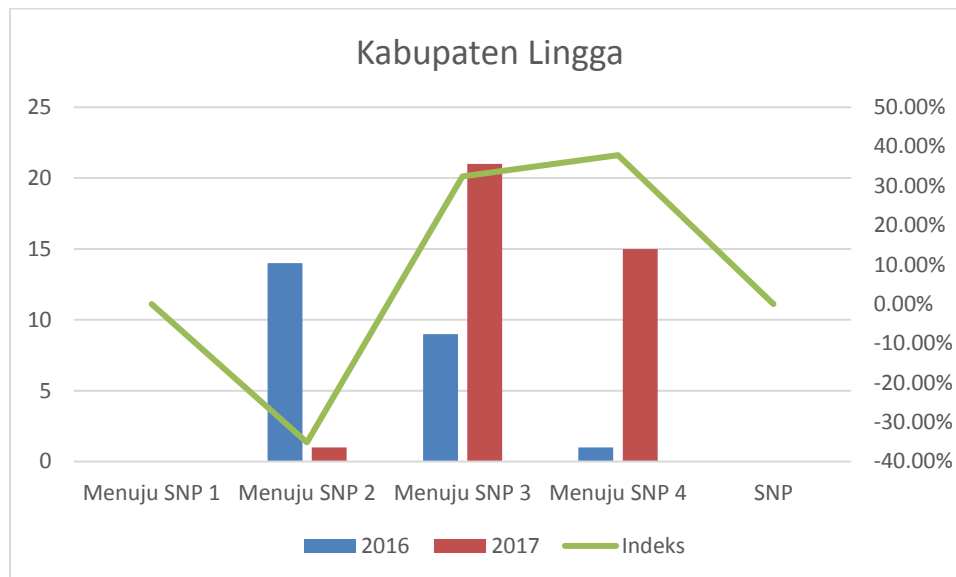


Peningkatan indeks efektifitas kategori Menuju SNP 4 terbesar pada Kabupaten Kepulauan Bintan sebesar 66.88% diikuti oleh Kota Batam sebesar 65,07%, Kabupaten Karimun 61.22%, Kota Tanjungpinang 58.79%, Kabupaten Lingga 37.84 50%, Kabupaten Kepulauan Anambas 36.36%, dan terakhir Kabupaten Natuna 30%.

Indeks Efektifitas Jenjang SMP per Kabupaten/Kota



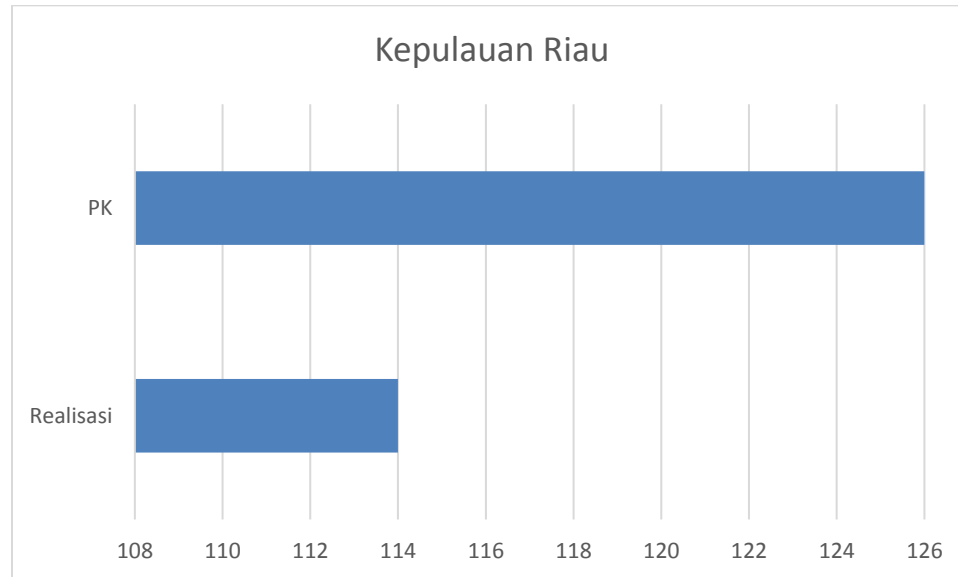




5. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya

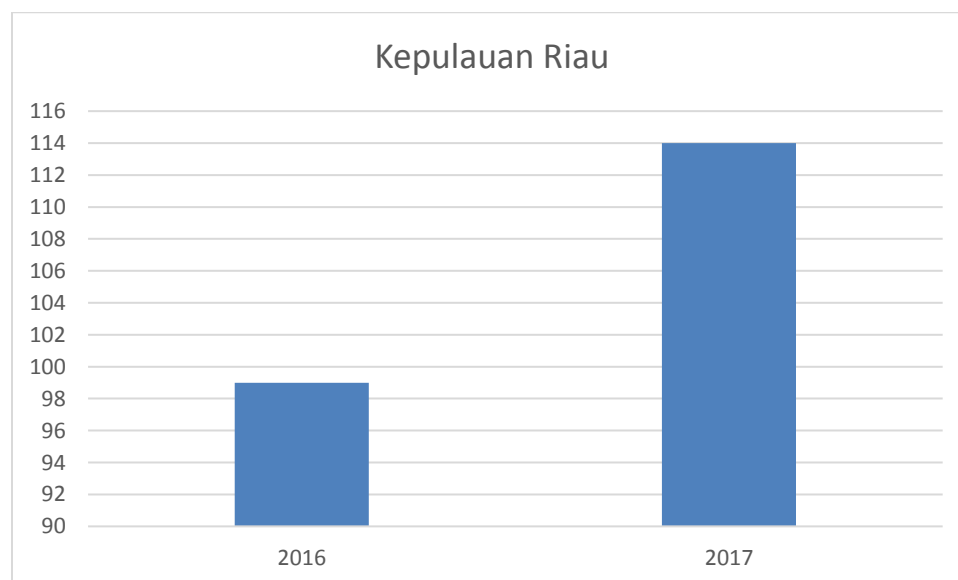
Indikator kinerja persentase SMA yang telah dipetakan mutunya di Kepulauan Riau adalah sebesar 90.48% atau sebanyak 114 SMA dari total 126 SMA yang ada di Kepulauan Riau.

Capaian Kinerja Pemetaan Mutu SMA vs Renstra 2015-2019



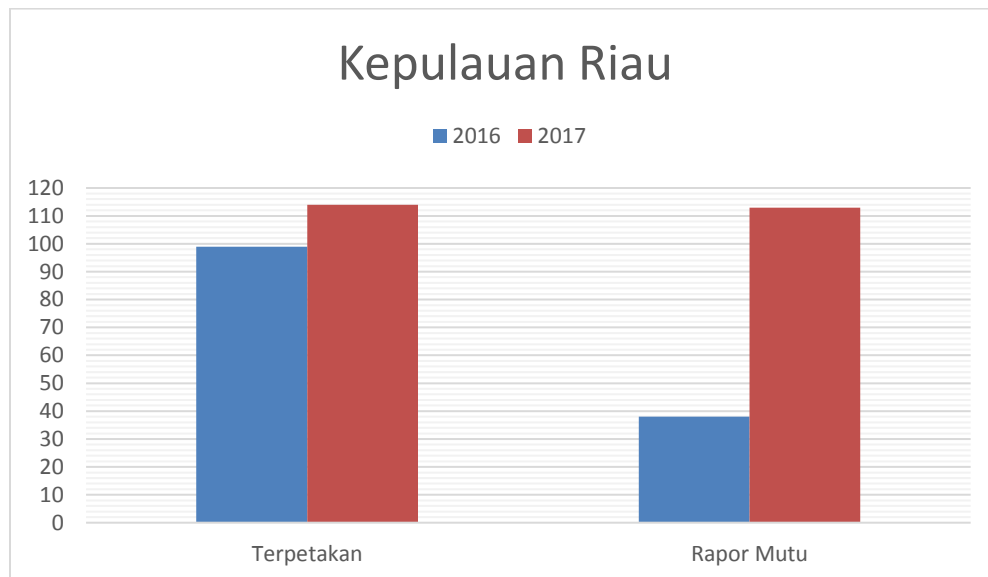
SMA yang berhasil dipetakan mutunya pada tahun 2017 meningkat jumlahnya 15.15%, sedangkan yang berhasil dipetakan mutunya pada tahun 2016 sebanyak 99 sekolah.

Jumlah SMA yang dipetakan mutunya Tahun 2017 vs 2016



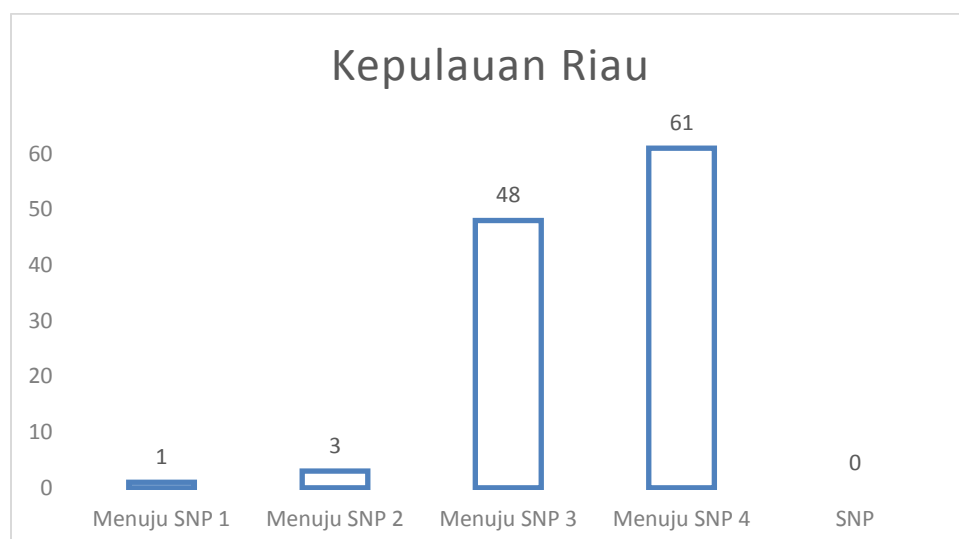
Pada tahun 2017, dari 114 sekolah yang berhasil dipetakan mutunya, 99.12% dapat diolah data mutunya atau 113 sekolah tersebut menghasilkan rapor mutu. Sedangkan pada tahun 2016, hanya 38 SMA dari 99 SMA atau sebesar 38.38% yang menghasilkan rapor mutu. Ini menunjukkan terjadi peningkatan jumlah rapor mutu sebesar 197.37%.

Jumlah Rapor Mutu yang dihasilkan Tahun 2016 vs 2017



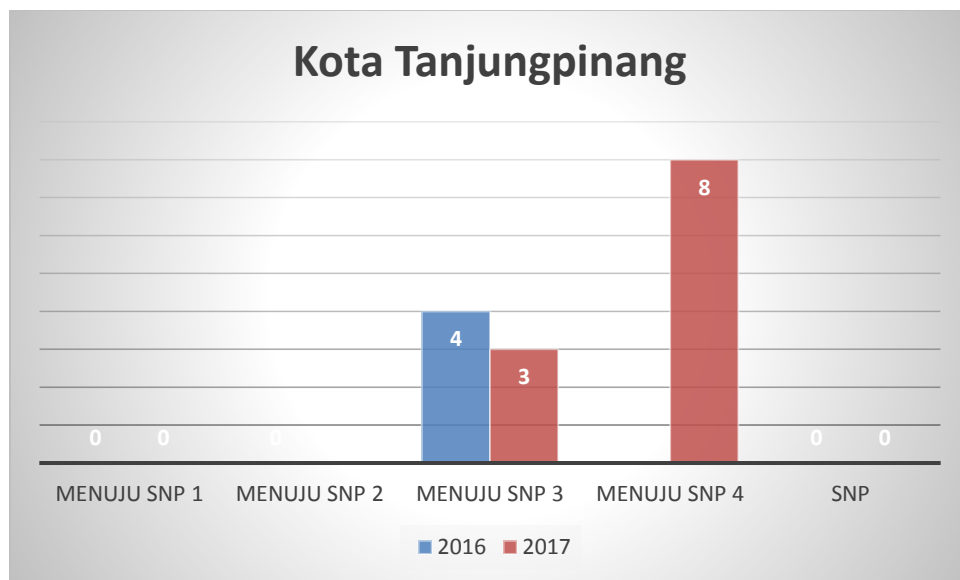
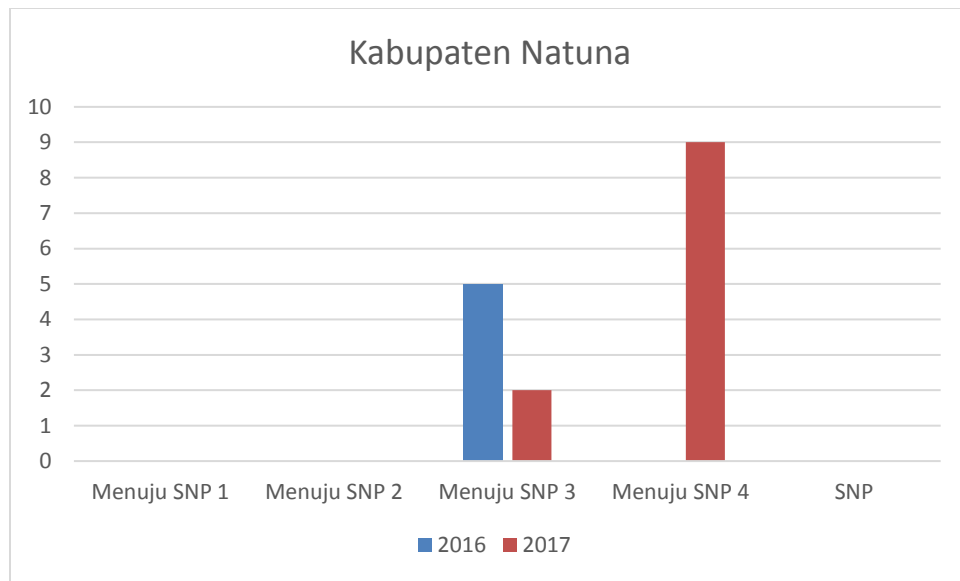
Dari 113 SMA yang dapat diolah peta mutunya, semua SMA yang ada di Kepulauan Riau belum mencapai SNP. Kondisi saat ini 53.98% SMA menuju SNP 4, detil pada gambar berikut.

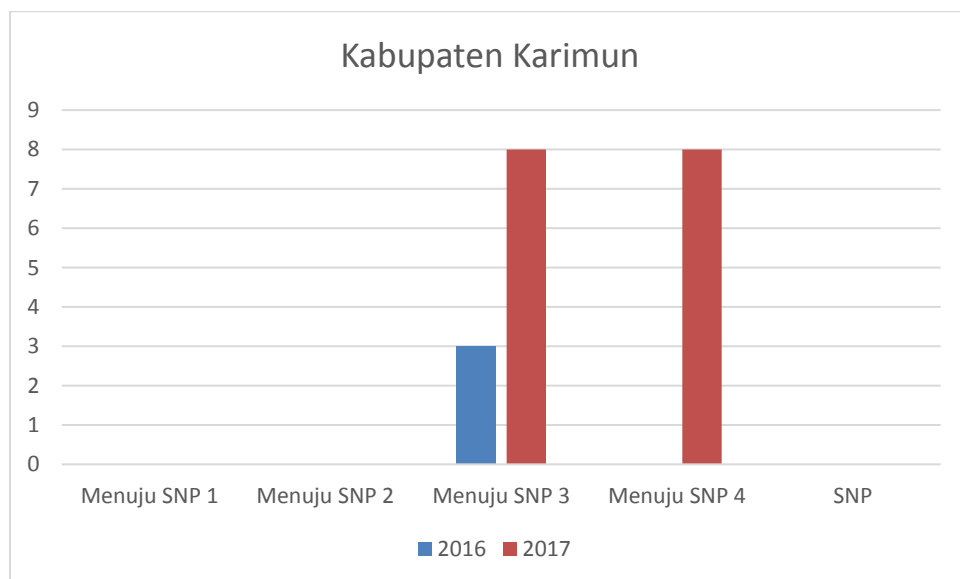
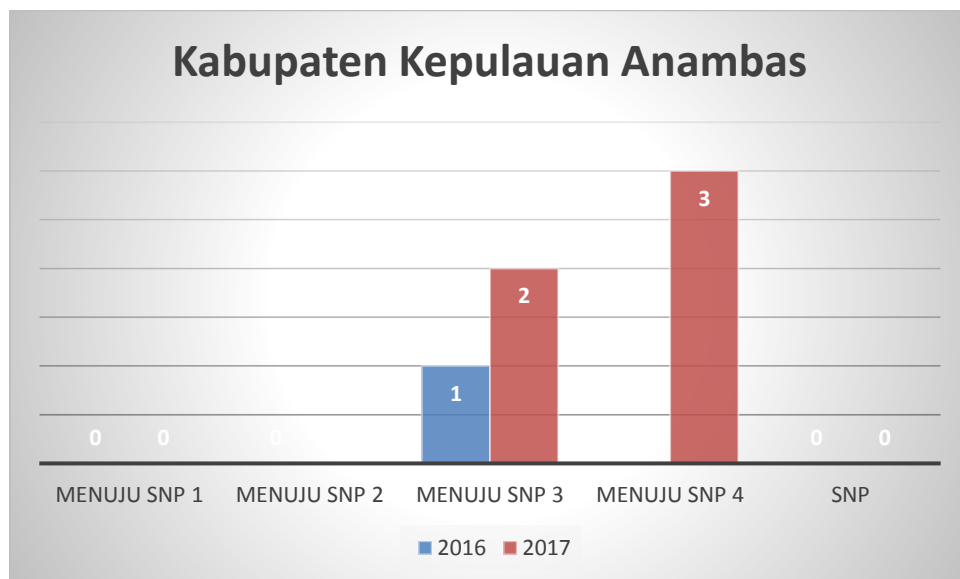
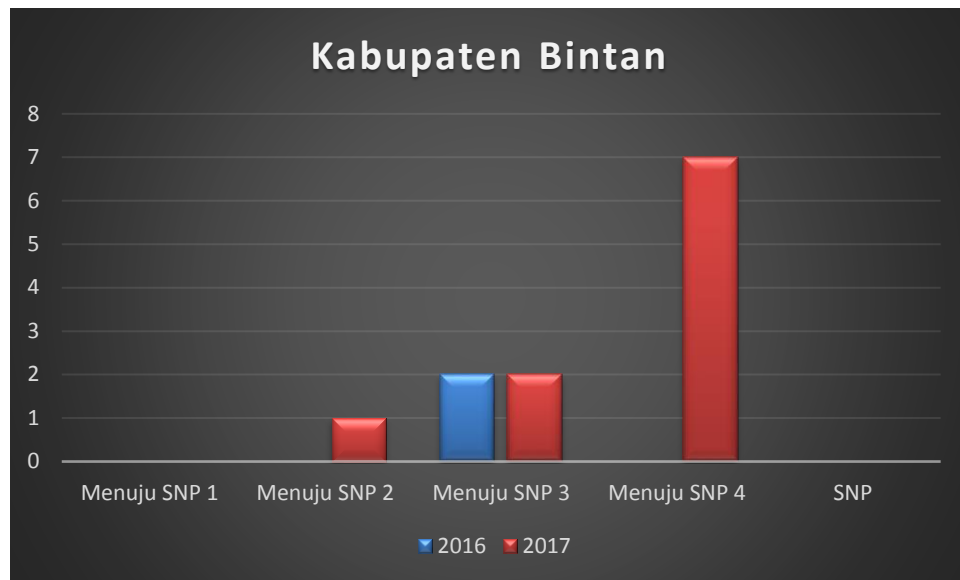
Capaian SNP Jenjang SMA Kepulauan Riau Tahun 2017

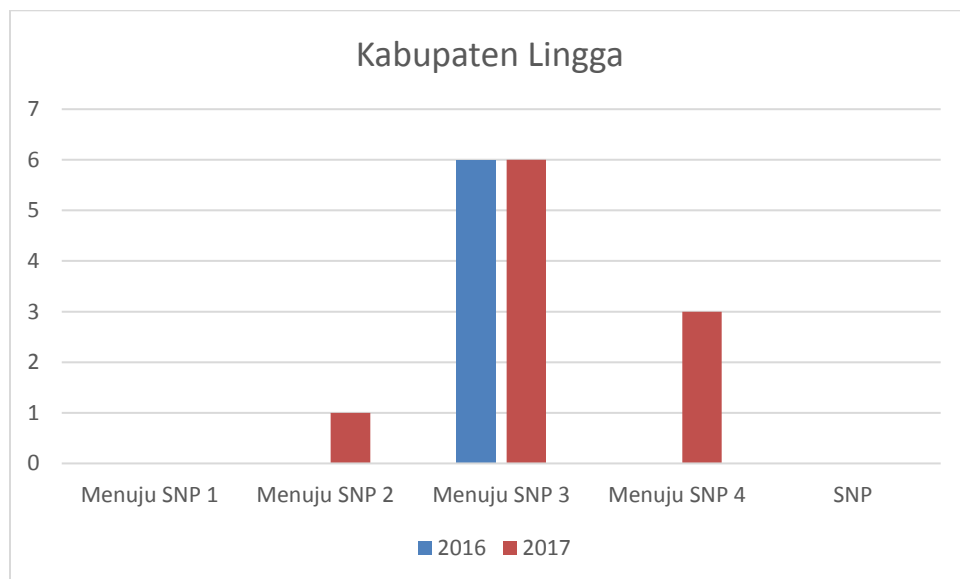
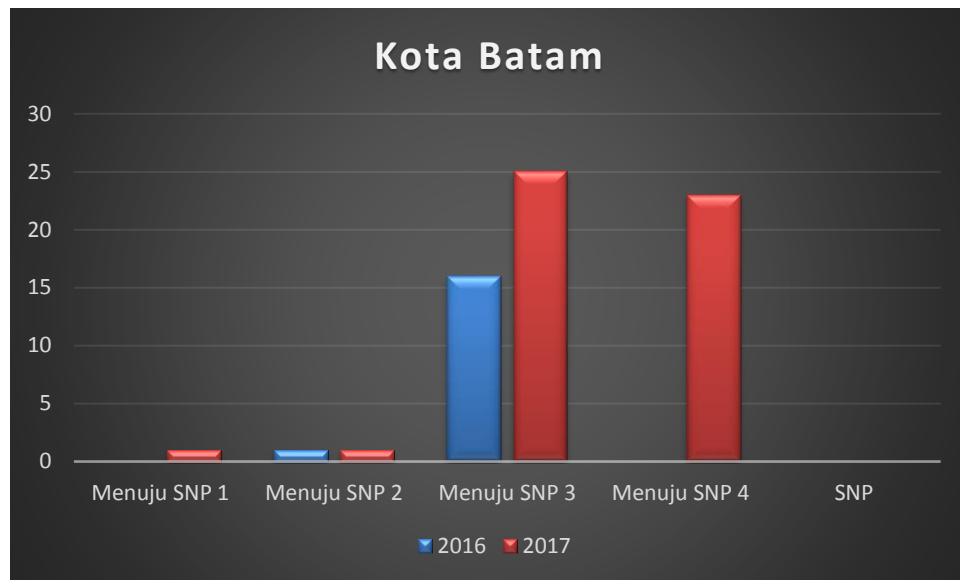


Walaupun capaian SNP jenjang SMA belum memenuhi SNP, namun terjadi peningkatan capaian SNP per Kabupaten/Kota pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Capaian SNP jenjang SMA masing-masing Kabupaten/Kota pada grafik berikut.

**Capaian SNP Jenjang SMA Tahun 2017 vs 2016
per Kabupaten/Kota**

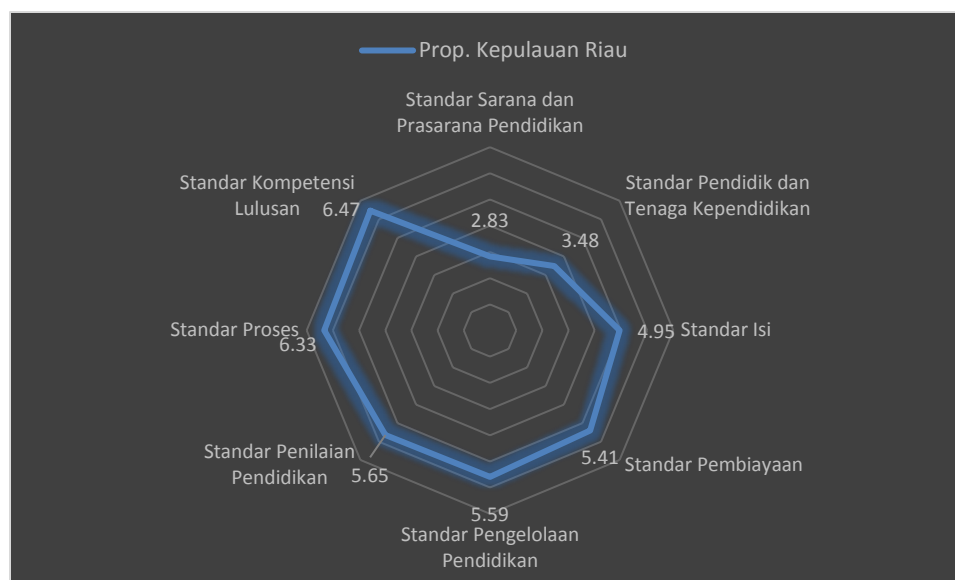






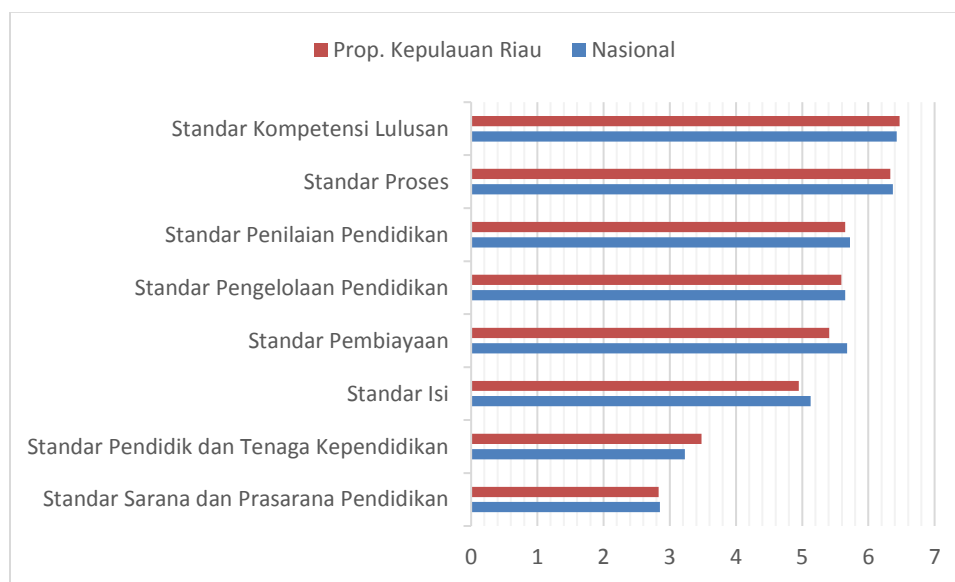
Capaian per standar jenjang SMA di Kepulauan Riau adalah:

Capaian SNP per Standar Jenjang SMA Tahun 2017



Capaian SNP terbaik pada Standar Kompetensi Lulusan dengan skor mutu sebesar 6.47. Sedangkan skor mutu terkecil terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebesar 2.83.

Capaian SNP per Standar Jenjang SMA Tahun 2017



Bila membandingkan capaian skor mutu Nasional dengan skor mutu Kepulauan Riau jenjang SMA, terlihat bahwa skor mutu jenjang SMA di Kepulauan Riau lebih baik daripada skor mutu jenjang SMA Nasional pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta

Standar Kompetensi Lulusan. Sedangkan Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan walaupun kategori Menuju SNP 2 tetapi secara Nasional capaian SNP standar tersebut termasuk kategori Menuju SNP 2 juga.

Skor Capaian SNP per Standar Jenjang SMA Tahun 2017

Kepulauan Riau vs Nasional

Standar Nasional Pendidikan	Nasional	Kepulauan Riau	Kategori
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.85	2.83	Menuju SNP 2
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	3.23	3.48	Menuju SNP 3
Standar Isi	5.13	4.95	Menuju SNP 3
Standar Pembiayaan	5.68	5.41	Menuju SNP 4
Standar Pengelolaan Pendidikan	5.65	5.59	Menuju SNP 4
Standar Penilaian Pendidikan	5.72	5.65	Menuju SNP 4
Standar Proses	6.37	6.33	Menuju SNP 4
Standar Kompetensi Lulusan	6.43	6.47	Menuju SNP 4

Capaian realisasi persentase SMA yang terpetakan mutu pendidikannya karena ada dukungan dari kegiatan:

- Konsolidasi Data Pengawas Sebagai Verifikator dan Validator Pengumpulan Data Mutu melibatkan 1 orang Pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- Bimbingan Teknis (Penyegaran) Fasilitator Daerah Pemetaan Mutu 1 orang Pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu bagi Pengawas Sekolah yang melibatkan 4 orang Pengawas SMA Kota Tanjungpinang, 1 orang Pengawas Kabupaten Bintan, 8 orang Pengawas SMA Kabupaten Batam, 8 orang Pengawas SMA Kabupaten Karimun, 5 orang Pengawas SMA Kabupaten Lingga, 2 orang Pengawas SMA Kabupaten Natuna, dan 1 orang Pengawas SMA Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Pendampingan Pengumpulan Data pada 12 SMA di Kota Tanjungpinang, 11 SMA di Kabupaten Bintan, 58 SMA di Kota Batam, 17 SMA di Kabuapten Karimun, 11 SMA di Kabupaten Lingga, 14 SMA di Kabupaten Natuna, dan 4 SMA di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Monitoring dan Evaluasi Pengumpulan Data pada 2 SMA di Kota Tanjungpinang, 2 SMA di Kabupaten Bintan, 8 SMA di Kota Batam, 4 SMA di Kabupaten Karimun, 2 SMA

di Kabupaten Lingga, 2 SMA di Kabupaten Natuna, dan 2 SMA di Kabupaten Kepulauan Anambas.

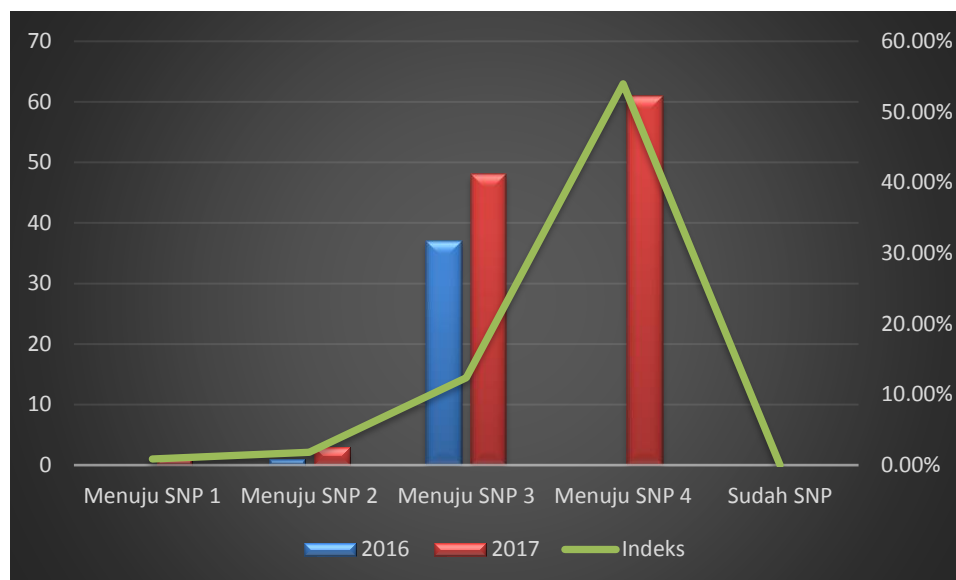
Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu bagi Pengawas Sekolah



6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya

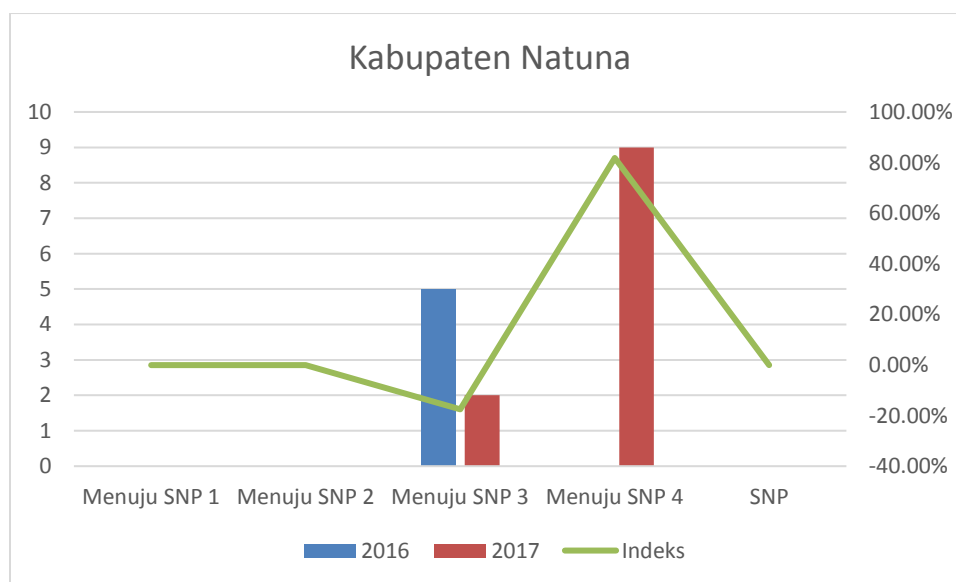
Indikator kinerja persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya di Kepulauan Riau adalah 53.98% pada kategori Menuju SNP 4. Pada rapor mutu tahun 2016 belum ada satu sekolah pun yang memenuhi kategori SNP, bahkan belum ada satu sekolah pun yang memenuhi kategori Menuju SNP 4, persentase terbesar SMA yang ada di Kepulauan Riau termasuk kategori Menuju SNP 3. Sedangkan pada rapor mutu tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang signifikan di mana persentase terbesar SMA sudah memenuhi kategori Menuju SNP 4.

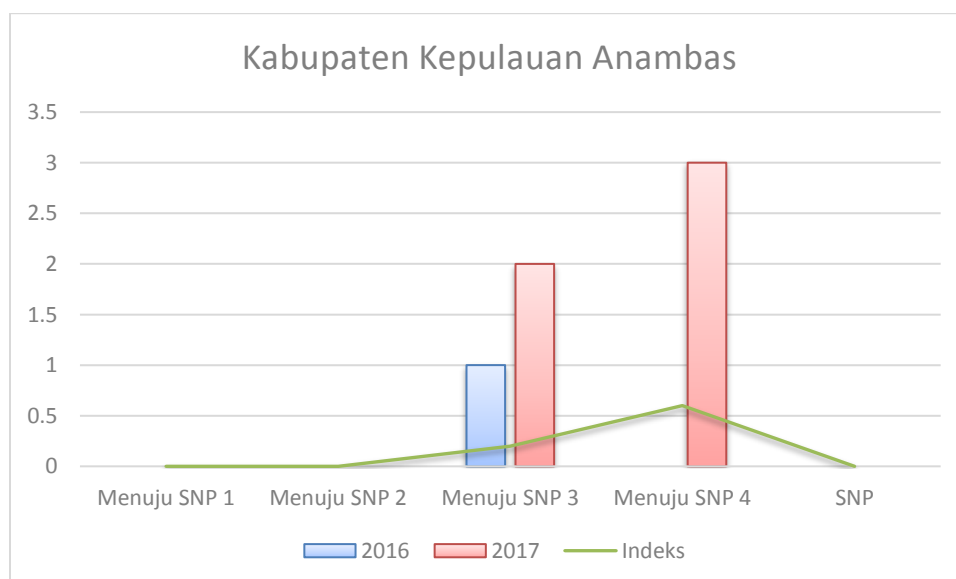
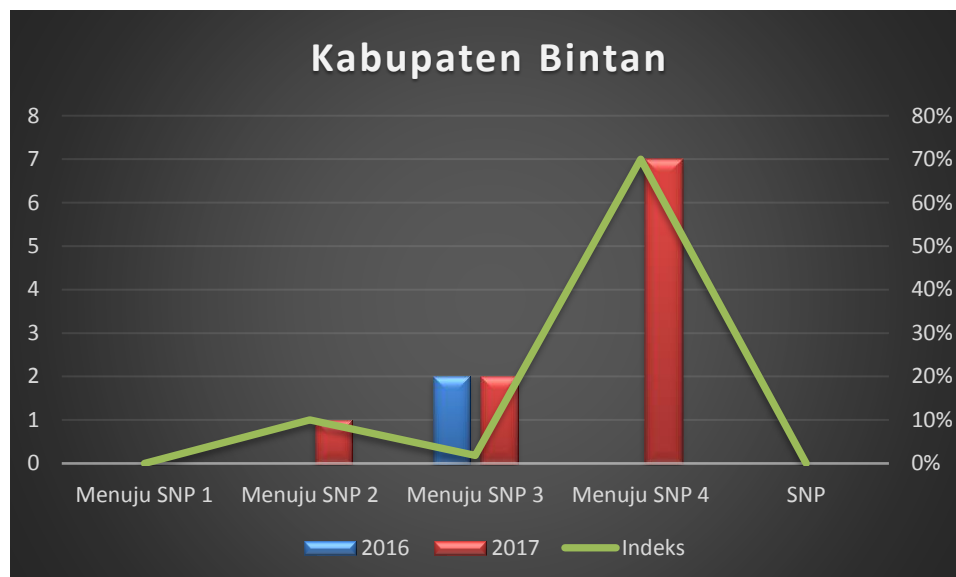
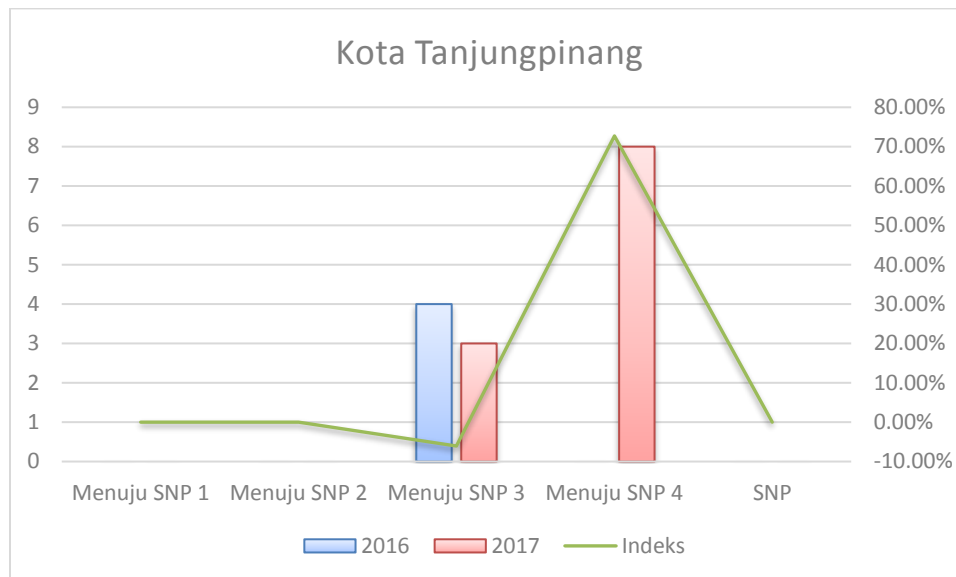
Indeks Efektifitas Jenjang SMA Kepulauan Riau

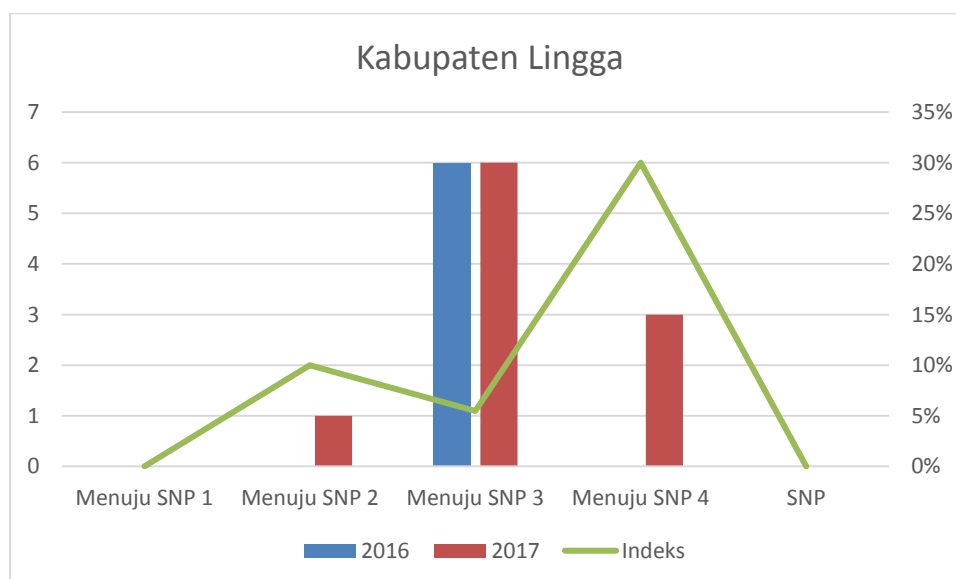
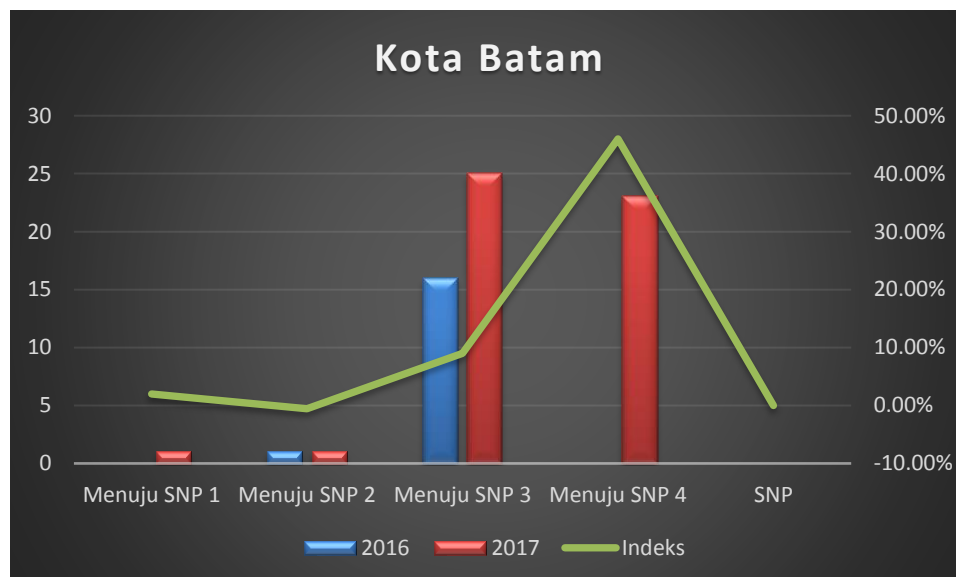
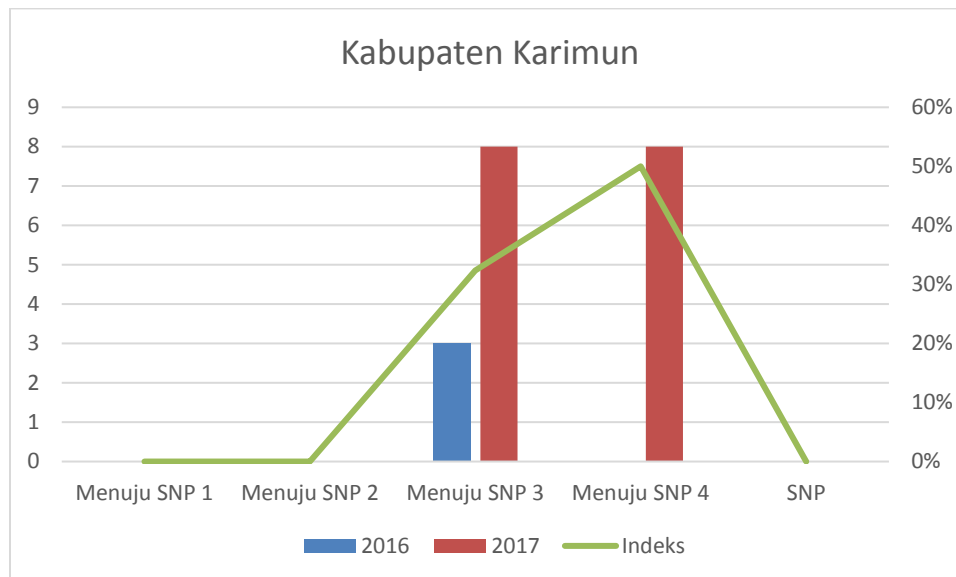


Peningkatan indeks efektifitas kategori Menuju SNP 4 terbesar pada Kabupaten Kepulauan Natuna sebesar 81.82% diikuti oleh Kota Tanjungpinang sebesar 72,73%, Kabupaten Bintan 70%, Kabupaten Kepulauan Anambas 60%, Kota Karimun 50%, Kota Batam 46%, dan terakhir Kabupaten Lingga 30%.

Indeks Efektifitas Jenjang SMA per Kabupaten/Kota



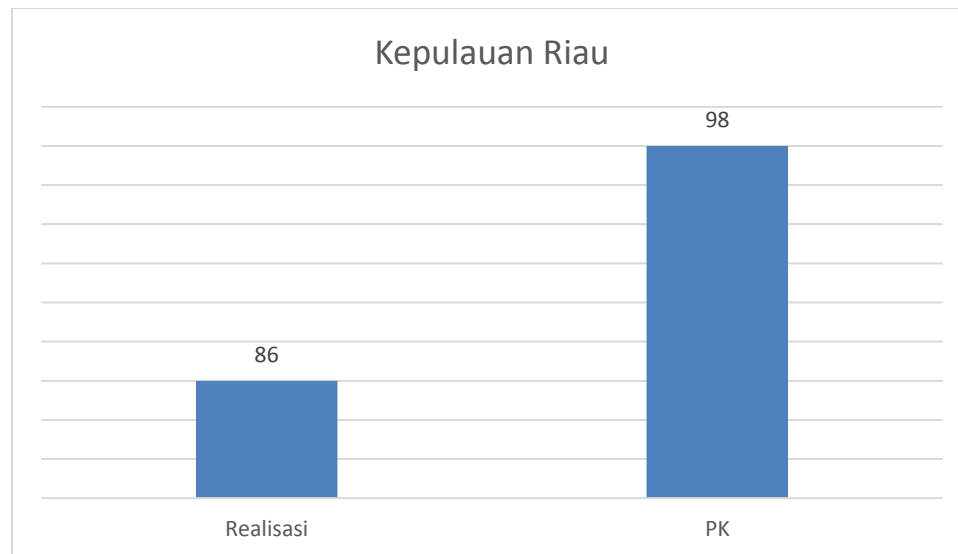




7. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya

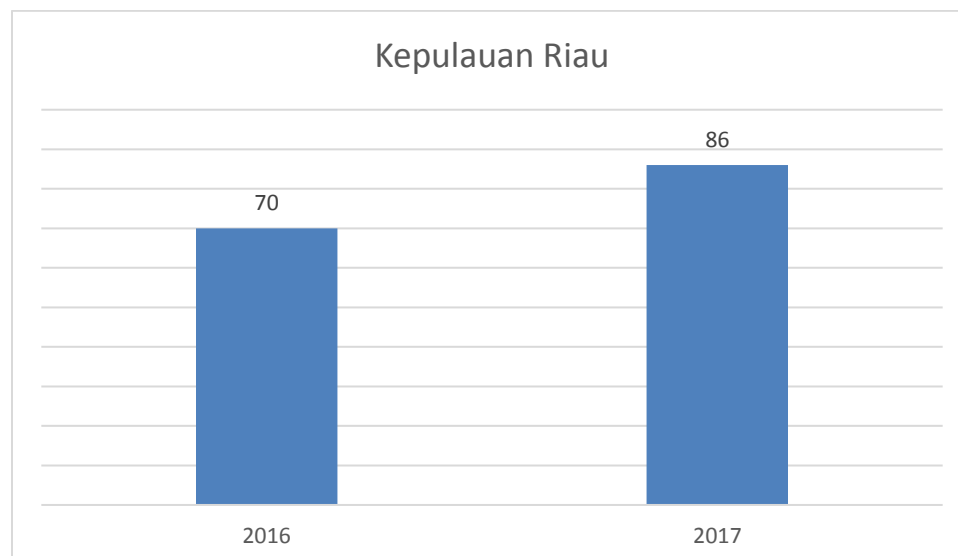
Indikator kinerja persentase SMK yang telah dipetakan mutunya di Kepulauan Riau adalah sebesar 87.76% atau sebanyak 86 SMK dari 98 SMK yang ada di Kepulauan Riau.

Capaian Kinerja Pemetaan Mutu SMK vs Perjanjian Kinerja



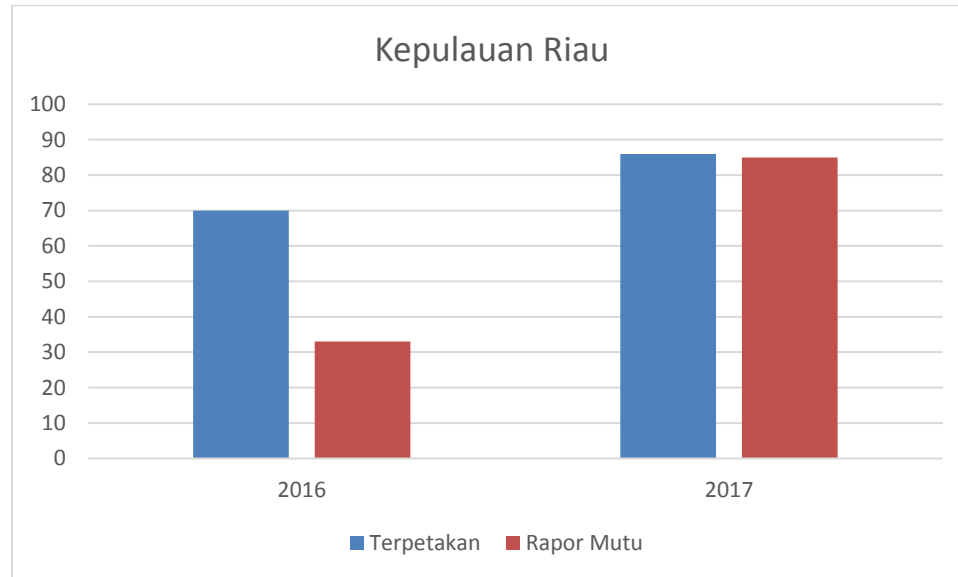
SMK yang berhasil dipetakan mutunya pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016. SMK yang dipetakan mutunya tahun 2017 lebih tinggi 22.86% daripada SMK yang dipetakan mutunya tahun 2016.

Jumlah SMK yang dipetakan mutunya Tahun 2016 vs 2017



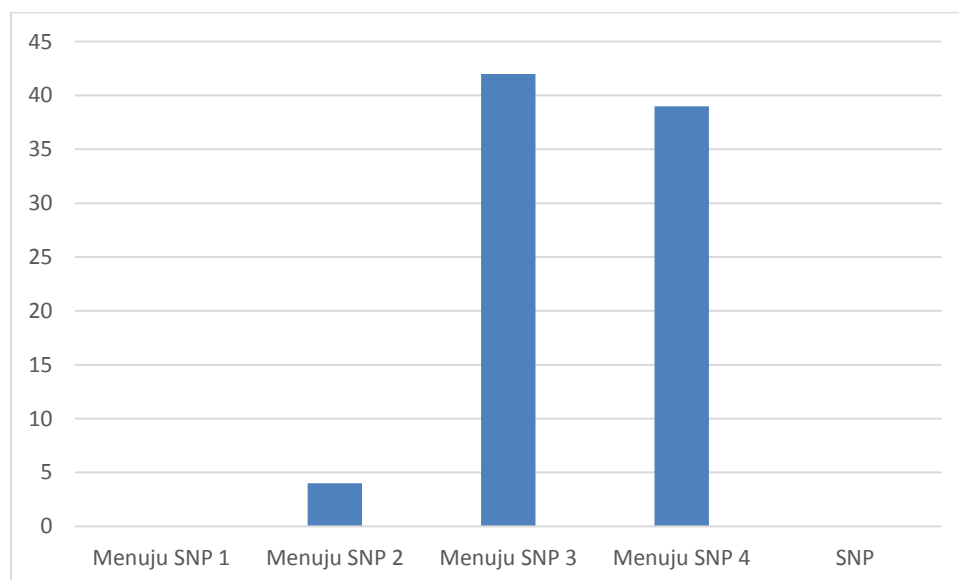
Jumlah rapor mutu yang dihasilkan pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 157.85% bila dibandingkan jumlah rapor mutu yang dihasilkan pada tahun 2016.

Jumlah Rapor Mutu yang dihasilkan Tahun 2016 vs 2017



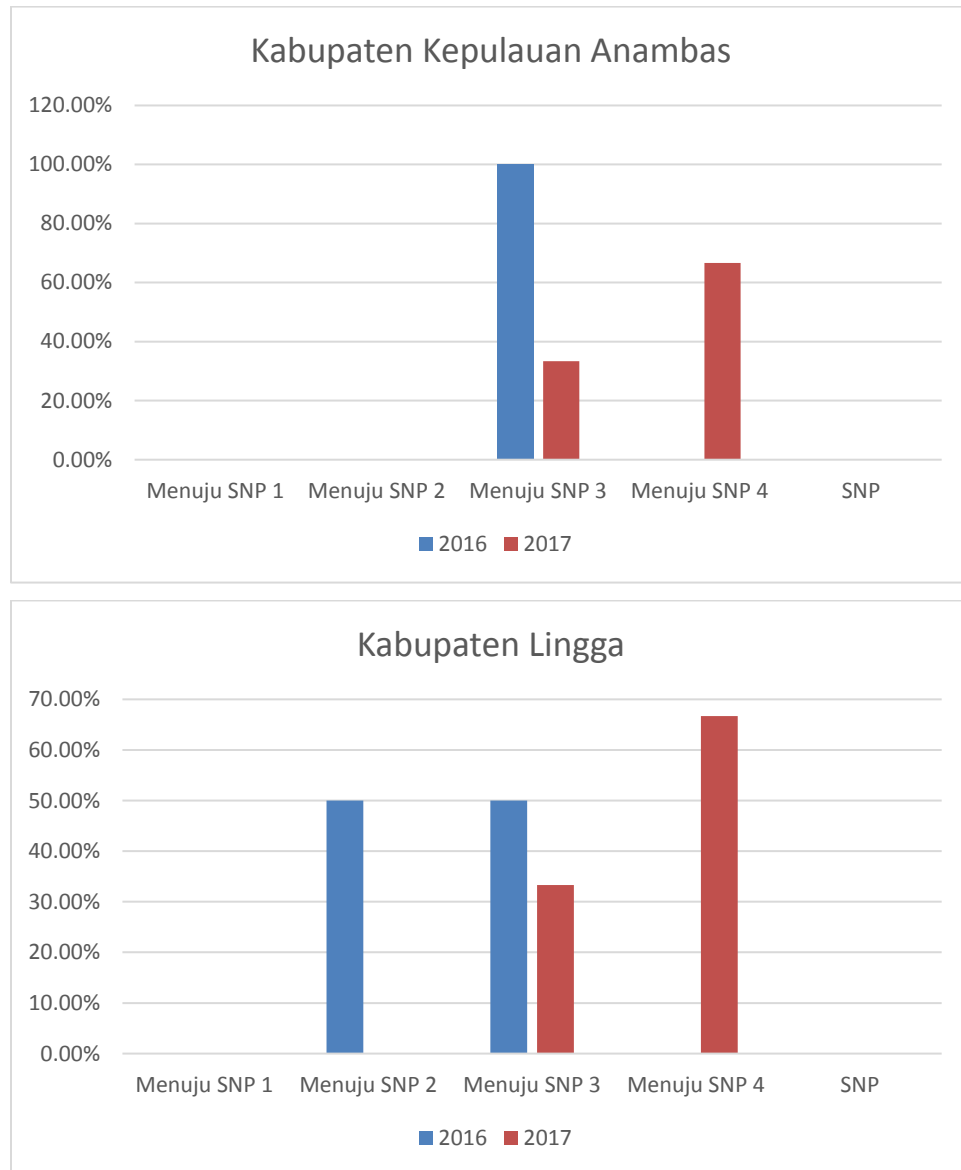
Dari 86 SMK yang dipetakan mutunya, 85 SMK yang dapat diolah peta mutunya dan menghasilkan rapor mutu di mana SMK yang ada di Kepulauan Riau semuanya belum mencapai SNP. Capaian tertinggi Menuju SNP 3 detil pada gambar berikut.

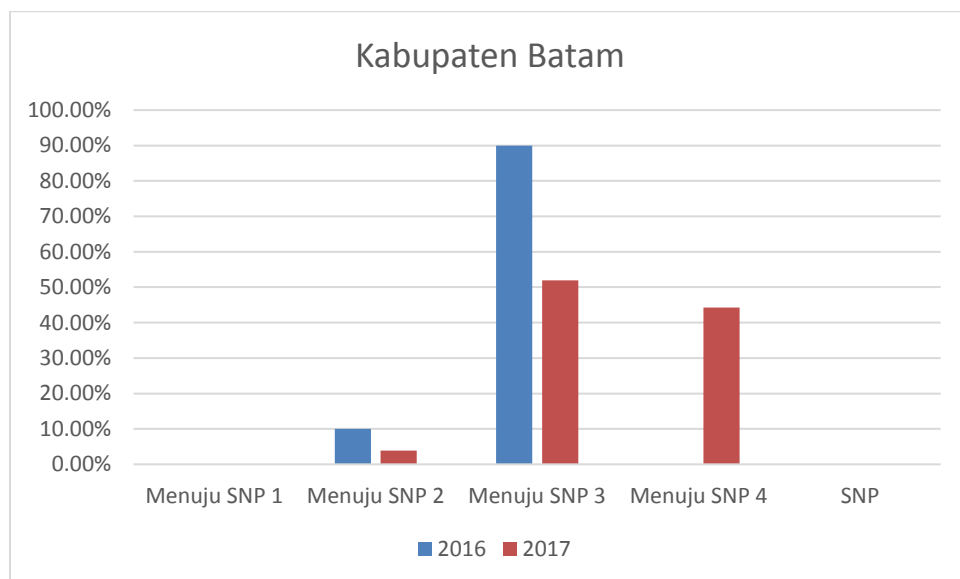
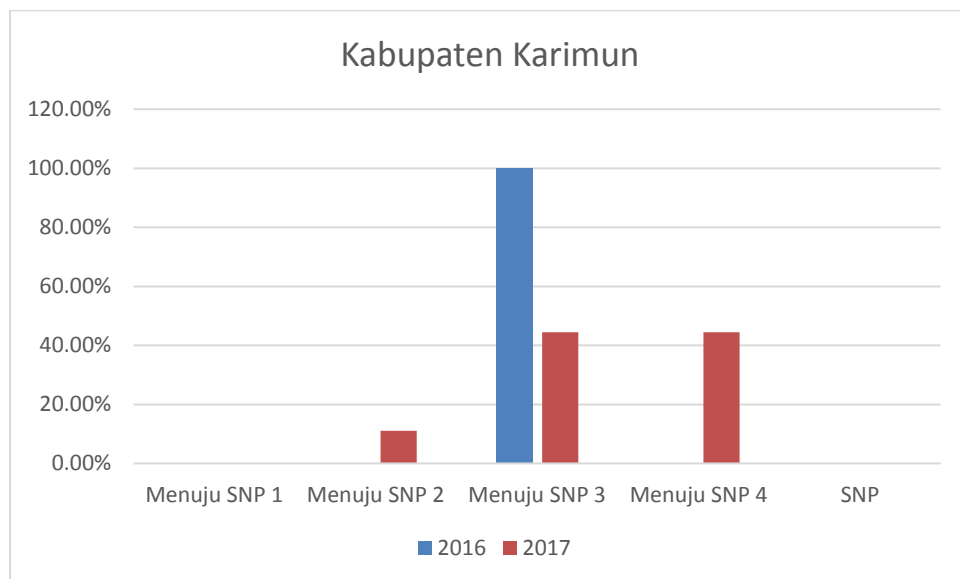
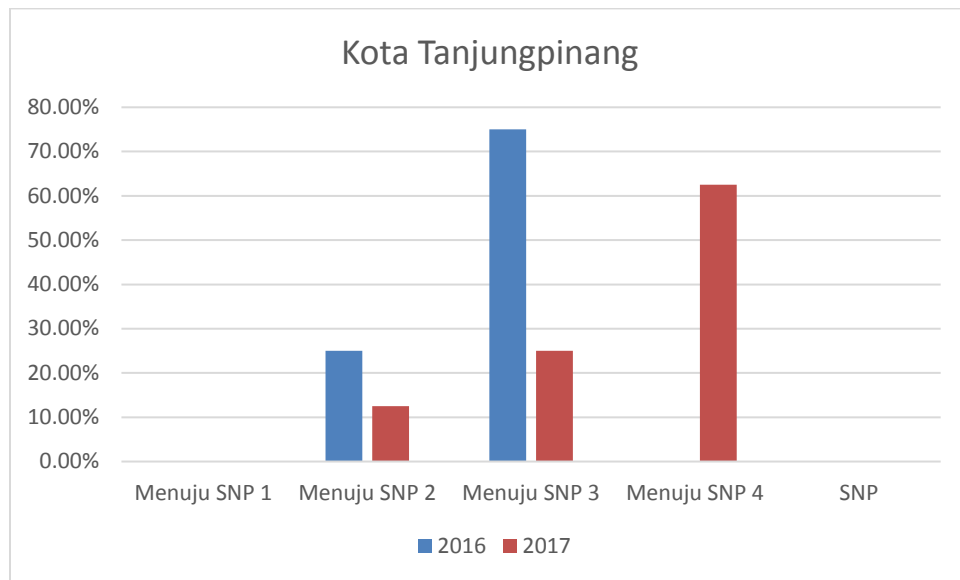
Capaian SNP Jenjang SMK Kepulauan Riau Tahun 2017

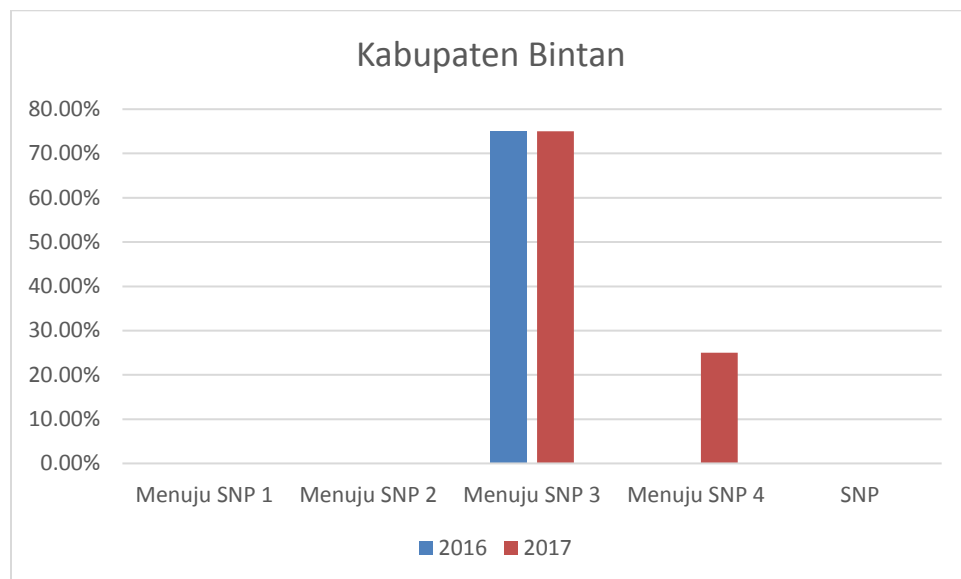
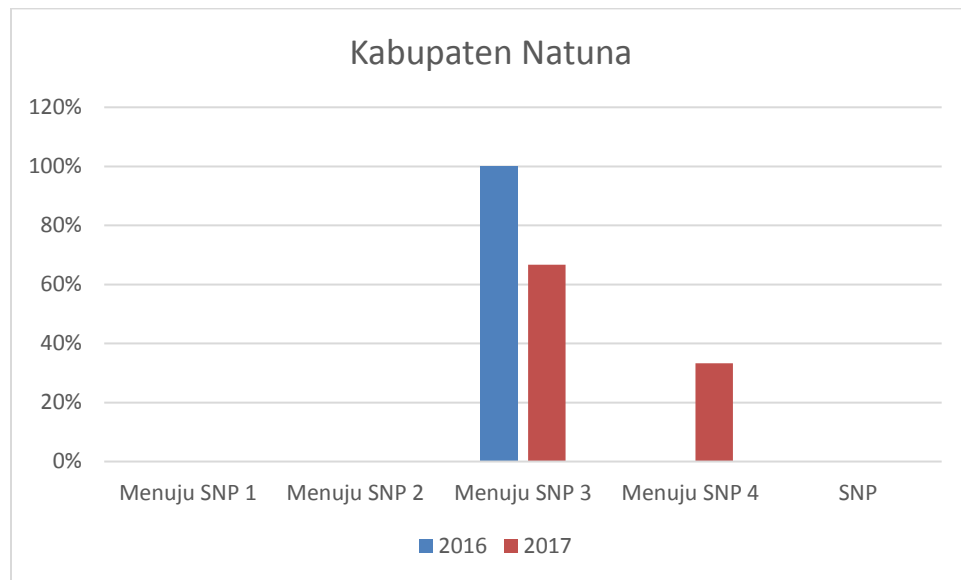


Walaupun capaian SNP jenjang SMK belum memenuhi SNP, namun terjadi peningkatan capaian SNP per Kabupaten/Kota yang ada di Kepulauan Riau pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016. Capaian SNP jenjang SMK masing-masing Kabupaten/Kota pada grafik berikut.

**Capaian SNP Jenjang SMK Tahun 2017 vs 2016
per Kabupaten/Kota**

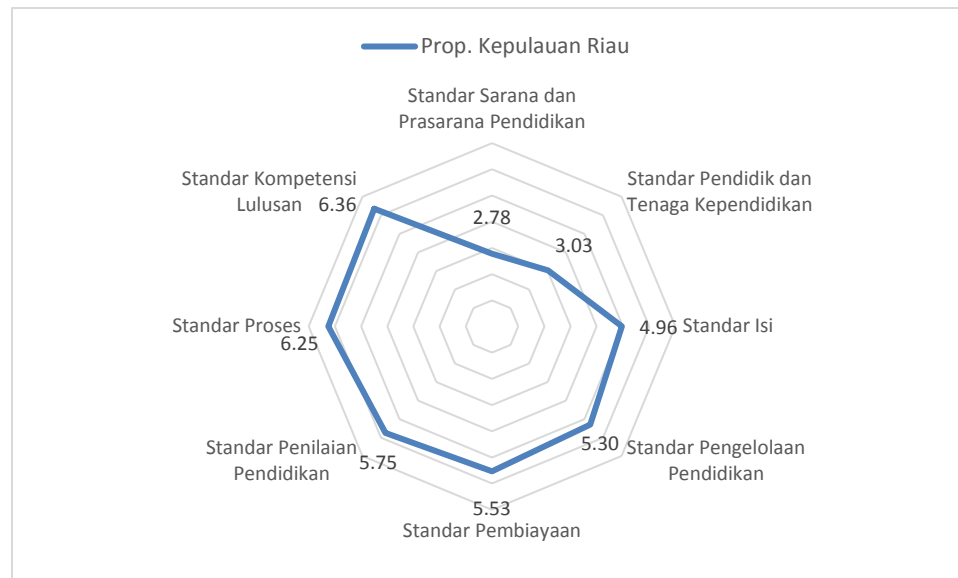






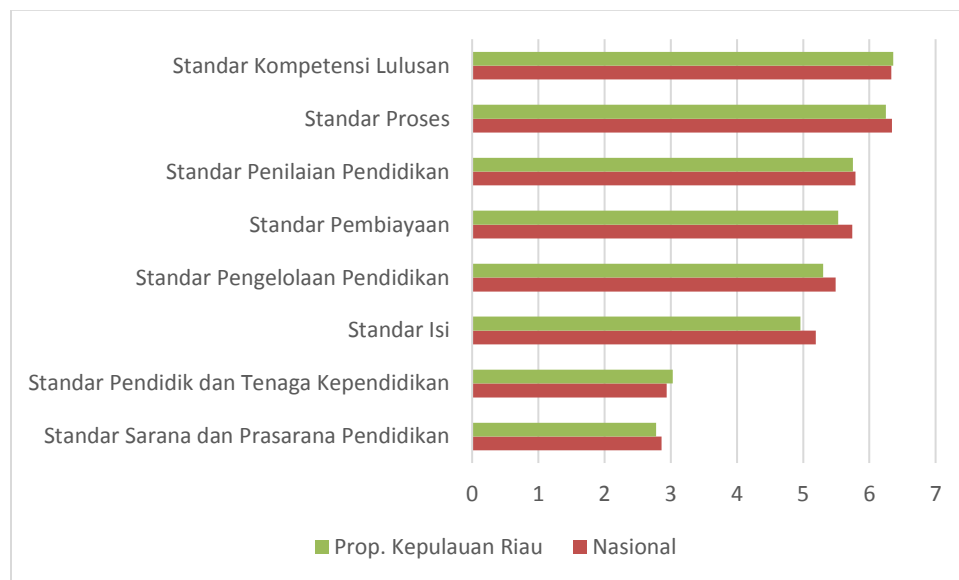
Capaian per standar jenjang Sekolah Menengah Kejuruan di Kepulauan Riau pada grafik berikut.

Capaian SNP per Standar Jenjang SMK Tahun 2017



Capaian SNP terbaik pada Standar Kompetensi dengan skor mutu sebesar 6.36. Sedangkan skor mutu terkecil terdapat pada Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan sebesar 2.78.

Capaian SNP per Standar Jenjang SMK Tahun 2017



Bila membandingkan capaian skor mutu Nasional dan skor mutu Kepulauan Riau, skor mutu jenjang SMK Kepulauan Riau lebih baik daripada skor mutu jenjang SMK Nasional

pada Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Sedangkan standar lainnya masih dibawah skor mutu Nasional.

Skor Capaian SNP per Standar Jenjang SMK Tahun 2017

Kepulauan Riau vs Nasional

Standar Nasional Pendidikan	Nasional	Kepulauan Riau	Kategori
Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	2.86	2.78	Menuju SNP 2
Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.94	3.03	Menuju SNP 2
Standar Isi	5.19	4.96	Menuju SNP 3
Standar Pengelolaan Pendidikan	5.49	5.30	Menuju SNP 4
Standar Pembiayaan	5.74	5.53	Menuju SNP 4
Standar Penilaian Pendidikan	5.79	5.75	Menuju SNP 4
Standar Proses	6.34	6.25	Menuju SNP 4
Standar Kompetensi Lulusan	6.33	6.36	Menuju SNP 4

Capaian realisasi persentase SMK yang terpetakan mutu pendidikannya karena ada dukungan dari kegiatan:

- Bimbingan Teknis (Penyegaran) Fasilitator Daerah Pemetaan Mutu 1 orang Pengawas SMK dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu bagi Pengawas Sekolah yang melibatkan 4 orang Pengawas SMK Kota Tanjungpinang, 2 orang Pengawas SMK Kabupaten Batam, 3 orang Pengawas SMK Kabupaten Karimun.
- Pendampingan Pengumpulan Data pada 9 SMK di Kota Tanjungpinang, 7 SMK di Kabupaten Bintan, 59 SMK di Kota Batam, 9 SMK di Kabupaten Karimun, 5 SMK di Kabupaten Lingga, 6 SMK di Kabupaten Natuna, 1 SMK di Kabupaten Kepulauan Anambas.
- Monitoring dan Evaluasi Pengumpulan Data pada 2 SMK di Kota Tanjungpinang, 2 SMK di Kabupaten Bintan, 8 SMK di Kota Batam, 3 SMK di Kabupaten Karimun, 2 SMK di Kabupaten Lingga, 2 SMK di Kabupaten Natuna, dan 2 SMK di Kabupaten Kepulauan Anambas.

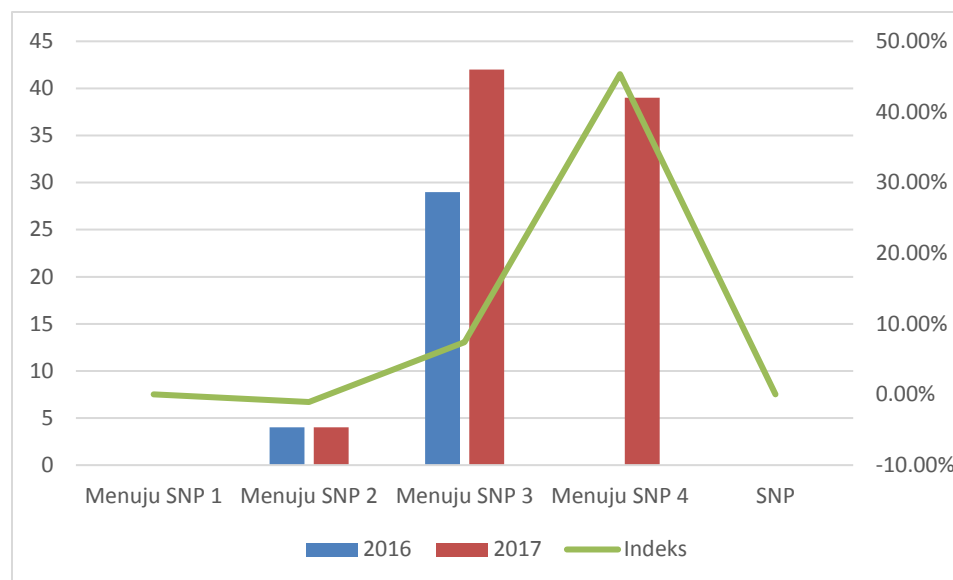
Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu bagi Pengawas Sekolah



8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya

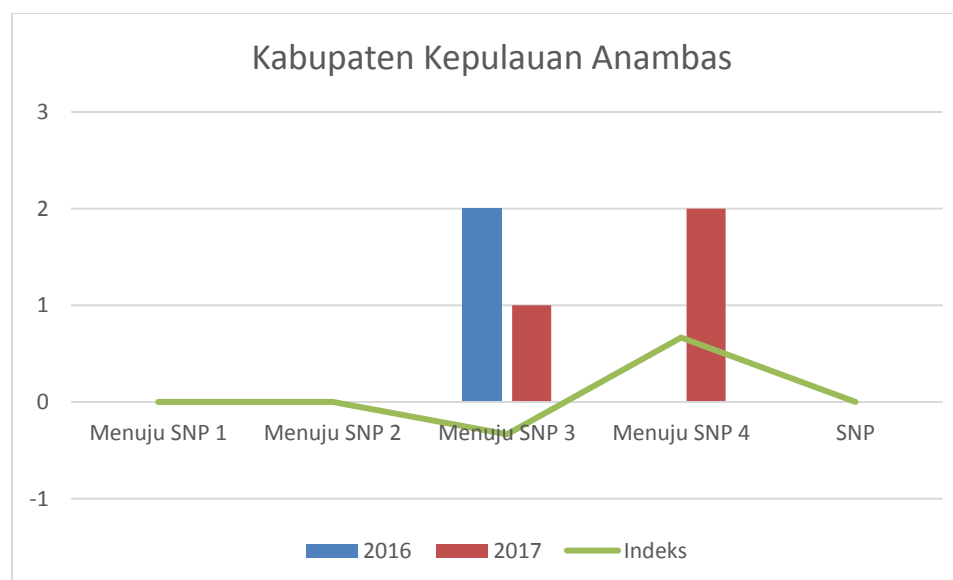
Indikator kinerja persentase SMK yang meningkat indeks efektifitasnya di Kepulauan Riau adalah 45.35% pada kategori Menuju SNP 4. Pada rapor mutu tahun 2016 belum ada satu SMK pun yang memenuhi kategori SNP, bahkan belum ada satu SMK pun yang memenuhi kategori Menuju SNP 4, persentase terbesar SMK yang ada di Kepulauan Riau termasuk kategori Menuju SNP 3. Sedangkan pada rapor mutu tahun 2017 menunjukkan penurunan jumlah SMK berkategori Menuju SNP 3 dan terjadi peningkatan yang signifikan di mana 45.35% SMK sudah memenuhi kategori Menuju SNP 4.

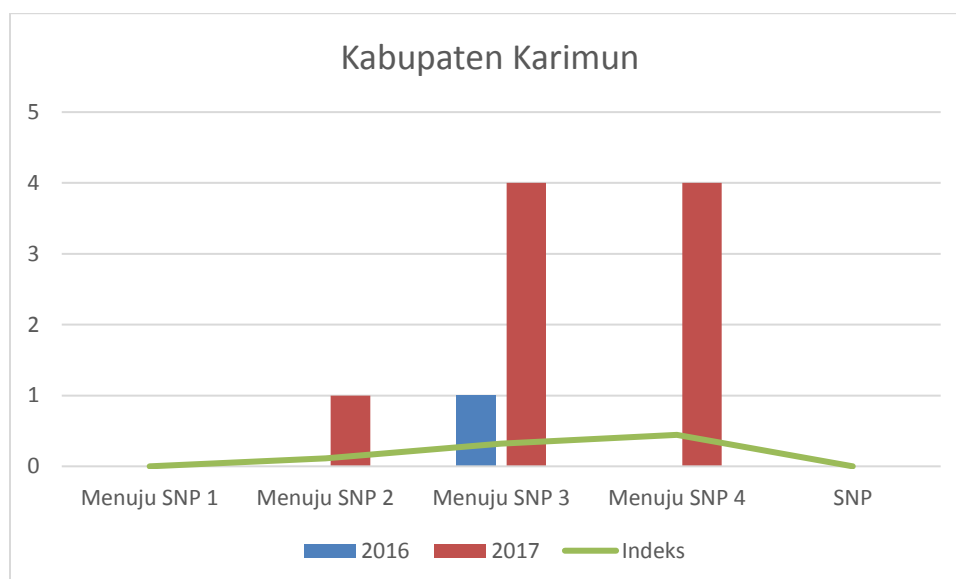
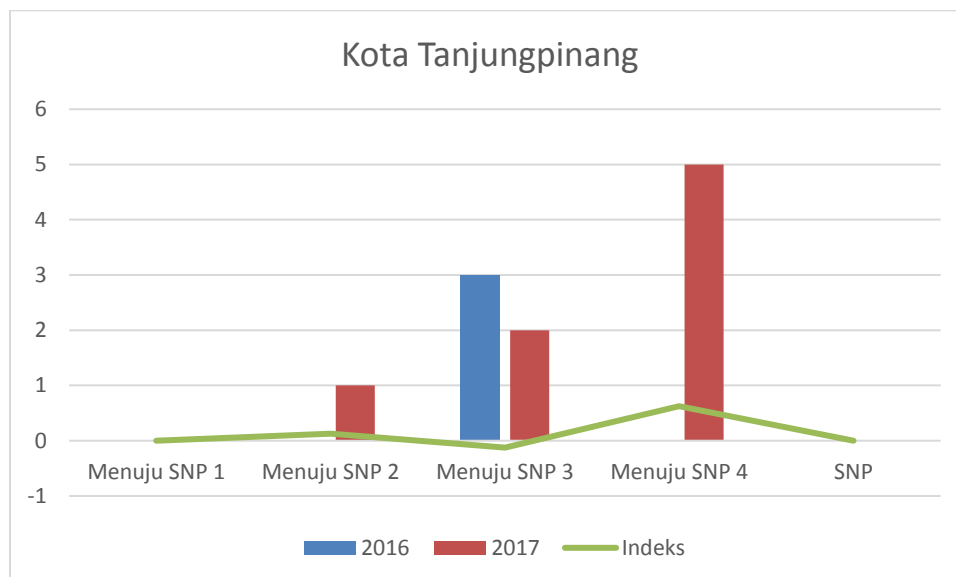
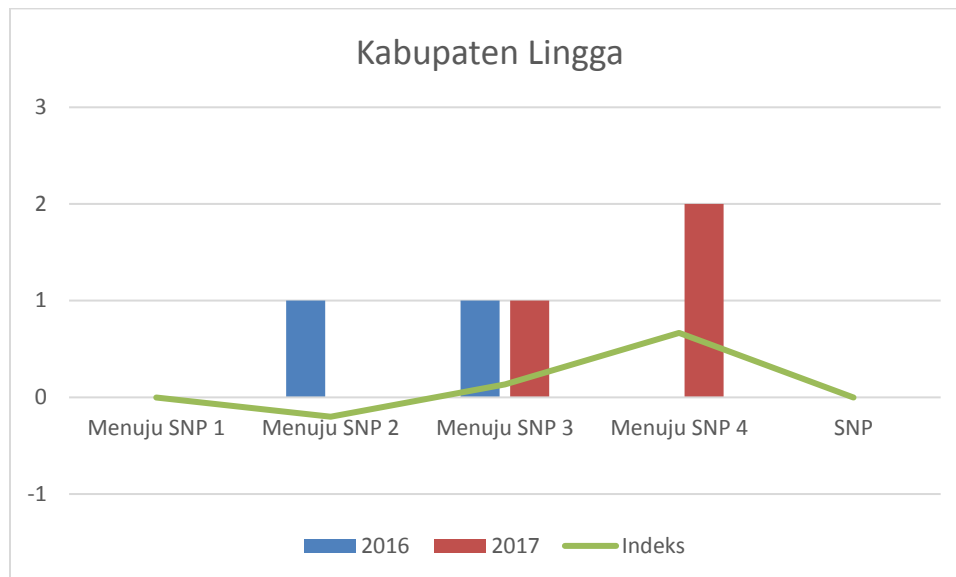
Indeks Efektifitas Jenjang SMK Kepulauan Riau

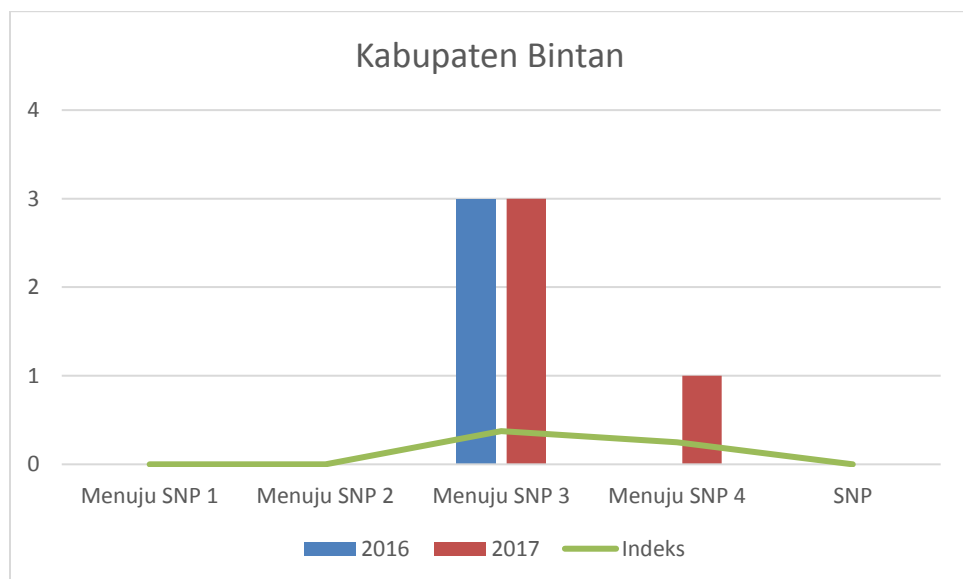
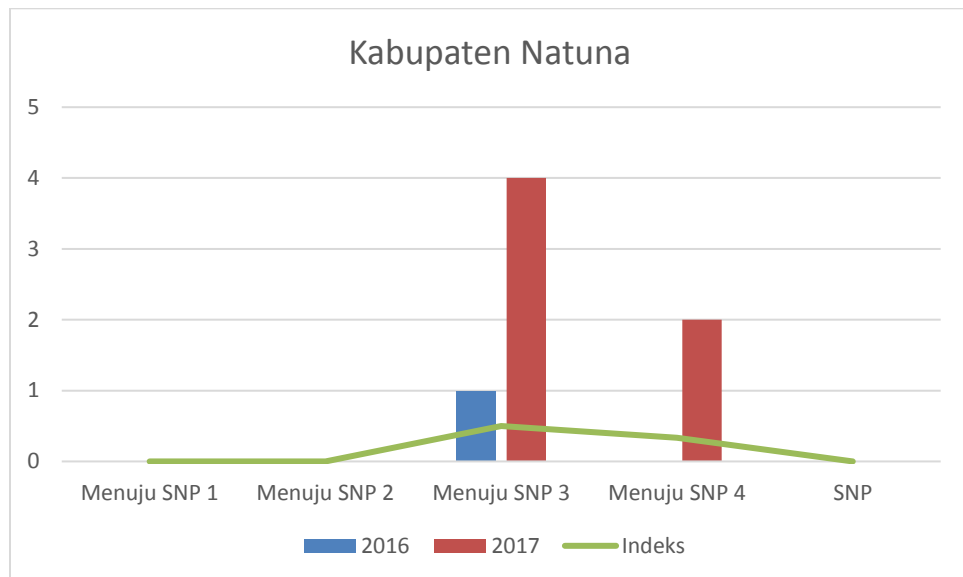
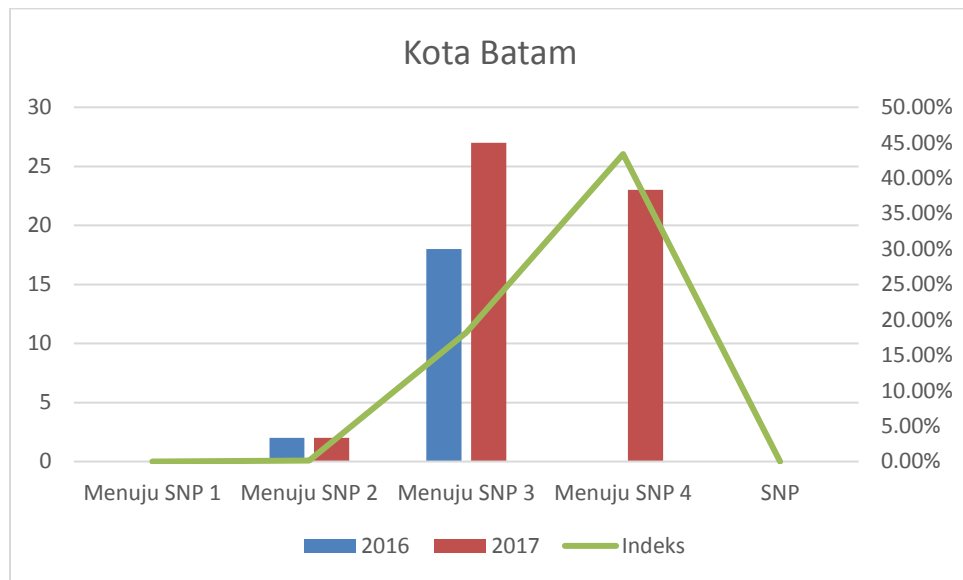


Peningkatan indeks efektifitas kategori Menuju SNP 4 terbesar pada Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga sebesar 66,67% diikuti oleh Kota Tanjungpinang sebesar 62,50%, Kabupaten Karimun 44,44%, Kota Batam 43,40%, Kabupaten Natuna 33,33%, dan terakhir Kabupaten Bintan 25%.

Indeks Efektifitas Jenjang SMK per Kabupaten/Kota







Secara keseluruhan, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan indikator kinerja

- 1) Persentase SD yang telah dipetakan mutunya,
- 2) Persentase SD yang meningkat indeks efektifitasnya,
- 3) Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya,
- 4) Persentase SMP yang meningkat indeks efektifitasnya,
- 5) Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya,
- 6) Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya,
- 7) Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya,
- 8) Persentase SMA yang meningkat indeks efektifitasnya,

adalah:

- 1) Jaringan internet untuk sekolah-sekolah yang berada di pulau-pulau terluar kurang mendukung
- 2) Kurang aktifnya pengawas sekolah
- 3) Jadwal pengisian PMP dan Dapodik bersamaan sehingga operator sekolah kesulitan
- 4) Sekolah merasa tidak ada pengaruhnya mengisi atau tidak PMP.

9. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Indikator kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 42.11% atau 377 sekolah dari 919 sekolah yang ada di Kepulauan Riau. Data tersebut menunjukkan LPMP Kepulauan Riau keberhasilan melaksanakan indikator kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 102.56% dibandingkan dengan target 40% pada perjanjian Kinerja Tahun 2017.

Pencapaian yang melebihi target ini didukung oleh program/kegiatan yaitu:

- a) Fasilitasi 8 SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Bimbingan Teknis Penyegaran Fasilitator Daerah SPMI untuk Pengembangan Sekolah Model, Workshop SPMI untuk Sekolah Model, Asistensi Bantuan Pemerintah Untuk Implementasi SPMI, Implementasi SPMI dengan Bantuan Pemerintah, Pendampingan SPMI, serta Monitoring dan Evaluasi. Dari 28 sekolah yang ditargetkan, tercapai 150% atau 42 sekolah yang difasilitasi melalui 8 SNP.

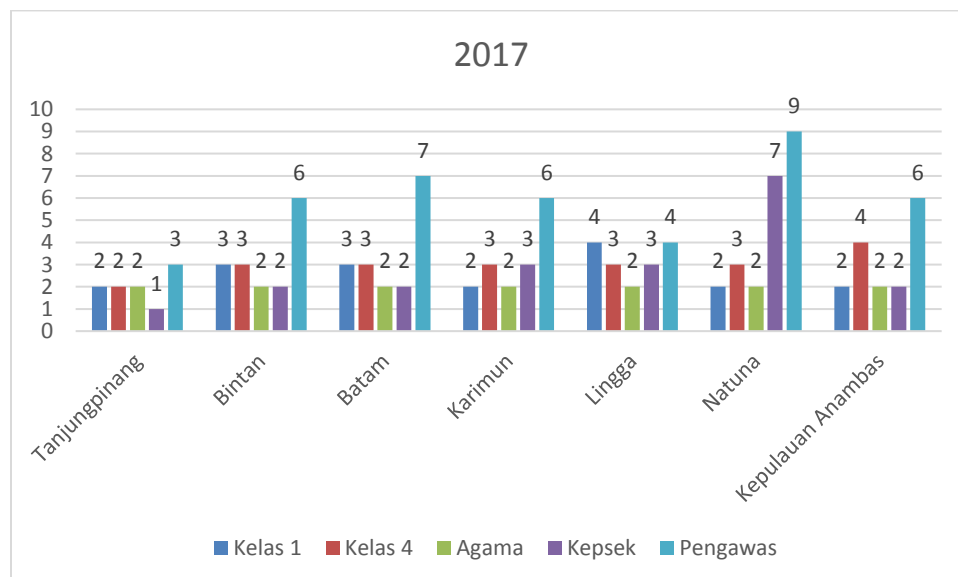
- b) Implementasi Kurikulum 2013 melalui Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota dan Guru Sasaran Kurikulum 2013, Rakor dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Bantuan Pemerintah Pendampingan K13, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah/Pendampingan K13.

Bimbingan Teknis Guru SD Sasaran Kurikulum 2013



Peserta Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota Tahun 2017 sebanyak 114 orang yang berasal dari guru kelas 1, guru kelas 2, guru Agama, Kepala Sekolah, dan Pengawas, seperti ditampilkan grafik berikut ini.

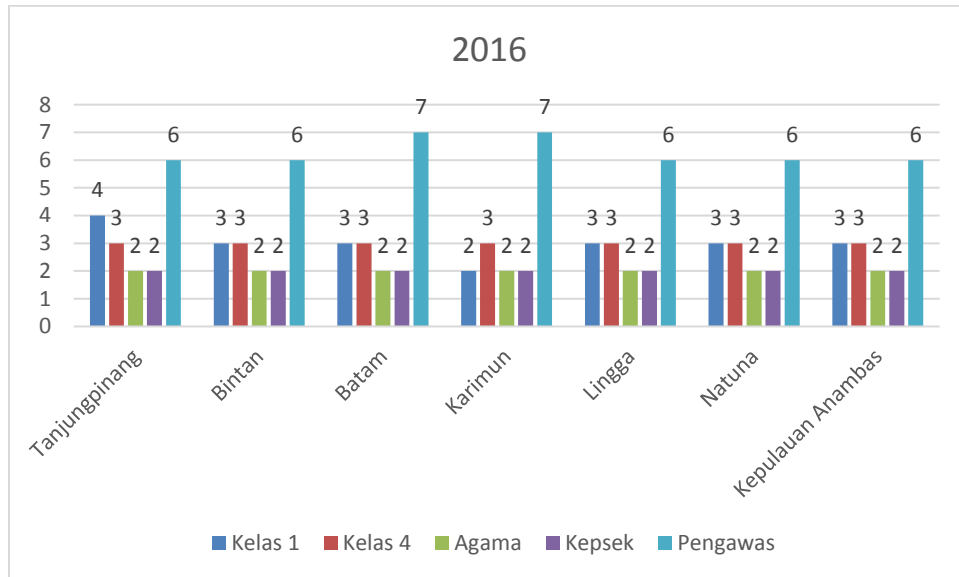
Peserta Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota SD Tahun 2017 per Kabupaten/Kota



114 orang tersebut di atas berasal dari peserta yang sudah dilatih pada tahun 2016.

Peserta Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota SD

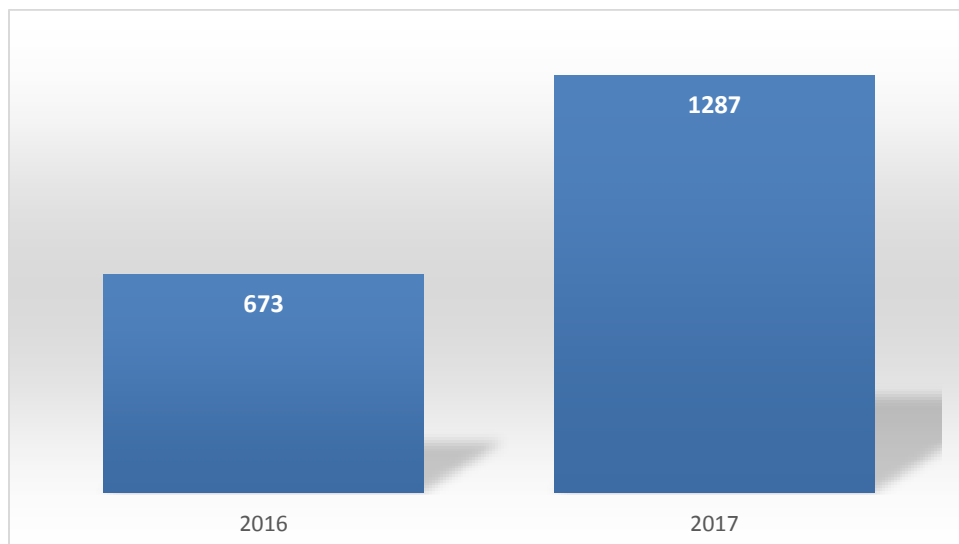
Tahun 2016 per Kabupaten/Kota



Jumlah peserta Bimbingan Teknis Guru SD Sasaran Kurikulum 2013 tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 91.23% dibandingkan jumlah peserta Bimbingan Teknis Guru SD Sasaran Kurikulum 2013 tahun 2016, ditampilkan pada grafik berikut ini.

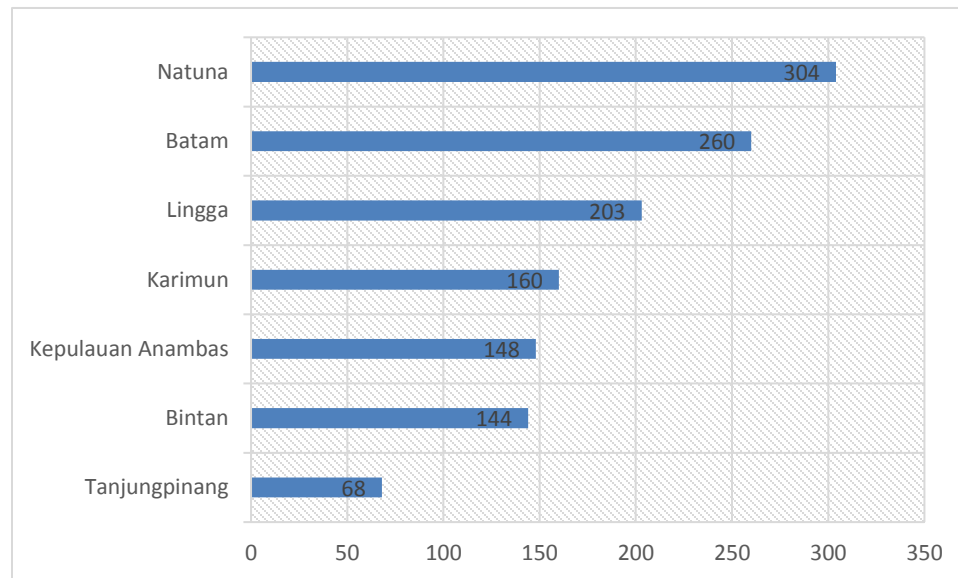
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Guru SD Sasaran Kurikulum 2013

Tahun 2016 vs 2017



Peserta Bimbingan Teknis Guru SD Kurikulum 2013 tahun 2017 terbesar berasal dari Kabupaten Natuna dan paling sedikit berasal dari Kota Tanjungpinang, detil berikut ini.

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Guru SD Sasaran Kurikulum 2013 per Kabupaten/Kota



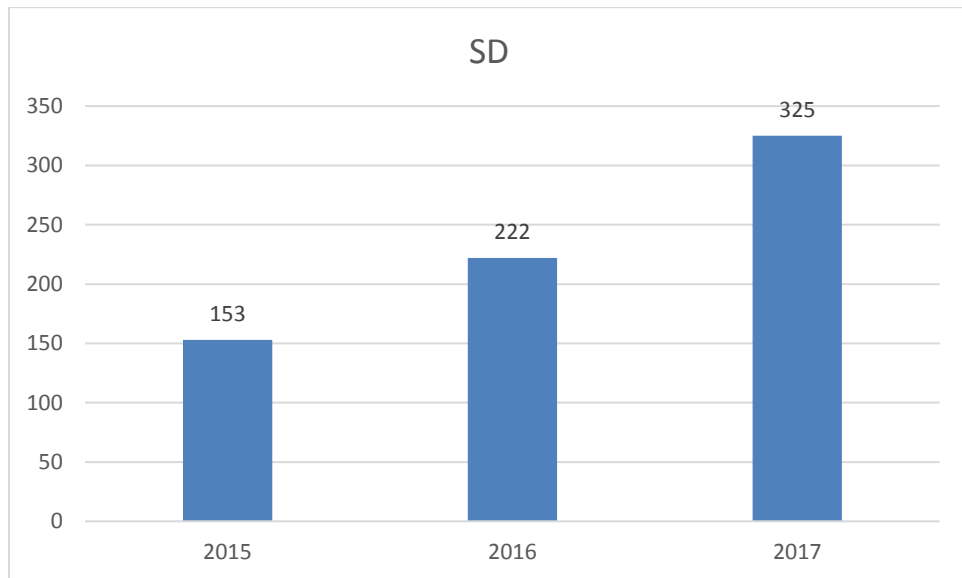
Bimbingan Teknis Guru SD Sasaran Kurikulum 2013 tahun 2017 dilaksanakan pada:

Kabupaten/Kota	SD	Tanggal Pelaksanaan
Tanjungpinang	17	18-22 Mei 2017
Bintan	36	18-22 Mei 2017
Batam	65	23-27 Mei 2017
Karimun	40	16-20 Juni 2017
Lingga	75	18-22 Mei 2017
Natuna	55	6-10 Juni 2017
Kepulauan Anambas	37	11- 15 Juni 2017
Total	325	

Hal ini menunjukkan tingkat ketercapaian Satuan Pendidikan (SD) yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Sehingga dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota Kurikulum 2013 SMK dan Bimbingan Teknis Guru SMK Sasaran Kurikulum 2013 beserta kegiatan rangkaian pelaksanaan Kurikulum 2013 maka LPMP

Kepulauan Riau sejak 2015 sampai dengan 2017 telah memfasilitasi implementasi Kurikulum 2013 di 700 SD, dengan detail per tahun sebagai berikut.

Jumlah Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2015 s.d. 2017

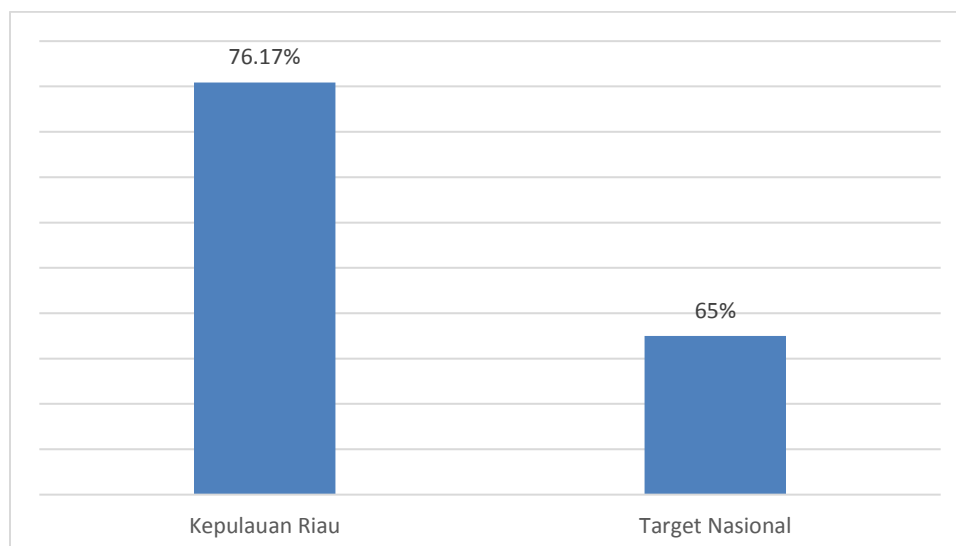


Bila dibandingkan dengan jumlah SD yang ada di Kepulauan Riau sebanyak 919 sekolah (<http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pengiriman/progres/1/310000> tgl unduh 7 Juli 2017) maka secara keseluruhan LPMP Kepulauan Riau telah memfasilitasi pelaksanaan Kurikulum 2013 di bawah target Nasional 65%, seperti terlihat pada grafik berikut ini.

Tingkat Capaian Jenjang SD Tahun 2015 s.d. 2017

LPMP Kepulauan Riau vs Target Nasional

(Pelaksana Kurikulum 2013)



- c) Layanan Kemitraan melalui Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sekolah Model dan Pengimbasannya, Supervisi Tugas dan Fungsi Melalui Pembinaan TPMPD, dan Diseminasi Hasil Sekolah Model dan Pengimbasannya dengan tingkat ketercapaian sebesar 35.71% atau hanya 10 sekolah dari 28 sekolah yang ditargetkan.

Walaupun tingkat ketercapaian indikator kinerja persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melebihi target yang telah ditentukan, namun dalam pelaksanaan program/kegiatan mengalami kendala disebabkan oleh:

- 1) Letak geografis kepulauan Riau yang terdiri dari pulau-pulau menjadi kesulitan tersendiri bagi LPMP dalam penentuan jadwal dan tempat kegiatan.
- 2) Terbatasnya sarana transportasi dan komunikasi khususnya di Kabupaten Kepulauan Anambas dan Natuna, menyebabkan sulitnya penyampaian informasi kegiatan.
- 3) Pemahaman antara instruktur yang berbeda-beda berdampak pada pemahaman terhadap Kurikulum 2013 yang berbeda-beda antar kelas.
- 4) Jarak waktu antara persiapan dan pelaksanaan bimbingan terlalu pendek.
- 5) Tidak adanya penekanan tentang teknis pelaksanaan pendampingan tahun 2017 terhadap instruktur kabupaten/kota.

Langkah antisipasi menghadapi kendala tersebut di atas agar pelaksanaan program/kegiatan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 lebih optimal di masa depan, yaitu:

- 1) Perlu diberikan penekanan dan penyamaan persepsi terhadap instruktur kabupaten/kota sebelum kegiatan dilaksanakan.
- 2) Waktu persiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis sebaiknya tidak terlalu pendek agar panitia dapat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dengan baik sehingga panitia (LPMP Kepulauan Riau) dapat memberikan layanan yang maksimal dan prima.

10. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP mencapai 45.67% atau sebanyak 153 sekolah dari 335 sekolah. Hal ini menunjukkan terdapat keberhasilan LPMP Kepulauan Riau dalam melaksanakan indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar

114.18% dibandingkan dengan target 40% pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Pencapaian yang melebihi target ini didukung oleh program/kegiatan sebagai berikut:

- a) Fasilitasi 8 SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Bimbingan Teknis Penyegaran Fasilitator Daerah SPMI untuk Pengembangan Sekolah Model, Workshop SPMI untuk Sekolah Model, Asistensi Bantuan Pemerintah Untuk Implementasi SPMI, Implementasi SPMI dengan Bantuan Pemerintah, Pendampingan SPMI, serta Monitoring dan Evaluasi. Dari 28 sekolah yang ditargetkan, tercapai 100% atau 28 sekolah yang difasilitasi melalui 8 SNP.
- b) Implementasi Kurikulum 2013 melalui Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota dan Guru Sasaran Kurikulum 2013, Rakor dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Bantuan Pemerintah Pendampingan K13, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah/Pendampingan K13.

Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota SMP Kurikulum 2013

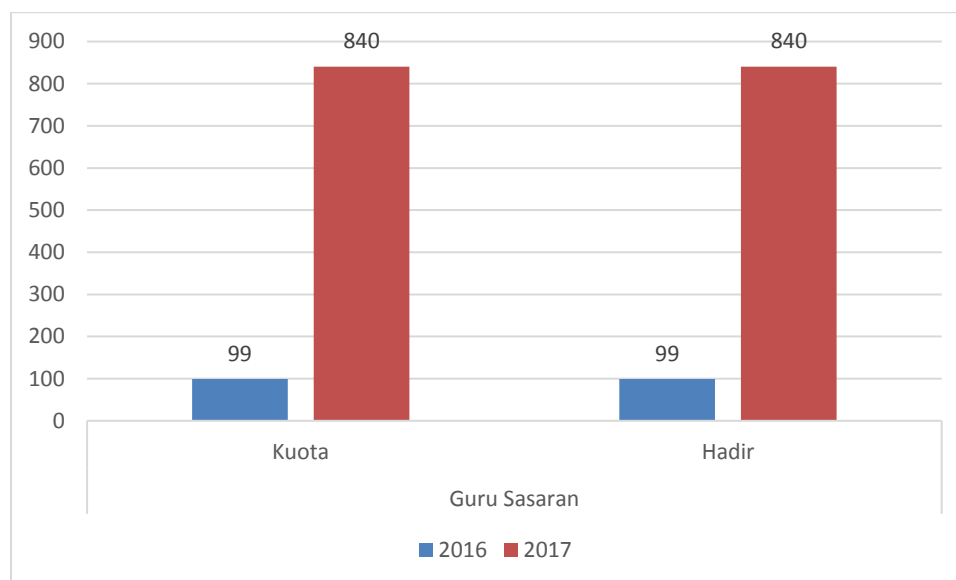


Peserta Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SMP Tahun 2017 per Kabupaten/Kota

Jenjang	Instruktur Kabupaten/kota			%	Guru Sasaran			%
	Kuota	Hadir	Tidak Hadir		Kuota	Hadir	Tidak Hadir	
Tanjungpinang	15	15	0	100%	70	70	0	100%
Bintan	15	15	0	100%	105	105	0	100%
Batam	120	120	0	100%	168	168	0	100%
Karimun	15	15	0	100%	189	189	0	100%
Lingga	15	15	0	100%	140	140	0	100%
Natuna	15	15	0	100%	77	77	0	100%
Kepulauan Anambas	15	15	0	100%	91	91	0	100%
Kepulauan Riau	210	210	0	100%	840	840	0	100%

Peserta Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Tahun 2017 terpenuhi sebesar 100% dan terjadi peningkatan jumlah peserta Bimbingan Teknis Guru Sasaran SMP Tahun 2017 sebesar 748.48% dibandingkan jumlah peserta Bimbingan Teknis Guru Sasaran SMP Tahun 2016. Jumlah peserta Bimbingan Teknis Guru Sasaran Tahun 2016 sebanyak 99 orang sedangkan jumlah peserta Bimbingan Teknis Guru Sasaran SMP Tahun 2017 sebanyak 840 orang, tergambar pada grafik di bawah ini.

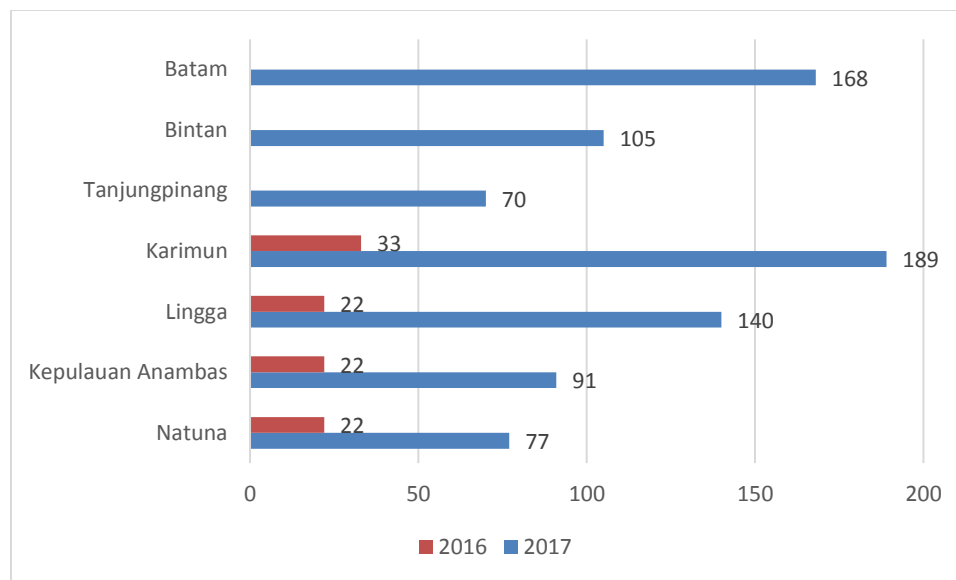
Peserta Bimbingan Teknis Guru Sasaran SMP Kurikulum 2013 Tahun 2017 vs 2016



Peningkatan jumlah peserta Bimbingan Teknis Guru Sasaran SMP Kurikulum 2013 tahun 2017 meningkat pada beberapa Kabupaten/Kota. Peningkatan jumlah peserta terbesar pada Kabupaten Lingga sebesar 536.36%. Dengan jumlah peserta terbesar pada Kabupaten Karimun sebanyak 189 orang.

Peserta Bimbingan Teknis Guru Sasaran SMP Kurikulum 2013

Tahun 2017 vs 2016 per Kabupaten/Kota



840 peserta Bimbingan Teknisi Guru SMP Sasaran Kurikulum 2013 Tahun 2017 berasal dari 113 sekolah yang berasal dari 7 Kabupaten/Kota di Kepulauan Riau dengan detail sebagai berikut.

Jumlah SMP Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017

Kabupaten/Kota	SMP
Tanjungpinang	9
Bintan	14
Batam	23
Karimun	26
Lingga	19
Natuna	10
Kepulauan Anambas	12
Kepulauan Riau	113

Dari tabel di atas menunjukkan tingkat ketercapaian Satuan Pendidikan (SMP) yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebesar 100% atau 113 sekolah dari 113 sekolah target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

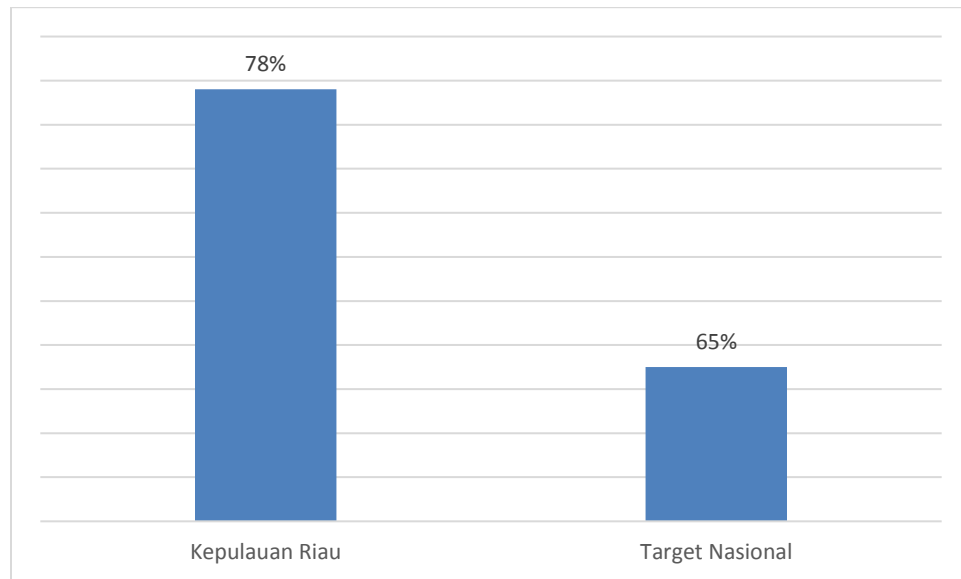
Dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota Kurikulum 2013 SMP dan Bimbingan Teknis Guru Sasaran Kurikulum 2013 beserta kegiatan rangkaian pelaksanaan Kurikulum 2013 maka LPMP Kepulauan Riau sejak 2015 sampai dengan 2017 telah memfasilitasi implementasi Kurikulum 2013 di 260 SMP yang ada di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dengan detail per tahun sebagai berikut:

Jumlah SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013 s.d. 2017

Tahun	SMP
2015	69
2016	78
2017	113
Total	260

Bila dibandingkan dengan jumlah SMP yang ada di Kepulauan Riau sebanyak 335 sekolah (<http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pengiriman/progres/1/310000> tgl unduh 7 Juli 2017) maka secara keseluruhan LPMP Kepulauan Riau telah memfasilitasi pelaksanaan Kurikulum 2013 melebihi target Nasional sebesar 65%, ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Tingkat Capaian Jenjang SMP LPMP Kepulauan Riau vs Target Nasional (Pelaksana Kurikulum 2013)



Selain itu, LPMP Kepulauan Riau telah memfasilitasi dalam bentuk Bimbingan Teknis Guru Sasaran Kurikulum 2013 terhadap 134 Guru yang berasal dari 12 SMP di Kota Batam yang melaksanakan Kurikulum 2013 secara mandiri. Namun sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 tersebut belum mendapatkan Bantuan Pemerintah Pendampingan K13, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah/Pendampingan K13.

- c) Layanan Kemitraan melalui Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sekolah Model dan Pengimbasannya, Supervisi Tugas dan Fungsi Melalui Pembinaan TPMPD, dan Diseminasi Hasil Sekolah Model dan Pengimbasannya dengan tingkat ketercapaian sebesar 52.17% atau hanya 12 sekolah dari 23 sekolah yang ditargetkan.

Walaupun tingkat ketercapaian indikator kinerja persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melebihi target yang telah ditentukan, namun dalam pelaksanaan program/kegiatan mengalami kendala disebabkan oleh:

- a) Masih kurang kerjasama antara LPMP Kepulauan Riau dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terutama dalam hal pendataan dan pemanggilan peserta pelatihan.
- b) Masih rendahnya penilaian pada aspek Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan dan Layanan Menu Makanan.

- c) Jadwal Pelaksanaan yang mendekati Hari Raya Idul Fitri (24 Juni 2017) sehingga beberapa peserta yang harus digantikan oleh guru lain (mata pelajaran sama).

Jadwal Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SMP Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Tanggal Pelaksanaan
Tanjungpinang	13 s.d 17 Mei 2017
Bintan	18 s.d 22 Mei 2017
Batam	23 s.d 27 Mei 2017
Karimun	16 s.d 20 Juni 2017
Lingga	18 s.d 22 Mei 2017
Natuna	6 s.d 10 Juni 2017
Kepulauan Anambas	11 s.d 15 Juni 2017

- d) Tidak adanya *softcopy* untuk mata pelajaran pendidikan agama yang di sediakan dari Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga khusus mata pelajaran Pendidikan Agama menggunakan buku lama yang ada di sekolah masing-masing.

Hambatan/kendala yang telah dihadapi pada pelaksanaan Kurikulum 2013 tahun 2017 dapat diantisipasi dengan tindakan preventif berikut:

- Meningkatkan kerjasama yang lebih intensif antara LPMP Kepulauan Riau dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terutama dalam hal pendataan dan pemanggilan peserta pelatihan.
- Perbaikan dan peningkatan terhadap penyediaan sarana dan prasarana berupa Tempat Ibadah dan layanan menu makanan yang lebih variatif dan memenuhi gizi.
- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 mempertimbangkan tanggal-tanggal hari libur Nasional sehingga sasaran yang dituju sesuai dan tepat sasaran (tanpa adanya perubahan peserta yang terlibat dan hadir).
- Administrasi kegiatan berupa ketersediaan panduan/pedoman kegiatan yang berupa *hard file*. Hal ini untuk memudahkan peserta dalam melihat struktur program dan jadwal kegiatan yang ada.

Tindakan preventif tersebut di atas diharapkan pelaksanaan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 dapat berjalan lebih baik lagi di masa yang akan datang.

11. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

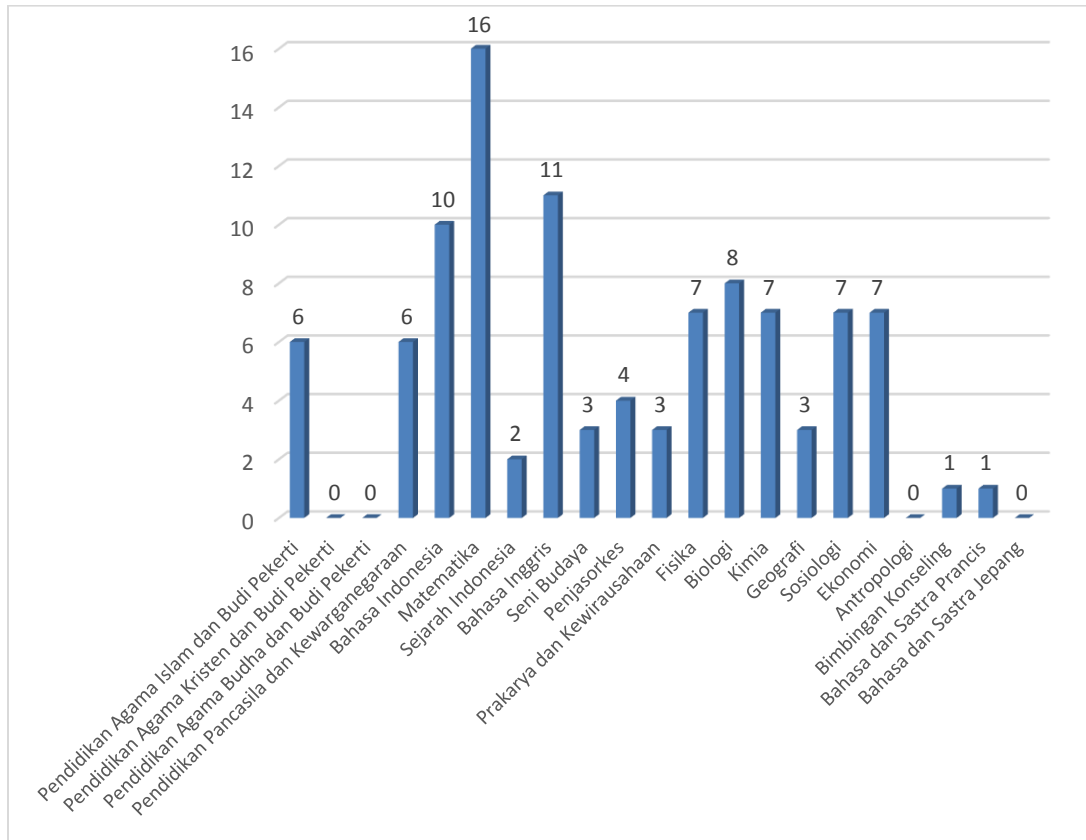
Indikator kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebanyak 65 sekolah dari 126 sekolah yang berada di Kepulauan Riau atau sebesar 51.59%. Hal ini menunjukkan terdapat keberhasilan LPMP Kepulauan Riau dalam melaksanakan indikator kinerja persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP sebesar 128.97% dibandingkan dengan target 40% pada Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Keberhasilan capaian ini didukung oleh program/kegiatan yaitu:

- a) Fasilitasi 8 SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Bimbingan Teknis Penyegaran Fasilitator Daerah SPMI untuk Pengembangan Sekolah Model, Workshop SPMI untuk Sekolah Model, Asistensi Bantuan Pemerintah Untuk Implementasi SPMI, Implementasi SPMI dengan Bantuan Pemerintah, Pendampingan SPMI, serta Monitoring dan Evaluasi. Dari 28 sekolah yang ditargetkan, tercapai 22 sekolah yang difasilitasi melalui 8 SNP atau sebesar 78.57%.
- b) Implementasi Kurikulum 2013 melalui Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota melibatkan 102 orang dan Guru Sasaran Kurikulum 2013 sebanyak 400 orang dengan melibatkan guru-guru dari 17 mata pelajaran (Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Sejarah Indonesia, Bahasa Inggris, Seni Budaya, Penjasorkes, Prakarya dan Kewirausahaan, Fisika, Biologi, Kimia, Geografi, Sosiologi, Ekonomi, Bimbingan Konseling, Bahasa dan Sastra Perancis), yang berasal dari 42 sekolah.

Format Bimbingan Teknis Instruktur Kabupaten/Kota Kurikulum 2013 tahun 2017 dalam bentuk penyegaran sehingga Instruktur yang dilibatkan kembali adalah peserta Pelatihan Kurikulum 2013 Tahun 2016, baik Instruktur Kabupaten/Kota maupun Guru Sasaran.

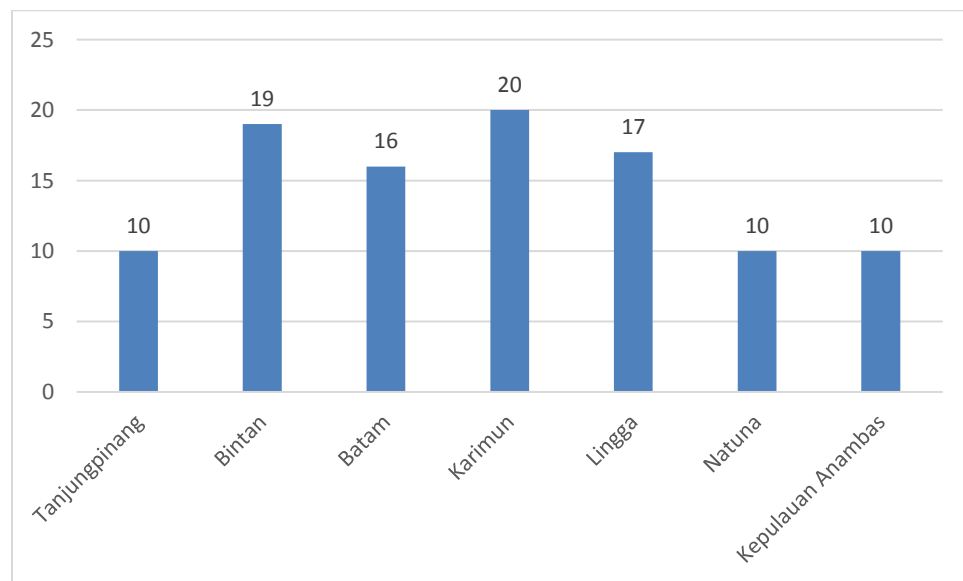
Peserta Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota SMA Kurikulum 2013

Tahun 2017 per Mata Pelajaran



Peserta Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota SMA Kurikulum 2013

Tahun 2017 per Kabupaten/Kota

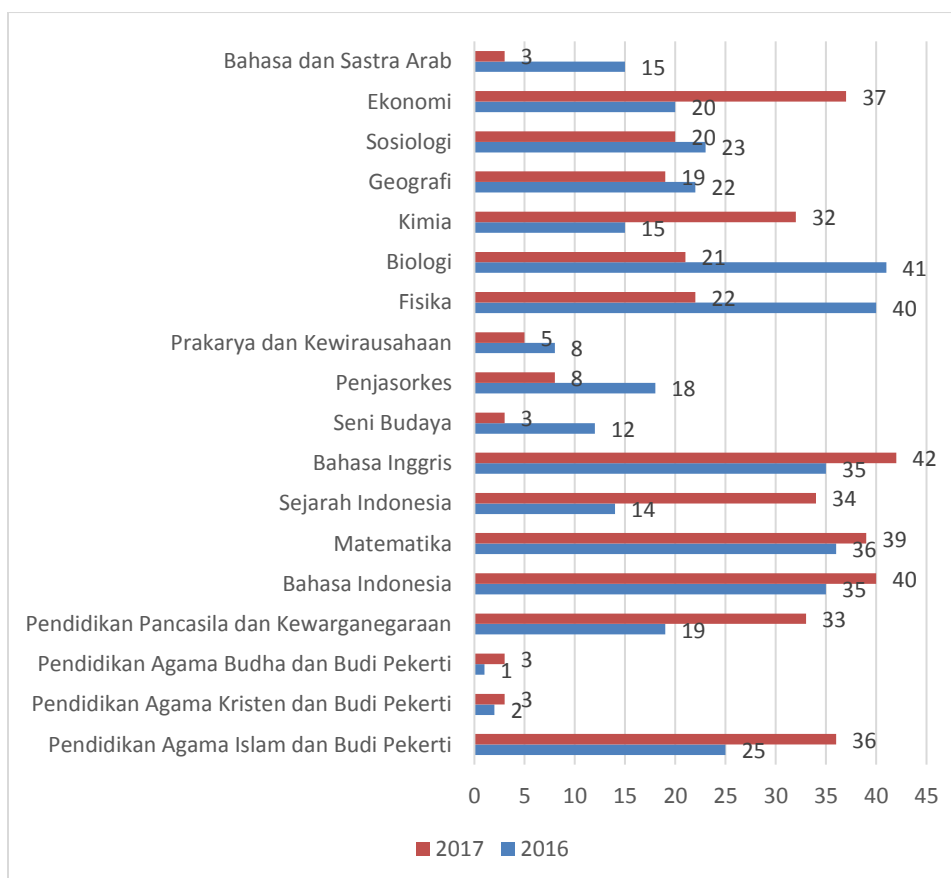


Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota SMA Kurikulum 2013

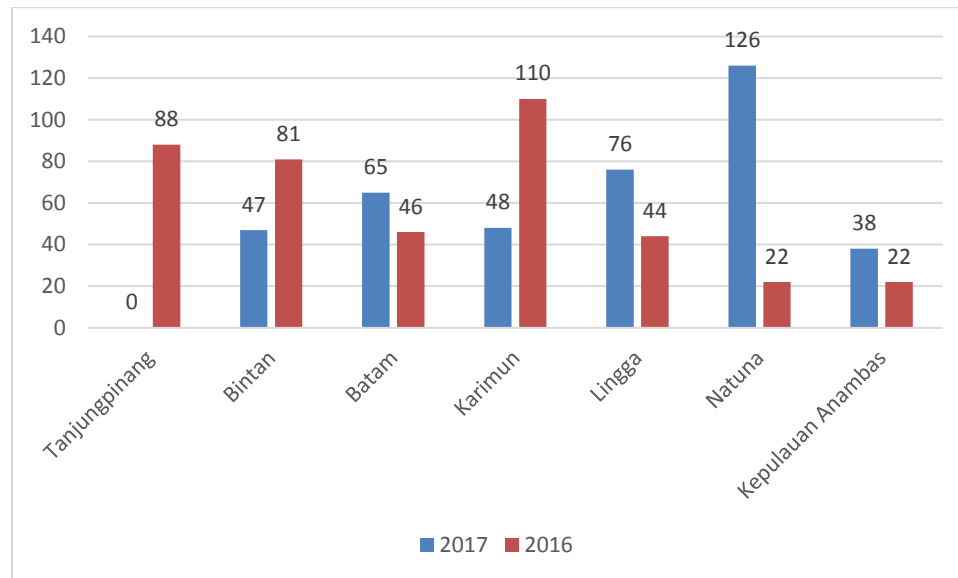


Peserta Bimbingan Teknis Guru Sasaran SMA Kurikulum 2013

Tahun 2017 vs 2016 per Mata Pelajaran



**Peserta Bimbingan Teknis Guru Sasaran SMA Kurikulum 2013
Tahun 2017 vs 2016 per Kabupaten/Kota**



Bimbingan Teknis Guru Sasaran SMA Kurikulum 2013 Tahun 2017 dilaksanakan hanya pada 6 Kabupaten/Kota sesuai kuota yang diberikan dengan periode pelaksanaan sebagai berikut:

Jumlah SMA Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017

Kabupaten/Kota	SMK	Tanggal Pelaksanaan
Bintan	5	8 s.d 12 Mei 2017
Batam	7	16 s.d 20 Juni 2017
Karimun	5	13 s.d 17 Mei 2017
Lingga	8	13 s.d 17 Mei 2017
Natuna	13	6 s.d 10 Juni 2017
Kepulauan Anambas	4	11 s.d 15 Juni 2017
Total	42	

Dari tabel di atas menunjukkan tingkat ketercapaian Satuan Pendidikan (SMA) yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

LPMP Kepulauan Riau juga telah memfasilitasi dalam bentuk Bimbingan Teknis Guru Sasaran Kurikulum 2013 terhadap 48 Guru yang berasal dari 13 SMA di Kota Batam yang melaksanakan Kurikulum 2013 secara mandiri. Namun sekolah yang melaksanakan

Kurikulum 2013 tersebut belum mendapatkan Bantuan Pemerintah Pendampingan K13, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah/Pendampingan K13.

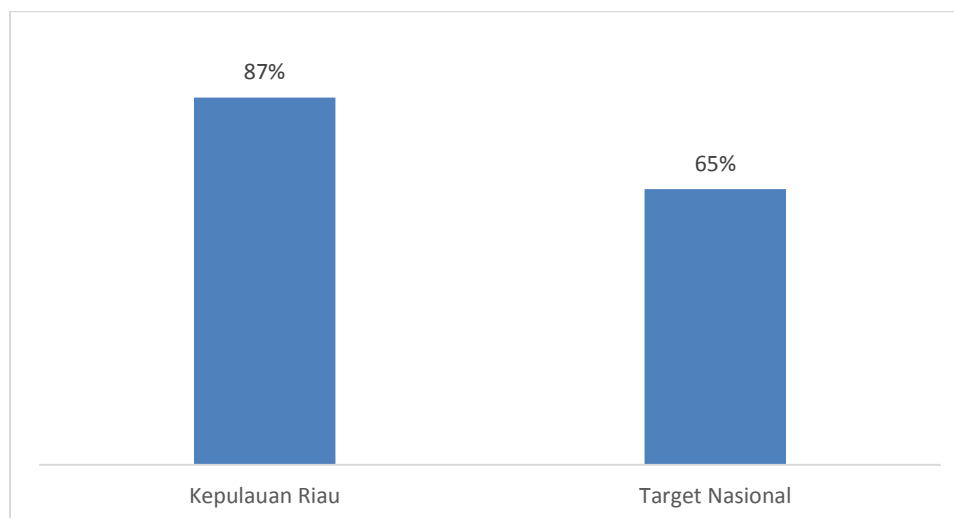
Dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota Kurikulum 2013 SMA dan Bimbingan Teknis Guru SMA Sasaran Kurikulum 2013 beserta kegiatan rangkaian pelaksanaan Kurikulum 2013 maka LPMP Kepulauan Riau sejak 2015 sampai dengan 2017 telah memfasilitasi implementasi Kurikulum 2013 di 109 SMA yang ada di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dengan detail per tahun sebagai berikut:

Jumlah Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2015 s.d. 2017

Tahun	SMA
2015	25
2016	17
2017	42
Total	109

Bila dibandingkan dengan jumlah SMA yang ada di Kepulauan Riau sebanyak 126 sekolah (<http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pengiriman/progres/1/310000> tgl unduh 7 Juli 2017) maka secara keseluruhan LPMP Kepulauan Riau telah memfasilitasi pelaksanaan Kurikulum 2013 melebihi target Nasional sebesar 65%, ditampilkan pada grafik di bawah ini.

Tingkat Capaian Jenjang SMA LPMP Kepulauan Riau vs Target Nasional (Pelaksana Kurikulum 2013)



Peserta Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Tahun 2017 SMA pada beberapa mata pelajaran serta pada Kota Tanjungpinang tidak ada. Hal ini terkendala oleh:

- 1) Keterbatasan jumlah guru yang mengajar pada mata pelajaran tersebut. Kondisi guru-guru di Kepulauan Riau terutama pada Kabupaten yang berada di perairan terluar, mereka mengajar 2-3 mata pelajaran selain mata pelajaran yang diampunya.
- 2) Kuota yang diberikan. Pada beberapa Kabupate/Kota lebih sedikit dari jumlah mata pelajaran yang ada di jenjang SMA (20 mata pelajaran).
- 3) Keadaan geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari banyak pulau dan biaya transportasi yang mahal menyebabkan ada beberapa orang peserta bimtek yang diundang tidak hadir di kegiatan karena tidak dianggarkan transportasi dan penginapan bagi peserta dari luar pulau.

Langkah antisipasi menghadapi kendala tersebut di atas agar pelaksanaan program/kegiatan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 lebih optimal di masa depan, yaitu:

- 1) Menjalin kerja sama dan memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah agar terjadi pemerataan guru-guru sehingga daerah-daerah pelosok terakomodir dalam melaksanakan Pendidikan yang bermutu dengan tersedianya guru-guru mata pelajaran tertentu.
- 2) Mengkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat agar kuota yang diberikan sesuai dengan mata pelajaran yang ada pada jenjang SMA serta memberikan masukan agar terjadi pemerataan guru sampai ke daerah tertinggal, terluar, dan terdepan.
- 3) Menyiapkan anggaran untuk memfasilitasi bantuan penginapan khusus peserta dari luar pulau. Karena pada beberapa pulau harus menempuh perjalanan laut 2 jam. Bahkan transportasi laut tidak selalu ada setiap hari walaupun berada dalam satu Kabupaten/Kota.

12. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP

Indikator kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP mencapai 57.14% atau sebanyak 56 sekolah dari 98 sekolah yang ada di Kepulauan Riau. Hal ini menunjukkan capaian sebesar 142.86% dikarenakan capaian melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 40%. Tingkat ketercapaian indikator kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melebihi target karena adanya dukungan program/kegiatan:

- d) Fasilitasi 8 SNP melalui Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui Bimbingan Teknis Penyegaran Fasilitator Daerah SPMI untuk Pengembangan Sekolah Model, Workshop SPMI untuk Sekolah Model, Asistensi Bantuan Pemerintah Untuk Implementasi SPMI, Implementasi SPMI dengan Bantuan Pemerintah, Pendampingan SPMI, serta Monitoring dan Evaluasi. Dari 28 sekolah yang ditargetkan, tercapai 20 sekolah yang difasilitasi melalui 8 SNP atau sebesar 71.43%.
- e) Implementasi Kurikulum 2013 melalui Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota dan Guru Sasaran Kurikulum 2013, Rakor dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Bantuan Pemerintah Pendampingan K13, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah/Pendampingan K13.

Peserta Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 Tahun 2017 SMK per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Instruktur Kabupaten/kota			%	Guru Sasaran			%
	Kuota	Hadir	Tidak Hadir		Kuota	Hadir	Tidak Hadir	
Tanjungpinang	22	22	0	100	11	11	0	100
Bintan	12	12	0	100	54	54	0	100
Batam	10	10	0	100	165	165	0	100
Karimun	12	12	0	100	54	54	0	100
Lingga	12	12	0	100	33	33	0	100
Natuna	12	12	0	100	21	21	0	100
Kepulauan Anambas	10	10	0	100	22	22	0	100
Kepulauan Riau	90	90	0	100	360	360	0	100

Terjadi peningkatan peserta Bimbingan Teknis Instruktur Kab/Kota SMK pada tahun 2017 sebesar 26.76% dibandingkan tahun 2016. Dan terdapat peningkatan peserta Bimbingan Teknis Guru Sasaran SMK pada tahun 2017 sebesar 83.67% dibandingkan tahun 2016. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Peserta Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SMK Tahun 2016 vs 2017

Tahun	Instruktur Kabupaten/kota			%	Guru Sasaran			%
	Kuota	Hadir	Tidak Hadir		Kuota	Hadir	Tidak Hadir	
2016	72	71	1	98	196	196	0	100
2017	90	90	0	100	360	360	0	100

360 Guru Sasaran tersebut di atas merupakan guru-guru mata pelajaran Agama, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, PPKn, Sejarah, PJOK, Kewirausahaan, Matematika, dan Seni Budaya, serta mata pelajaran bidang/kelompok C (C1, C2/C3) yang berasal dari 33 Sekolah yang ada di Kepulauan Riau dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut.

Jumlah SMK Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2017

Kabupaten/Kota	SMK	Tanggal Pelaksanaan
Tanjungpinang	1	8 s.d. 12 Mei 2017
Bintan	6	8 s.d. 12 Mei 2017
Batam	15	16 s.d. 20 Juni 2017
Karimun	5	13 s.d. 17 Mei 2017
Lingga	3	13 s.d. 17 Mei 2017
Natuna	2	6 s.d. 10 Juni 2017
Kepulauan Anambas	2	11 s.d. 15 Juni 2017
Total	33	

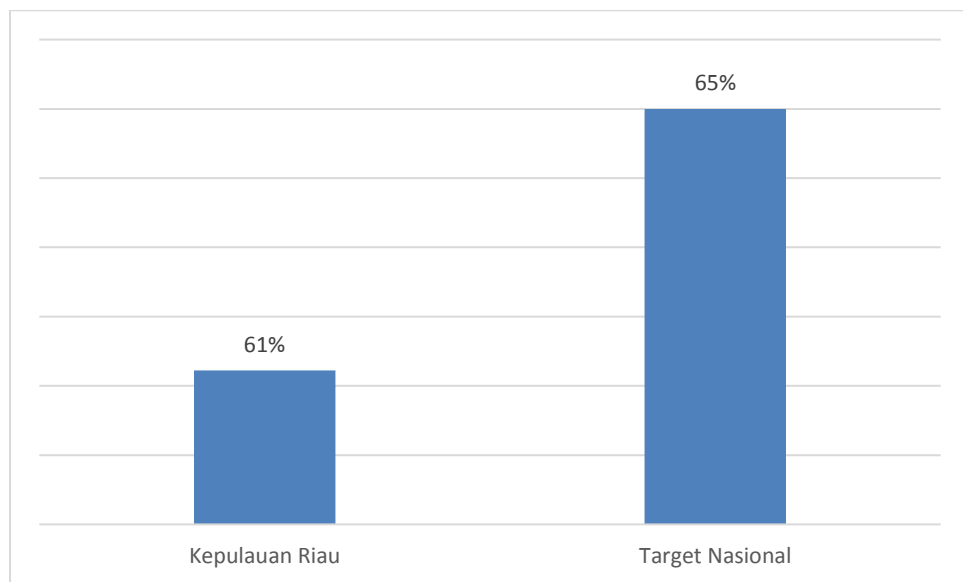
Dari tabel di atas menunjukkan tingkat ketercapaian Satuan Pendidikan (SMK) yang melaksanakan Kurikulum 2013 sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017. Sehingga dengan dilaksanakannya Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota Kurikulum 2013 SMK dan Bimbingan Teknis Guru SMK Sasaran Kurikulum 2013 beserta kegiatan rangkaian pelaksanaan Kurikulum 2013 maka LPMP Kepulauan Riau sejak 2015 sampai dengan 2017 telah memfasilitasi implementasi Kurikulum 2013 di 60 SMK yang ada di 7 Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dengan detail per tahun sebagai berikut:

Jumlah Sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 s.d. 2017

Tahun	SMK
2015	10
2016	17
2017	33
Total	60

Bila dibandingkan dengan jumlah SMK yang ada di Kepulauan Riau sebanyak 98 sekolah (<http://pmp.dikdasmen.kemdikbud.go.id/pengiriman/progres/1/310000> tgl unduh 7 Juli 2017) maka secara keseluruhan LPMP Kepulauan Riau telah memfasilitasi pelaksanaan Kurikulum 2013 di bawah target Nasional 65%, seperti terlihat pada grafik berikut ini.

**Tingkat Capaian Jenjang SMK LPMP Kepulauan Riau vs Target Nasional
(Pelaksana Kurikulum 2013)**



LPMP Kepulauan Riau juga telah memfasilitasi dalam bentuk Bimbingan Teknis Guru Sasaran Kurikulum 2013 terhadap 62 Guru yang berasal dari 18 SMK di Kota Batam yang melaksanakan Kurikulum 2013 secara mandiri. Namun sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013 tersebut belum mendapatkan Bantuan Pemerintah Pendampingan K13, serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah/Pendampingan K13.

Bimbingan Teknis Guru Sasaran SMK Kurikulum 2013



- f) Layanan Kemitraan melalui Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sekolah Model dan Pengimbasannya, Supervisi Tugas dan Fungsi Melalui Pembinaan TPMPD, dan Diseminasi Hasil Sekolah Model dan Pengimbasannya dengan tingkat ketercapaian sebesar 37.50% atau hanya 3 sekolah dari 8 sekolah yang ditargetkan.

Walaupun tingkat ketercapaian indikator kinerja persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP melebihi target yang telah ditentukan, namun dalam pelaksanaan program/kegiatan mengalami kendala disebabkan oleh:

- 1) Peserta yang berasal dari beberapa sekolah di luar pulau tidak mendapat bantuan penginapan di lokasi kegiatan sehingga cukup memberatkan peserta yang berasal dari luar pulau.
- 2) Instruktur Kota Batam pada tahun 2016 tidak ada dikarenakan tidak ada kuota yang diberikan untuk melatih Instruktur Kota Batam pada tahun 2016 seperti tercantum pada tabel berikut ini.

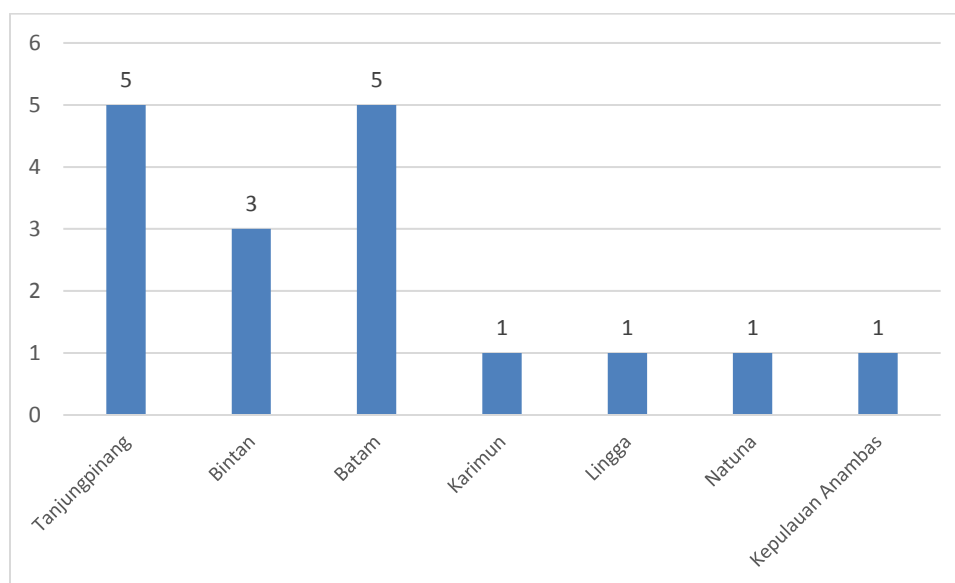
Peserta Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota SMK Kurikulum 2013

Tahun 2016 per Mata Pelajaran per Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	AGAMA	B.INDO	B.INGGRIS	PPKN	SEJARAH	PJOK	KWU	MTK	SENI BUDAYA	C1	C2/C3	Total
Tanjungpinang	2	2	2	1	1	2	2	2	2	4	2	22
Bintan	1	1	1	1	1	1	1	0	0	2	1	10
Batam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karimun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	12
Lingga	2	1	1	1	0	1	0	1	1	1	3	12
Natuna	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	2	8
Kepulauan Anambas	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	2	7

Walaupun terdapat sekolah sasaran Pelaksana Kurikulum tahun 2016 di Kota Batam.

Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2016 per Kabupaten/Kota



Sedangkan penyelenggaraan Bimbingan Teknis untuk Instruktur Kabupaten/Kota SMK pada tahun 2017 hanya memberikan penyegaran kepada Instruktur Kabupaten/Kota yang pernah dilatih pada tahun 2016. Untuk itu, Guru Sasaran SMK yang ada di Kota Batam dan sudah mendapatkan pelatihan pada tahun 2016 dilibatkan untuk mengikuti Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kabupaten/Kota SMK Kurikulum 2013 Tahun 2017 dan

menjadi Instruktur Kota Batam. Diharapkan langkah antisipasi berikut ini dapat memberikan solusi pelaksanaan program/kegiatan Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 SMK di masa depan:

- 1) Menyiapkan anggaran untuk memfasilitasi bantuan penginapan khusus peserta dari luar pulau. Karena pada beberapa pulau harus menempuh perjalanan laut 2 jam. Bahkan transportasi laut tidak selalu ada setiap hari walaupun berada dalam satu Kabupaten/Kota.
- 2) Membangun komitmen dan kesadaran Instruktur Kabupaten/Kota dan Guru Sasaran Kurikulum 2013 yang sudah dilatih untuk mengimbaskan ilmu dan pengetahuan yang sudah didapatkan pada Bimbingan Teknis Kurikulum 2013 kepada Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 dan Sekolah Imbas yang ada di Kabupaten/Kota masing-masing.

Dari rincian program/kegiatan LPMP Kepulauan Riau di atas maka dihasilkan *output* dan *outcome* yang diharapkan dari Perjanjian Kinerja 2017 dengan rincian per indikator kinerja berikut ini.

Output dan Outcome Program/Kegiatan Januari s.d. Desember 2017

INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTPUT	OUTCOME
Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutu Pendidikannya	SD, SMP, SMA, SMK	Terpetakannya mutu Pendidikan di 1,417 satuan pendidikan	Meningkatnya mutu Pendidikan di satuan pendidikan
1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya <i>Output: Peta Mutu SD Propinsi Kepulauan Riau</i>	919	Terpetakannya mutu Pendidikan di 886 SD	
2. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya <i>Output: Peta Mutu SMP Propinsi Kepulauan Riau</i>	335	Terpetakannya mutu Pendidikan di 331 SMP	
3. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya <i>Output: Peta Mutu SMA Propinsi Kepulauan Riau</i>	126	Terpetakannya mutu Pendidikan di 114 SMA	
4. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya <i>Output: Peta Mutu SMK Propinsi Kepulauan Riau</i>	98	Terpetakannya mutu Pendidikan di 86 SMK	
Persentase Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	SD, SMP, SMA, SMK	Terfasilitasinya 140 satuan Pendidikan Berdasarkan 8 SNP	Terimbasnya mutu Pendidikan dari ke satuan pendidikan
A. Sekolah Model Yang Difasilitasi	112	Terfasilitasinya 112 satuan pendidikan model berdasarkan 8 SNP	
Jumlah SD model yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	28	Terfasilitasinya 42 SD model berdasarkan 8 SNP	
Jumlah SMP model yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP	28	Terfasilitasinya 28 SMP model berdasarkan 8 SNP	
Jumlah SMA yang melaksanakan kurikulum 2015	28	Terfasilitasinya 22 SMA model berdasarkan 8 SNP	
Jumlah SMK yang melaksanakan kurikulum 2016	28	Terfasilitasinya 20 SMK model berdasarkan 8 SNP	
B. Sekolah yang Difasilitasi Melalui Kemitraan	84	Terfasilitasinya 26 satuan Pendidikan Melalui Kemitraan	
Jumlah SD yang telah difasilitasi melalui kemitraan	28	Terfasilitasinya 10 SD Melalui Kemitraan	
Jumlah SMP yang telah difasilitasi melalui kemitraan	23	Terfasilitasinya 12 SMP Melalui Kemitraan	
Jumlah SMA yang telah difasilitasi melalui kemitraan	10	Terfasilitasinya 1 SMA Melalui Kemitraan	
Jumlah SMK yang telah difasilitasi melalui kemitraan	8	Terfasilitasinya 3 SMK Melalui Kemitraan	
Jumlah SLB yang telah difasilitasi melalui kemitraan	15	-	

INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTPUT	OUTCOME
C. Satuan Pendidikan Yang Melaksanakan Kurikulum 2013	513	Terfasilitasinya 513 satuan Pendidikan dalam melaksanakan Kurikulum 2013	Terbentuknya satuan Pendidikan yang melaksanakan pembelajaran abad 21 dan berbudaya mutu
Jumlah SD yang melaksanakan kurikulum 2013	325	Terfasilitasinya 325 SD dalam melaksanakan Kurikulum 2013	
Jumlah SMP yang melaksanakan kurikulum 2013	113	Terfasilitasinya 113 SMP dalam melaksanakan Kurikulum 2013	
Jumlah SMA yang melaksanakan kurikulum 2013	42	Terfasilitasinya 42 SD dalam melaksanakan Kurikulum 2013	
Jumlah SMK yang melaksanakan kurikulum 2013	33	Terfasilitasinya 33 SMK dalam melaksanakan Kurikulum 2013	
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	12 layanan	Terlaksananya layanan dukungan manajemen Eselon I	Tercipta tata kelola yang menunjang profesionalisme LPMP Kepulauan Riau
Jumlah layanan perencanaan dan penganggaran	8	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran	
Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi	6	Tersedianya dokumen pemantauan dan evaluasi	
Jumlah layanan pengelolaan data dan informasi	2	Tersedianya layanan pengelolaan data dan informasi	
Jumlah layanan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan	5	Terbentuknya kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan	
Layanan Internal	4	Tersedianya layanan internal	Terfasilitasinya entitas pendidikan
Jumlah layanan internal melalui pengadaan kendaraan bermotor roda 2	1	Tersedianya kendaraan bermotor roda 2	
Jumlah layanan internal melalui pengadaan perangkat pengolah DAI	1	Tersedianya perangkat pengolah DAI	
Jumlah layanan internal melalui pengadaan peralatan/fasilitas kantor	1	Tersedianya peralatan/fasilitas kantor	
Jumlah layanan internal melalui pembangunan/renovasi gedung/bangunan	1	Tersedianya gedung/bangunan	
Layanan Perkantoran	12 Bulan	Terpenuhinya layanan perkantoran	Berjalannya operasional
A. Gaji dan Tunjangan Pegawai			
Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	12	Terbayarkannya gaji dan tunjangan pegawai	

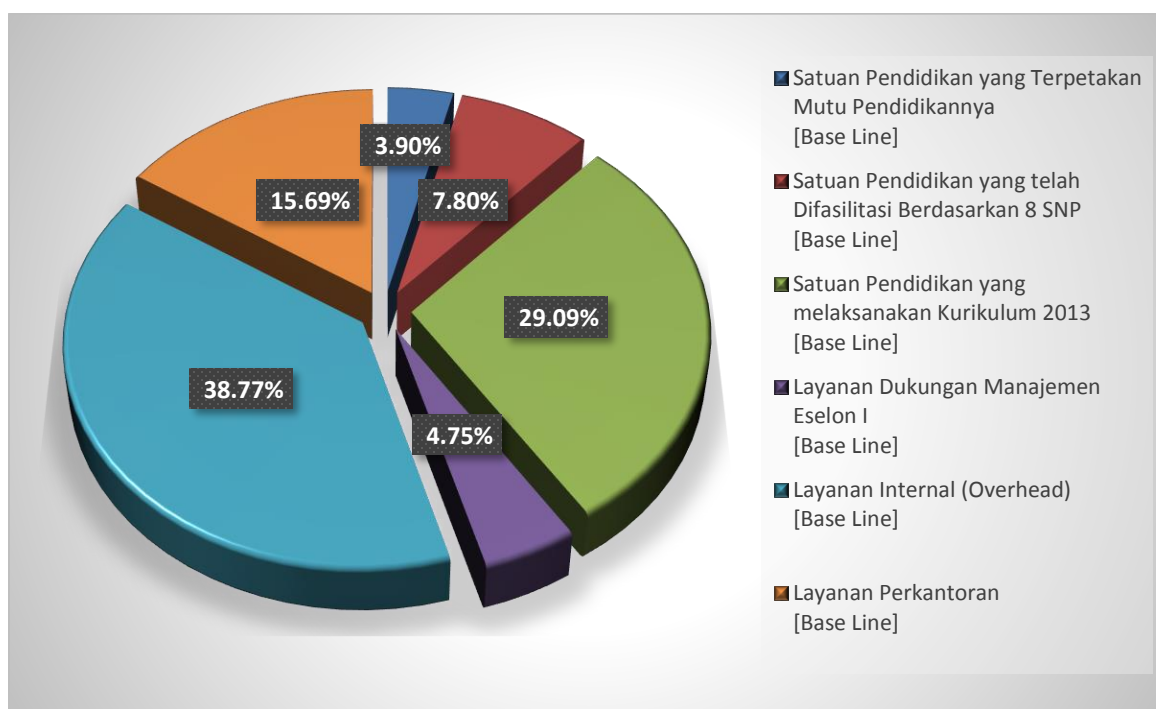
INDIKATOR KINERJA	TARGET	OUTPUT	OUTCOME
B. Operasional dan Pemeliharaan Kantor			perkantoran dengan baik
Jumlah pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran	12	Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari perkantoran	
Jumlah layanan daya dan jasa	12	Terbayarkannya layanan daya dan jasa	
Jumlah layanan pemeliharaan kantor	12	Terlaksananya pemeliharaan kantor	
Jumlah pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor	12	Terbayarkannya pelaksanaan operasional kantor	
Jumlah layanan penggantian inventaris	12	Tersedianya penggantian inventaris	

B. Realisasi Anggaran

Setiap awal tahun seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan kontrak kinerja dan salah satunya adalah daya serap anggaran sesuai dengan kurva normal daya serap anggaran seperti yang ditargetkan dalam kontrak kerja. Anggaran LPMP Kepulauan Riau dalam DIPA Tahun Anggaran 2017 yang digunakan untuk mendukung pencapaian satu sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja program/kegiatan yaitu sebesar Rp.38.566.841.000,00.

Namun sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Salinan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, pagu anggaran LPMP Kepulauan Riau mengalami perubahan menjadi Rp. 36.508.347.000,00. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian satu sasaran strategis dengan 6 indikator kinerja program/kegiatan dimana masing-masing alokasi anggaran pada setiap indikator kinerja terlihat pada gambar berikut.

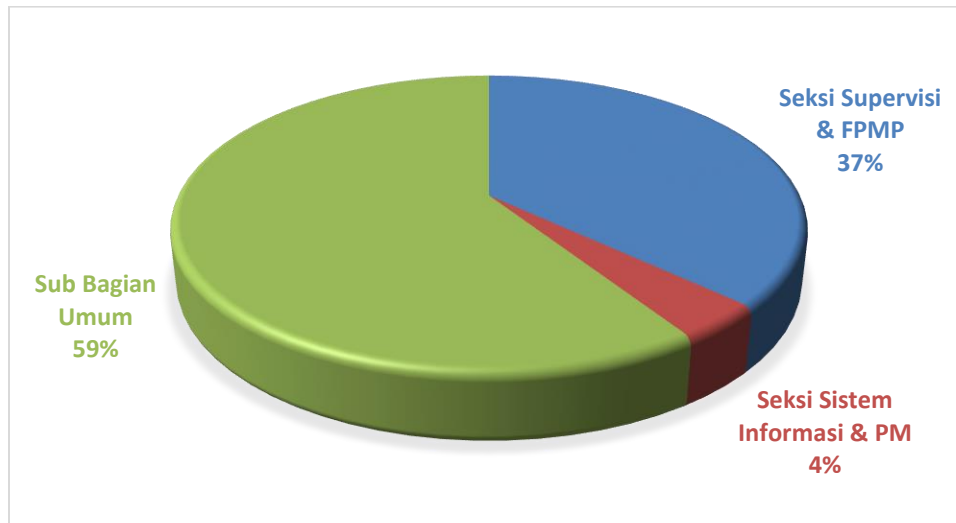
Alokasi Anggaran per Indikator Kinerja Program/Kegiatan



Gambar di atas menunjukkan persentase anggaran terbesar di LPMP Kepulauan Riau terdapat pada indikator kinerja program/kegiatan Layanan Internal yaitu sebesar 38.77% dari total pagu anggaran atau sebesar Rp 14.154.303.000. Hal ini disebabkan LPMP Kepulauan Riau

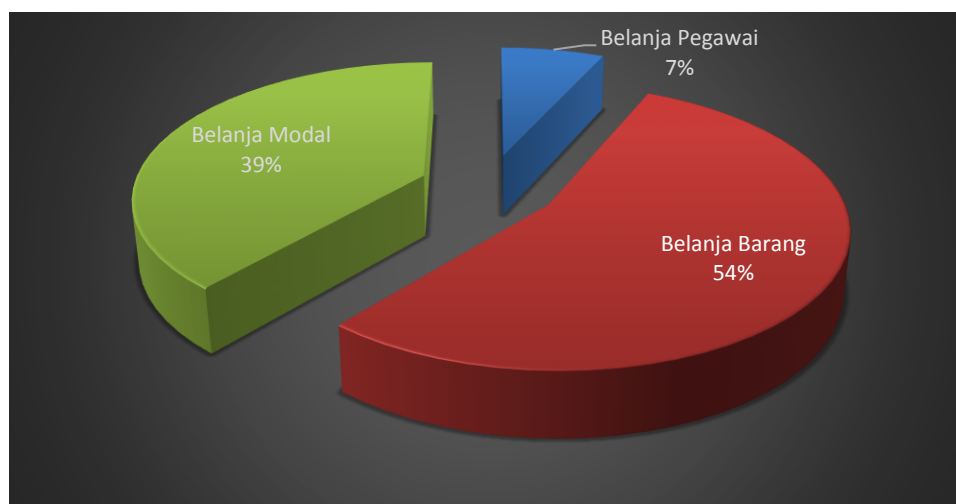
dalam tahap pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPMP Kepulauan Riau di Provinsi Kepulauan Riau. Dikarenakan anggaran terbesar terdapat pada indikator kinerja program/kegiatan Layanan Internal yang merupakan bagian dari anggaran Sub Bagian Umum sehingga alokasi anggaran terbesar terdapat pada Sub Bagian Umum yaitu sebesar 59.21%, sedangkan alokasi anggaran pada Seksi Sistem Informasi dan PM serta Seksi Supervisi dan FPMP sebagai berikut.

Alokasi Anggaran per Seksi/Sub Bagian



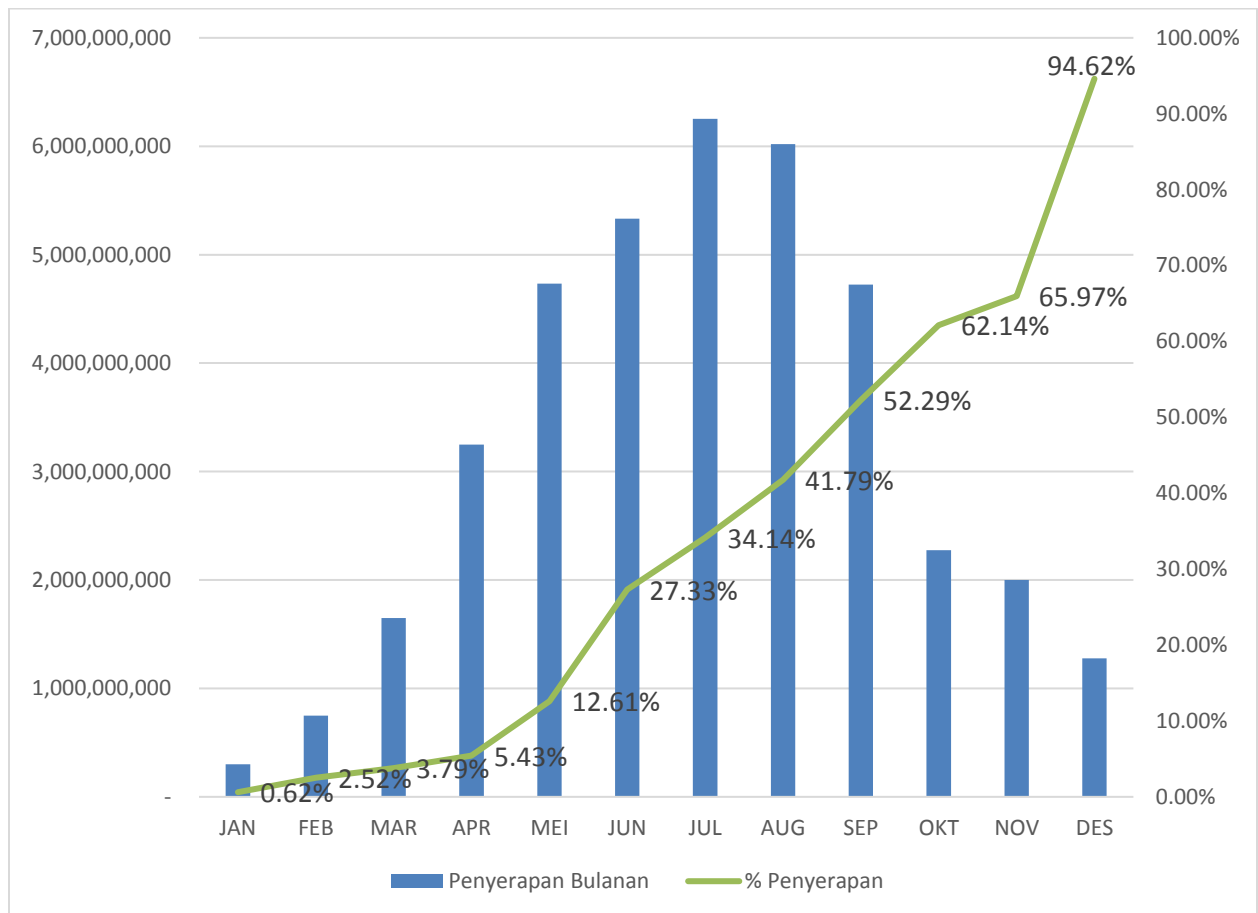
Dan karena seluruh anggaran Seksi Sistem Informasi & PM serta Seksi Supervisi & FPMP termasuk jenis Belanja Barang dan 23% dari anggaran Subbagian Umum termasuk jenis Belanja Barang maka alokasi anggaran terbesar pada jenis Belanja Barang, detil pada gambar berikut.

Alokasi Anggaran per Jenis Belanja



Laporan daya serap LPMP Kepulauan Riau sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 terealisasi dengan daya serap sebesar Rp. 34.542.546.924,00,- (Tiga Puluh Empat Milyar Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah). Sedangkan keuangan yang dialokasikan Pemerintah dari APBN LPMP Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2017 dengan nomor DIPA awal : SP-DIPA-023.03.2.419511/2017, tanggal 7 Desember 2016 dan Revisi 4 tanggal 30 Mei 2017 dengan nomor SP-DIPA-023.03.2.419511/2017 sebesar Rp 36.508.347.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau sebesar 94.62%, yang mana lebih rendah dari tahun anggaran 2016 (95.27%), seperti tergambar pada grafik dan tabel berikut.

Realisasi Penyerapan Anggaran LPMP Kepulauan Riau Tahun 2017



Realisasi Penyerapan per Bulan Tahun 2017 vs 2016

Bulan	Penyerapan Bulanan (Rp) 2017	Penyerapan Kumulatif (Rp) 2017	Penyerapan Kumulatif (%) 2017	Penyerapan Kumulatif (%) 2016
Januari	224.802.238	224.802.238	0,58	0,56
Februari	693.573.740	918,375,978	2,38	1,45
Maret	466.605.565	1.384.981.543	3,59	3,37
April	597.143.800	1.982.125.343	5,14	4,22
Mei	2.622.546.104	4.604.671.447	11,94	6,24
Juni	5.374.155.916	9.978.827.363	25,87	16,56
Juli	2.483.611.817	12.462.439.180	32,31	39,73
Agustus	2.793.040.155	15.255.479.335	41,79	56,18
September	3.835.569.685	19.091.049.020	52,29	61,29
Oktober	3.596.107.969	22.687.156.989	62,14	73,36
November	1.396.510.826	24.083.667.815	65,97	84,97
Desember	10.458.879.109	34.542.546.924	94,62	95,27

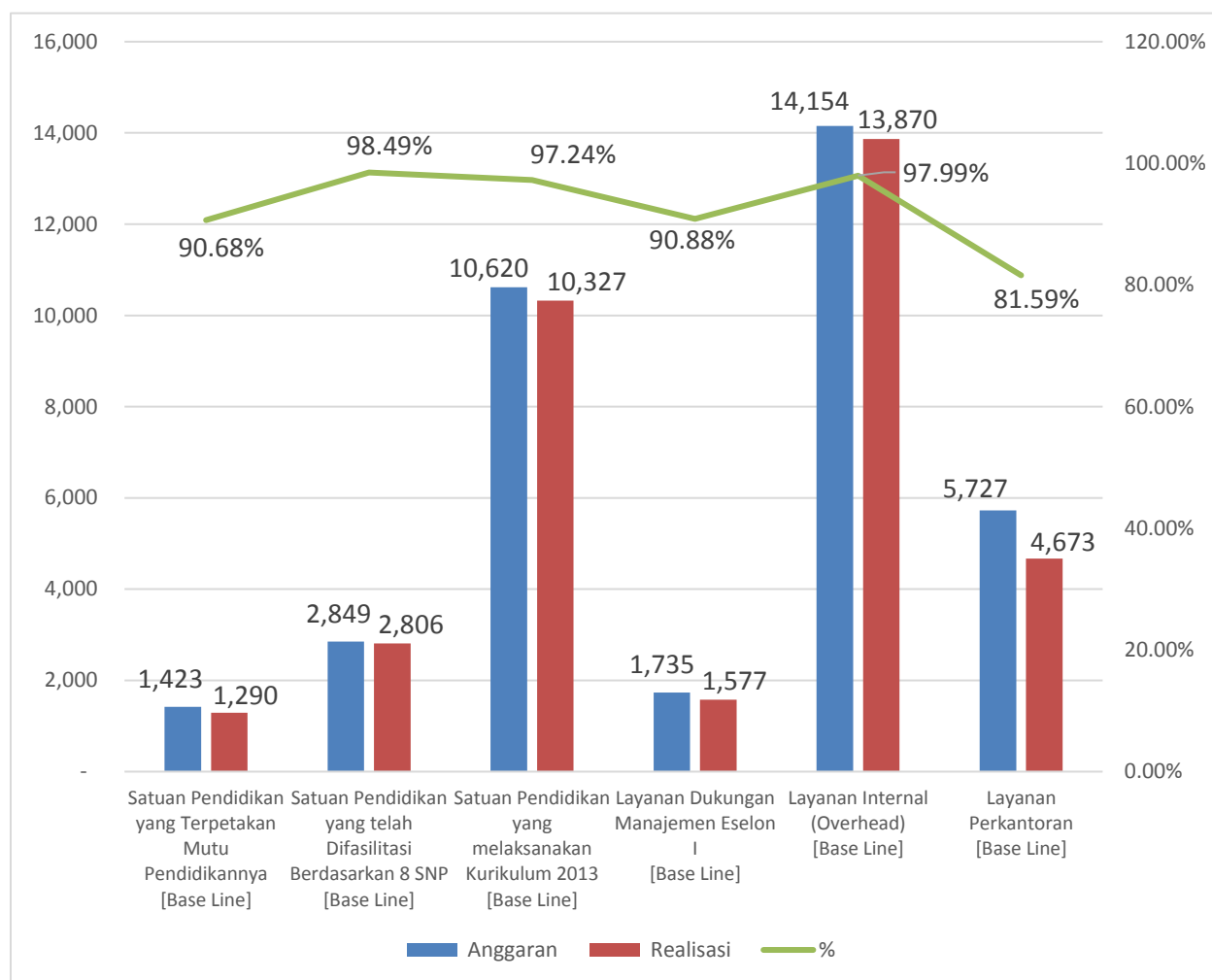
Penurunan daya serap tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 disebabkan oleh:

1. Alokasi anggaran yang berlebih pada anggaran Gaji dan Tunjangan yang merupakan bagian dari anggaran indikator kinerja program/kegiatan Layanan Perkantoran sebesar Rp 653.334.582,00 atau 33.24% dari total sisa anggaran Rp 1.965.800.076,00.
2. Jumlah satuan Pendidikan yang melakukan pengisian aplikasi PMP lebih sedikit dari data jumlah satuan Pendidikan yang tercatat dalam aplikasi.
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran serta belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota pada beberapa kegiatan pendukung indikator kinerja program/kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I terealisasi dengan jumlah yang lebih rendah daripada pagu yang sudah dialokasikan.

Penyerapan terbesar pada indikator kinerja program/kegiatan Layanan Internal (Overhead) Rp 13.869.542.349,00 atau 97.99% dari pagu indikator kinerja program/kegiatan Layanan Internal (Overhead) yaitu sebesar Rp 14.154.303.000,00, seperti tercantum pada grafik berikut.

Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Januari s.d. Desember 2017 (dalam juta rupiah)



Dengan adanya realisasi penyerapan anggaran per bulan per Indikator Kinerja Tahun 2017 pada tabel di bawah ini.

Penyerapan Bulanan per Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Bulan	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan Internal (Overhead)	Layanan Perkantoran
Januari	-	-	-	-	-	112.352.951
Februari	-	-	-	337.418.000	-	468.605.027
Maret	-	-	-	228.495.000	-	238.110.565
April	-	-	205.109.400	23.860.000	-	368.174.400
Mei	-	-	2.265.008.350	-	49.960.000	307.577.754

Bulan	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu Pendidikannya	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan Internal (Overhead)	Layanan Perkantoran
Juni	86.592.500	121.685.500	3.679.822.500	-	1.145.187.838	340.867.578
Juli	83.960.400	-	1.951.660.000	-	-	447.991.417
Agustus	350.741.200	457.683.200	1.461.243.800	204.901.100	-	318.470.855
September	110.800.000	1.666.041.700	-	173.556.300	1.562.490.503	322.681.182
Oktober	67.850.450	43.940.000	32.150.000	65.324.050	3.018.701.519	368.141.950
November	124.741.300	78.817.600	360.457.700	21.121.842	432.599.180	378.773.204
Desember	465.270.800	438.253.250	371.614.000	522.188.700	7.660.603.309	1.000.949.050
Total	1.289.956.650	2.806.421.250	10.327.065.750	1.576.864.992	13.869.542.349	4.672.695.933
Pagu	1.422.526.000	2.849.351.000	10.620.123.000	1.735.163.000	14.154.303.000	5.726.881.000
% penyerapan	90,68	98,49	97,24	90,88	97,99	81,59

Indikator kinerja program/kegiatan Satuan Pendidikan yang terpetakan Mutu Pendidikannya belum ada capaian selama bulan Januari s.d. Mei 2017 dikarenakan proses pemetaan baru dimulai pada akhir Juli dan berakhir pada 20 Oktober 2017, sehingga rangkaian program/kegiatan dari indikator kinerja Satuan Pendidikan yang terpetakan Mutu Pendidikannya mulai dilakukan pada bulan Juni 2017.

Sedangkan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP LPMP Kepulauan Riau dari bulan Januari s.d. Mei 2017 masih menunggu kebijakan dari Pusat terkait format pelaksanaannya. Namun dalam masa menunggu kebijakan dari Pusat, LPMP Kepulauan Riau melakukan rangkaian persiapan pelaksanaan indikator kinerja program/kegiatan Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi berdasarkan 8 SNP, yaitu sebagai berikut ini:

4. Pendataan Usulan Sekolah Model

LPMP melakukan pendataan usulan calon sekolah model implementasi Kurikulum 2013 dengan mempertimbangkan letak geografis masing-masing calon sekolah model dan imbasnya.

2. Sosialisasi dan Koordinasi LPMP dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota

LPMP Kepulauan Riau melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai sekolah model, alur pelaksanaan, dan pendampingan

serta berkoordinasi dalam hal a) daftar calon sekolah model implementasi Kurikulum 2013 tahun 2017 di Kepulauan Riau beserta imbasnya, b) pola pelaksanaan bimtek dan pengganggarannya, c) pola pendampingan dan bantuan pemerintah, d) jadwal pelaksanaan kegiatan, dan e) hal-hal teknis lainnya terkait implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tahun 2017 di Kepulauan Riau.

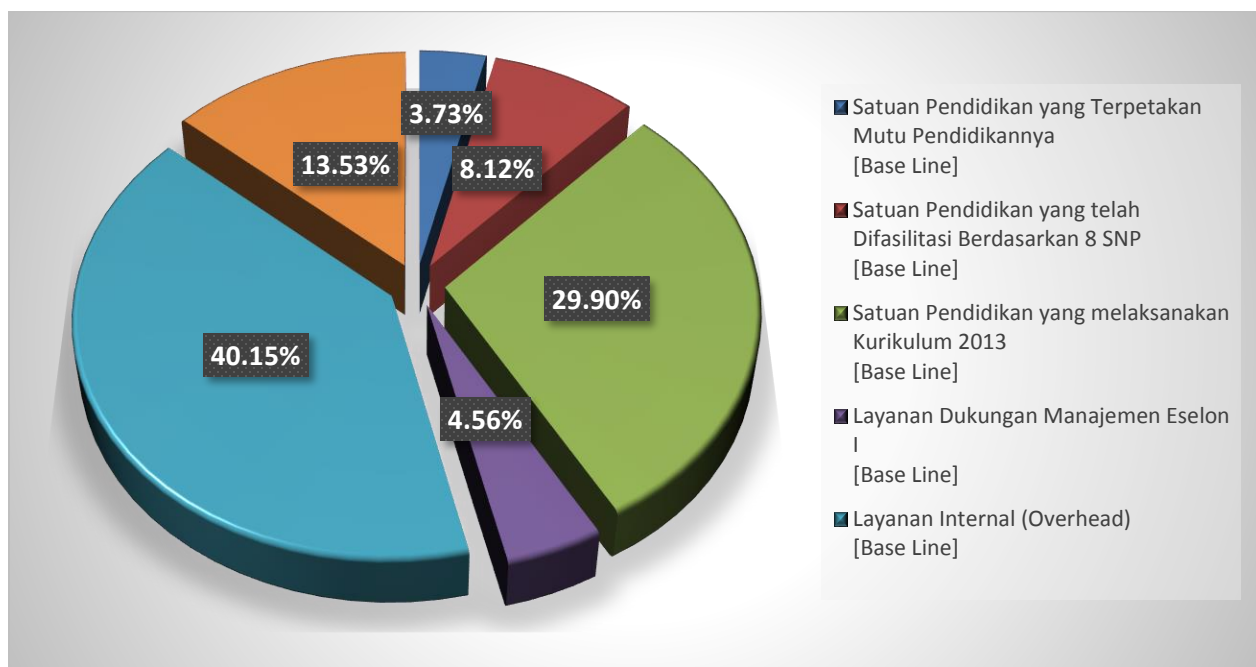
3. Persiapan Teknis LPMP Kepulauan Riau

Finalisasi persiapan teknis dilaksanakan setelah diselenggarakannya Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sekolah Model dan Pengimbasannya. Penyampaian surat menyurat berserta persiapan-persiapan teknis lainnya di atas dilakukan dengan baik dan bertahap.

Indikator kinerja program/kegiatan Layanan Internal (Overhead) pada bulan Januari sampai dengan April 2017 dalam proses lelang sehingga pada bulan-bulan tersebut belum ada realisasi anggaran atau masih nol (0).

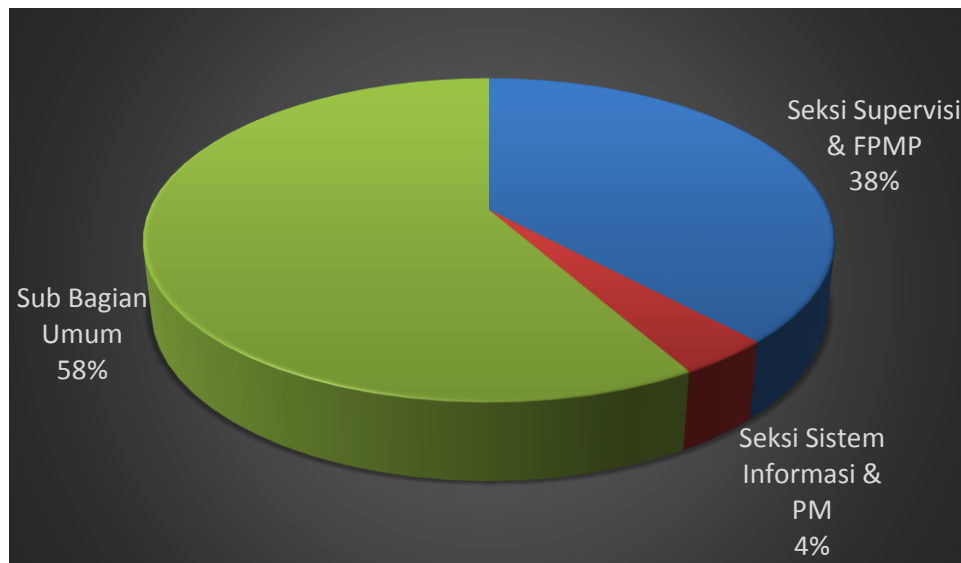
Berikut grafik daya serap anggaran pada 6 indikator kinerja program/kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMP Kepulauan Riau pada bulan Januari sampai dengan Desember tahun anggaran 2017.

Daya Serap Anggaran Tahun 2017 per Indikator Kinerja Program/Kegiatan



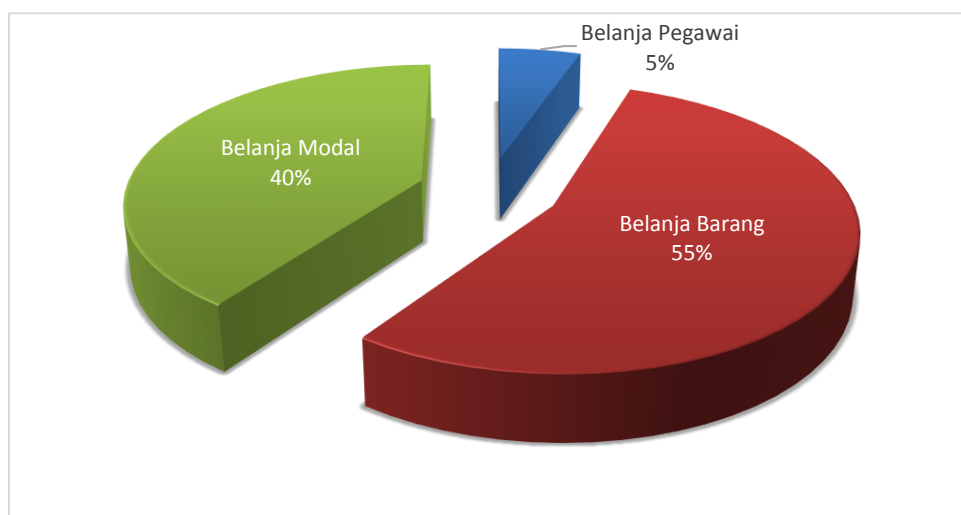
Daya serap anggaran Januari s.d. Desember 2017 terbesar pada indikator kinerja program/kegiatan Layanan Internal (Overhead) yaitu sebesar 40.15%. Sehingga hal ini menunjukkan daya serap terbesar terdapat pada Sub Bagian Umum berbanding lurus dengan persentase alokasi anggaran per Subbag/Seksi. Sedangkan daya serap Seksi Sistem Informasi & PM serta Seksi Supervisi & FPMP terlihat pada gambar berikut.

Realisasi Anggaran per Seksi/Sub Bagian



Oleh sebab itu selaras dengan alokasi anggaran per jenis belanja maka distribusi daya serap anggaran Januari s.d. Desember 2017 terbesar pada jenis Belanja Barang sebesar 54.57%, detail masing-masing jenis belanja pada gambar, tabel dan, grafik berikut:

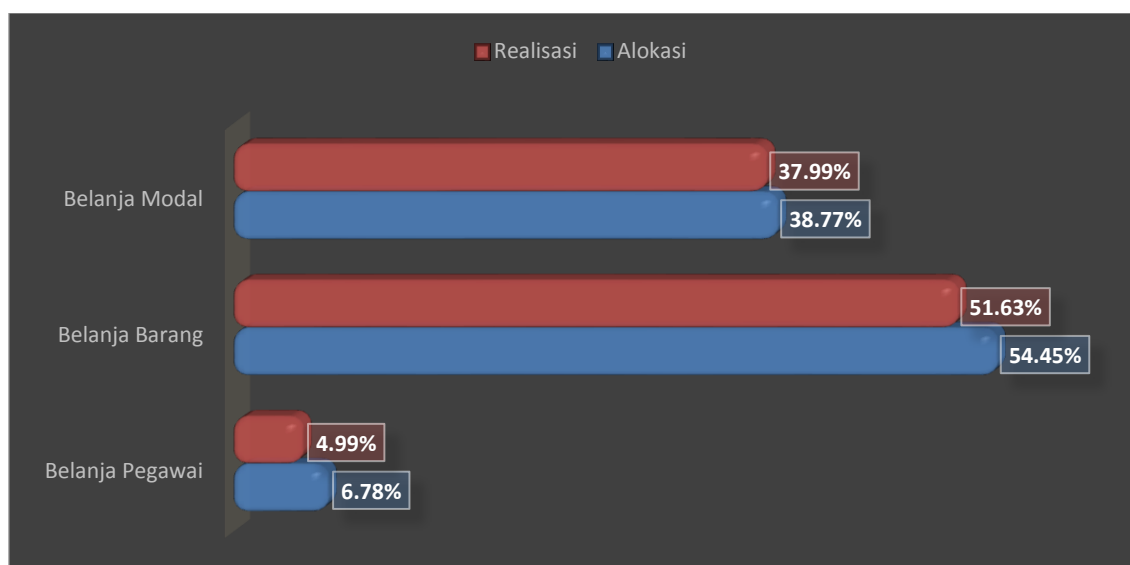
Persentase Distribusi Realisasi Anggaran (per jenis belanja)



Rekapitulasi per Jenis Belanja

Kode	Jenis Belanja	Alokasi	Alokasi	Realisasi		
				31 Desember	Realisasi	%
51	Belanja Pegawai	2,476,800,000	6.78%	1,823,465,418	4.99%	73.62
52	Belanja Barang	19,877,244,000	54.45%	18,849,539,157	51.63%	94.83
53	Belanja Modal	14,154,303,000	38.77%	13,869,542,349	37.99%	97.99
	Jumlah	36,508,347,000	100.00%	34,542,546,924	94.62%	94.62

Persentase Bobot Alokasi berbanding Realisasi per Belanja



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Rangkaian data dan penjelasan di atas menunjukkan:

1. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja dari sasaran strategis LPMP Propinsi Kepulauan Riau sampai dengan tanggal 31 Desember 2017;
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut;
3. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Propinsi Kepulauan Riau sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

Sebagai bagian penutup dari LAKIP LPMP Kepulauan Riau tahun 2017, dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja tahun 2017 sudah dapat dicapai dan dapat memberi kontribusi terhadap capaian kinerja dan sasaran Renstra 2015-2019.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2017 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk melaksanakan Kinerja Tahun 2017 berikutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi LPMP, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah.
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran Strategik yang ditetapkan.

3. Lebih memperhatikan aspek-aspek keseimbangan sesuai pola peta strategik yang menggunakan metodologi *Balanced Scorecard* dalam implementasi Rencana Kerja (Renja) 2017, sehingga terdapat keseimbangan yang wajar atas pencapaian dari masing-masing tujuan strategik.
4. Secara khusus, berkaitan dengan perumusan Renja 2017 sebagai bentuk penegasan dari Renstra 2015-2019, perlu dilakukan penelitian yang mendalam atas kuantitas target dari indikator kinerja sasaran-sasaran Strategik yang ditetapkan sehingga dapat menghindari adanya capaian kinerja yang sangat ekstrim di masa-masa mendatang.

Sebagai kata akhir, kami Pimpinan beserta segenap jajaran LPMP Kepulauan Riau mengharapkan agar LAKIP akhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholder* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja serta dapat dijadikan salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja. Secara spesifik, bagi LPMP, LAKIP ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi:

1. Rencana Kerja (*Operational Plan*);
2. Rencana Kinerja (*Performance Plan*);
3. Rencana Anggaran (*Financial Plan*);
4. Rencana Strategik (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

B. Rekomendasi

Selama ini kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di LPMP Kepulauan Riau telah berjalan sesuai dengan harapan. Namun *output* dari program yang telah berjalan perlu dioptimalisasi. Untuk itu perlu direkomendasikan sebagai masukan untuk perbaikan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah LPMP Kepulauan Riau:

1. Perlu ada kesepakatan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja sehingga seluruh LPMP memiliki pemahaman yang sama.
2. Untuk penandatanganan perjanjian kinerja Kepala LPMP dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah perlu difasilitasi dan diundang Kepala LPMP dan

petugas LAKIP, sehingga perjanjian kinerja itu dapat ditandatangani kedua belah pihak.

3. Petugas LAKIP perlu dilatih sehingga petugas LAKIP memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menyusun LAKIP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Perbaikan di internal LPMP Kepulauan Riau agar SAKIP LPMP Kepulauan Riau lebih baik maka sebaiknya membuat Prosedur Operasional Standar (POS) untuk persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan yang kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi kepada semua pihak agar POS tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak. Hal ini dikarenakan laporan kegiatan diselesaikan dalam jangka waktu yang berbeda oleh masing-masing kepanitiaan. Yang sering terjadi, laporan kegiatan yang dilaksanakan lebih kini selesai lebih cepat daripada kegiatan yang dilaksanakan lebih awal. Keterlambatan penyelesaian ini akan mempengaruhi keterlambatan pelaporan keuangan yang akan memberikan efek domino terhadap keterlambatan pencairan anggaran berikutnya. Dikarenakan kesesuaian rencana dan realisasi penarikan anggaran merupakan salah satu penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). POS ini dalam pelaksanaannya diharapkan mendapatkan kontrol yang baik oleh pihak-pihak yang berkepentingan di LPMP Kepulauan Riau sehingga LPMP Kepulauan Riau lebih baik dan maju. Kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi kegiatan, yang diidealkannya dilaksanakan setelah setiap kegiatan selesai dilaksanakan.
5. Sasaran kegiatan sebaiknya menyesuaikan dengan target yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Bila target lebih banyak melibatkan Satuan Pendidikan maka sasaran kegiatan sebaiknya lebih melibatkan Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah dan Guru serta Tenaga Kependidikan). Sehingga tingkat ketercapaian dapat lebih optimal dan sesuai yang ditetapkan pada Perjanjian Kerja yang mencantumkan target dalam satuan Sekolah. Juga mengacu pada tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dinyatakan memiliki tugas melaksanakan

- penjaminan mutu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan kesetaraan pendidikan dasar dan menengah di provinsi dan fungsi poin (d) yaitu fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu Pendidikan.
6. Perlu dilakukan pengecekan/pembaharuan secara berkala dan aktif terhadap data sekolah yang masih aktif dalam Dapodik. Karena data yang terdapat dalam Dapodik merupakan data yang digunakan sebagai acuan/sasaran dalam pelaksanaan Pemetaan Mutu maupun Pelaksanaan Kurikulum 2013. Bila data yang dijadikan patokan tidak akurat maka akan mempengaruhi capaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya LPMP Kepulauan Riau. Yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja capaian target secara keseluruhan (red: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
 7. Diharapkan ke depannya ada andil dari pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memajukan moda transportasi udara (tidak tergantung pada moda transportasi laut saja), untuk mendukung pelaksanaan diseminasi dan implementasi program pemerintah sehingga capaian Pendidikan dapat terimplementasi dan terdiseminasi sampai ke pelosok daerah.

LAMPIRAN



**Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Kepulauan Riau
dengan
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah**

TUGAS

Melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

FUNGSI

1. Melakukan pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
2. Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
3. Melakukan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan;
4. Melakukan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan;
5. Melaksanakan kerjasama di bidang penjaminan mutu pendidikan;
6. Melaksanakan urusan administrasi LPMP

TARGET CAPAIAN

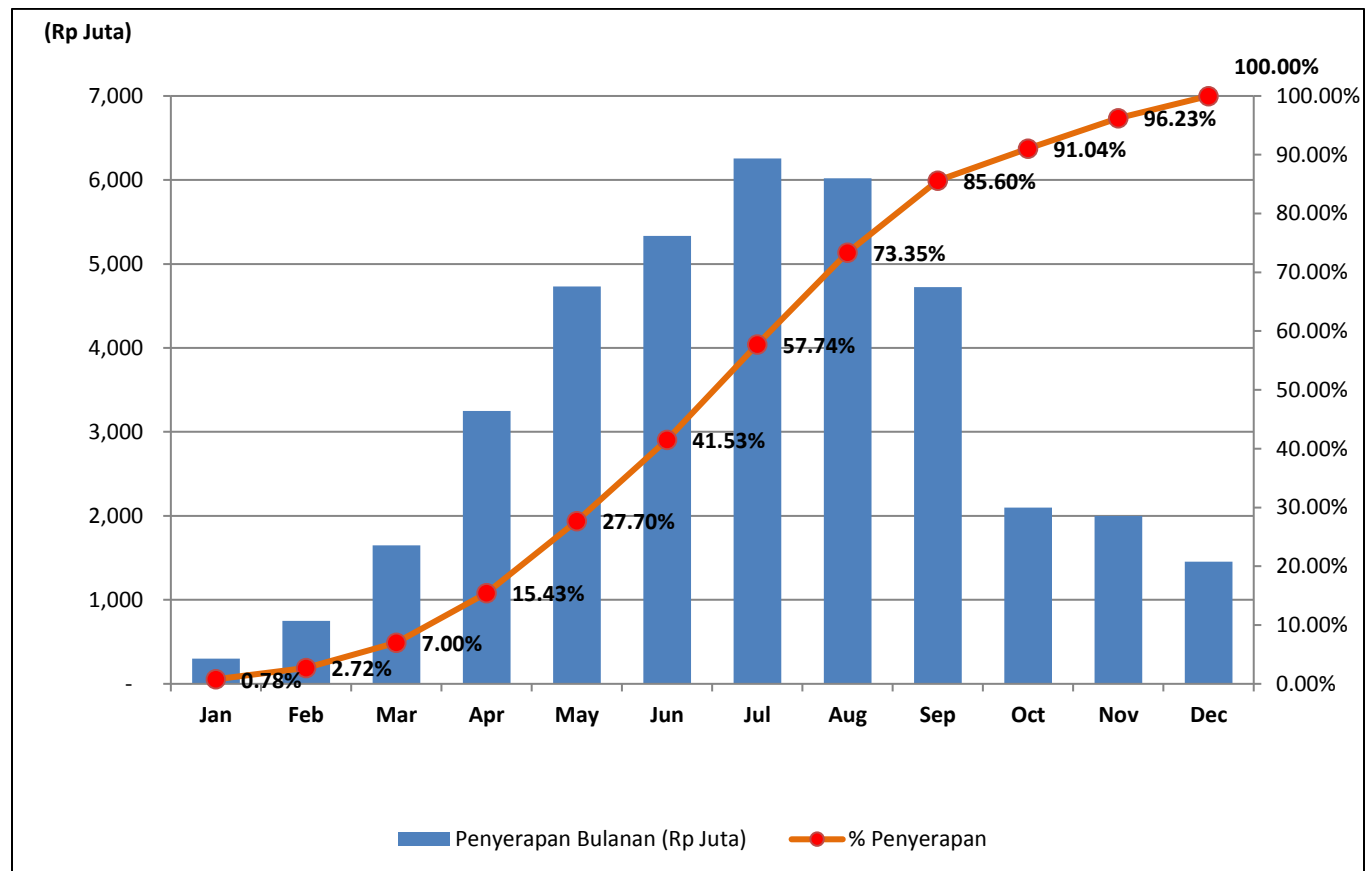
Kegiatan : Peningkatan layanan pengembangan penjaminan mutu pendidikan untuk seluruh jenjang pendidikan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan	1. Persentase SD yang telah dipetakan mutunya 2. Persentase SD yang meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau (SD)</i>	100% 40% 919 Sekolah	1.908.741.000
	3. Persentase SMP yang telah dipetakan mutunya 4. Persentase SMP yang meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau (SMP)</i>	100 % 60 % 335 Sekolah	
	5. Persentase SMA yang telah dipetakan mutunya 6. Persentase SMA yang meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau (SMA)</i>	100 % 60 % 126 Sekolah	
	7. Persentase SMK yang telah dipetakan mutunya 8. Persentase SMK yang meningkat indeks efektivitasnya Output : - <i>Satuan Pendidikan yang dipetakan mutunya di Kepulauan Riau (SMK)</i>	100% 45% 98 Sekolah	
	9. Persentase SD yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output :	40%	
			14.584.783.000

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SD)	28 Sekolah	
	- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SD)	325 Sekolah	
	- Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi melalui kemitraan (SD)	28 Sekolah	
	10. Persentase SMP yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output :	40%	
	- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMP)	28 Sekolah	
	- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMP)	113 Sekolah	
	- Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi melalui kemitraan (SMP)	23 Sekolah	
	11. Persentase SMA yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output :	40%	
	- Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMA)	28 Sekolah	
	- Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMA)	42 Sekolah	
	- Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi melalui kemitraan (SMA)	10 Sekolah	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	12. Persentase SMK yang telah disupervisi dan difasilitasi dalam pencapaian SNP Output : - Satuan Pendidikan yang difasilitasi melalui 8 SNP (SMK) - Satuan pendidikan yang melaksanakan kurikulum 2013 (SMK) - Satuan Pendidikan yang telah difasilitasi melalui kemitraan (SMK)	40% 28 Sekolah 33 Sekolah 8 Sekolah	

Jumlah alokasi anggaran Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kepulauan Riau Tahun 2017 sebesar **Rp.38.566.841.000,- (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah).**



RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN LPMP KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017

NO	KOMPONEN	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Penyerapan Bulanan (Rp Juta)	300	750	1,650	3,250	4,732	5,333	6,254	6,020	4,724	2,100	2,001	1,453
2	Penyerapan Kumulatif	300	1,050	2,700	5,950	10,682	16,015	22,269	28,289	33,013	35,113	37,114	38,567
3	% Penyerapan	0.78%	2.72%	7.00%	15.43%	27.70%	41.53%	57.74%	73.35%	85.60%	91.04%	96.23%	100.00%

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan berlaku.

DirekturJenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah,

Hamid Muhammad
NIP195905121983111001

Jakarta, Januari 2017

Kepala LPMP Kepulauan Riau

Dr. Hj. Ulfa Maria, M.Pd.
NIP196408031990032005

LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
Bulan: Desember 2017

Format : B.19
Nama Satker : LPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dana DIPA : Rp 36.508.347.000
Realisasi : Rp 34.542.546.924
Keuangan : 94,62%
Fisik : 100.00%

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
419511	LPMP PROVINSI KEPULAUAN RIAU					2,476,800,000	1,823,465,418	19,877,244,000	18,849,539,157	14,154,303,000	13,869,542,349	36,508,347,000	34,542,546,924	94,62	1,965,800,076	0
3	DITJEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH					2,476,800,000	1,823,465,418	19,877,244,000	18,849,539,157	14,154,303,000	13,869,542,349	36,508,347,000	34,542,546,924	94,62	1,965,800,076	0
3.06	Program Pendidikan Dasar dan Menengah					2,476,800,000	1,823,465,418	19,877,244,000	18,849,539,157	14,154,303,000	13,869,542,349	36,508,347,000	34,542,546,924	94,62	1,965,800,076	0
5630	Peningkatan Layanan Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan untuk Seluruh Jenjang Pendidikan					2,476,800,000	1,823,465,418	19,877,244,000	18,849,539,157	14,154,303,000	13,869,542,349	36,508,347,000	34,542,546,924	94,62	1,965,800,076	0
5630.001	Satuan Pendidikan yang Terpetakan Mutu	Sekolah	1,478	1,417	95.87	-	-	1,422,526,000	1,289,956,650	-	-	1,422,526,000	1,289,956,650	90,68	132,569,350	0
5630.001.001	Sekolah Yang Terverifikasi Data Mutunya					-	-	1,246,562,000	1,116,538,250	-	-	1,246,562,000	1,116,538,250	89,57	130,023,750	0
51	Sosialisasi Penjaminan Mutu Pendidikan					-	-	204,656,000	196,274,100	-	-	204,656,000	196,274,100	95,90	8,381,900	0
051.A	Bimbingan Teknis Penyusunan Peta Mutu					-	-	89,458,000	83,491,300	-	-	89,458,000	83,491,300	93,33	5,966,700	0
521211	Belanja Bahan					-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	7,800,000	7,800,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	7,800,000	7,800,000	100,00	-	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	72,708,000	66,741,300	-	-	72,708,000	66,741,300	91,79	5,966,700	0
051.B	Workshop Pengolahan dan Analisis Data serta Penyusunan Peta Mutu					-	-	89,458,000	87,042,800	-	-	89,458,000	87,042,800	97,30	2,415,200	0
521211	Belanja Bahan					-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	7,800,000	7,800,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	7,800,000	7,800,000	100,00	-	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	72,708,000	70,292,800	-	-	72,708,000	70,292,800	96,68	2,415,200	0
051.C	Diseminasi Peta Mutu dan Rencana Peningkatan Mutu Pendidikan					-	-	25,740,000	25,740,000	-	-	25,740,000	25,740,000	100,00	-	0
521211	Belanja Bahan					-	-	16,000,000	16,000,000	-	-	16,000,000	16,000,000	100,00	-	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	1,600,000	1,600,000	-	-	1,600,000	1,600,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	3,140,000	3,140,000	-	-	3,140,000	3,140,000	100,00	-	0
55	Bimbingan Teknis Pengawas					-	-	505,552,000	478,583,700	-	-	505,552,000	478,583,700	94,67	26,968,300	0
055.A	Bimbingan Teknis Pemetaan Mutu bagi Pengawas Sekolah					-	-	402,824,000	391,991,200	-	-	402,824,000	391,991,200	97,31	10,832,800	0
521211	Belanja Bahan					-	-	16,600,000	16,600,000	-	-	16,600,000	16,600,000	100,00	-	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					-	-	7,500,000	5,950,000	-	-	7,500,000	5,950,000	79,33	1,550,000	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	39,760,000	39,060,000	-	-	39,760,000	39,060,000	98,24	700,000	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	-	338,964,000	330,381,200	-	-	338,964,000	330,381,200	97,47	8,582,800	0
055.B	Konsolidasi Data Pengawas Sebagai Verifikator dan Validator Pengumpulan Data Mutu					-	-	102,728,000	86,592,500	-	-	102,728,000	86,592,500	84,29	16,135,500	0
521211	Belanja Bahan					-	-	18,300,000	18,300,000	-	-	18,300,000	18,300,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000	9,000,000	100,00	-	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	74,278,000	58,142,500	-	-	74,278,000	58,142,500	78,28	16,135,500	0
56	Pelaksanaan Pengumpulan Data					-	-	473,325,000	387,145,100	-	-	473,325,000	387,145,100	81,79	86,179,900	0
056.A	Pelaksanaan Pengumpulan Data					-	-	314,730,000	255,800,000	-	-	314,730,000	255,800,000	81,28	58,930,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	14,780,000	-	-	-	14,780,000	-	0,00	14,780,000	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	43,250,000	43,250,000	-	-	43,250,000	43,250,000	100,00	-	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					-	-	256,700,000	212,550,000	-	-	256,700,000	212,550,000	82,80	44,150,000	0
056.B	Pendampingan Pengumpulan Data					-	-	158,595,000	131,345,100	-	-	158,595,000	131,345,100	82,82	27,249,900	0
521211	Belanja Bahan					-	-	550	550	-	-	550	550	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	27,195,000	20,545,100	-	-	27,195,000	20,545,100	75,55	6,649,900	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					-	-	130,850,000	110,250,000	-	-	130,850,000	110,250,000	84,26	20,600,000	0
57	Verifikasi dan Validasi					-	-	63,029,000	54,535,350	-	-	63,029,000	54,535,350	86,52	8,493,650	0
057.A	Monitoring dan Evaluasi Pengumpulan Data					-	-	63,029,000	54,535,350	-	-	63,029,000	54,535,350	86,52	8,493,650	0
521211	Belanja Bahan					-	-	1,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	100,00	-	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					-	-	7,639,000	-	-	-	7,639,000	-	0,00	7,639,000	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	54,390,000	53,535,350	-	-	54,390,000	53,535,350	98,43	854,650	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
5630.001.002	Sekolah Terpetakan Mutu Pendidikan					-	-	175,964,000	173,418,400	-	-	175,964,000	173,418,400	98,55	2,545,600	0
51	Penyusunan Peta Mutu dan Pengolahan Data Mutu					-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0
051.B	FGD Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah					-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0
52	Analisis Data Mutu					-	-	86,506,000	83,960,400	-	-	86,506,000	83,960,400	97,06	2,545,600	0
052.A	Bimbingan Teknis (Penyegaran) Fasilitator Daerah Pemetaan Mutu					-	-	86,506,000	83,960,400	-	-	86,506,000	83,960,400	97,06	2,545,600	0
521211	Belanja Bahan					-	-	7,200,000	7,200,000	-	-	7,200,000	7,200,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,450,000	1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	13,883,000	13,728,000	-	-	13,883,000	13,728,000	98,88	155,000	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	63,973,000	61,582,400	-	-	63,973,000	61,582,400	96,26	2,390,600	0
53	Penyusunan Rekomendasi Peningkatan Mutu					-	-	89,458,000	89,458,000	-	-	89,458,000	89,458,000	100,00	-	0
053.A	Workshop Penyusunan Rencana Peningkatan Mutu					-	-	89,458,000	89,458,000	-	-	89,458,000	89,458,000	100,00	-	0
521211	Belanja Bahan					-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	7,800,000	7,800,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	7,800,000	7,800,000	-	-	7,800,000	7,800,000	100,00	-	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	72,708,000	72,708,000	-	-	72,708,000	72,708,000	100,00	-	0
54	Diseminasi Pemetaan Mutu					-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0
054.B	Pengembangan Diseminasi Peta Mutu dan Rencana Peningkatan Mutu Dikdas (TPI/Bintan)					-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0
521211	Belanja Bahan					-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0
5630.003	Satuan Pendidikan yang telah Difasilitasi Berdasarkan 8 SNP	Sekolah	140	137	97,86	-	-	2,849,351,000	2,806,421,250	-	-	2,849,351,000	2,806,421,250	98,49	42,929,750	0
5630.003.001	Sekolah Model Yang Difasilitasi					-	-	2,536,385,000	2,498,110,350	-	-	2,536,385,000	2,498,110,350	98,49	38,274,650	0
51	Verifikasi Sekolah Model					-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0
051.A	Verifikasi dan Validasi Sekolah Model					-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
52	Bimbingan Teknis Fasilitator Daerah Sekolah Model					-	-	143,168,000	140,685,200	-	-	143,168,000	140,685,200	98,27	2,482,800	0
052.A	Bimbingan Teknis Penyegaran Fasilitator Daerah SPMI untuk Pengembangan Sekolah Model					-	-	143,168,000	140,685,200	-	-	143,168,000	140,685,200	98,27	2,482,800	0
521211	Belanja Bahan					-	-	10,200,000	10,200,000	-	-	10,200,000	10,200,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,450,000	1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	20,600,000	20,600,000	-	-	20,600,000	20,600,000	100,00	-	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	110,918,000	108,435,200	-	-	110,918,000	108,435,200	97,76	2,482,800	0
53	Bimbingan Teknis SPMI					-	-	2,120,767,000	2,103,195,550	-	-	2,120,767,000	2,103,195,550	99,17	17,571,450	0
053.A	Workshop SPMI untuk Sekolah Model					-	-	921,847,000	911,485,700	-	-	921,847,000	911,485,700	98,88	10,361,300	0
521211	Belanja Bahan					-	-	300,107,000	292,185,000	-	-	300,107,000	292,185,000	97,36	7,922,000	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	19,150,000	18,250,000	-	-	19,150,000	18,250,000	95,30	900,000	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	141,800,000	140,400,000	-	-	141,800,000	140,400,000	99,01	1,400,000	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	460,790,000	460,650,700	-	-	460,790,000	460,650,700	99,97	139,300	0
053.B	Implementasi SPMI dengan Bantuan Pemerintah					-	-	1,120,000,000	1,120,000,000	-	-	1,120,000,000	1,120,000,000	100,00	-	0
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah					-	-	1,120,000,000	1,120,000,000	-	-	1,120,000,000	1,120,000,000	100,00	-	0
053.C	Pendampingan SPMI					-	-	78,920,000	71,709,850	-	-	78,920,000	71,709,850	90,86	7,210,150	0
521211	Belanja Bahan					-	-	200	200	-	-	200	200	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	30,870,000	30,870,000	-	-	30,870,000	30,870,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	47,850,000	40,639,850	-	-	47,850,000	40,639,850	84,93	7,210,150	0
55	Monitoring dan Evaluasi					-	-	272,450,000	254,229,600	-	-	272,450,000	254,229,600	93,31	18,220,400	0
055.A	Monitoring dan Evaluasi					-	-	59,160,000	54,020,000	-	-	59,160,000	54,020,000	91,31	5,140,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	3,100,000	3,100,000	-	-	3,100,000	3,100,000	100,00	-	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	0,00	5,000,000	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	51,060,000	50,920,000	-	-	51,060,000	50,920,000	99,73	140,000	0
055.C	Asistensi Bantuan Pemerintah Untuk Implementasi SPMI					-	-	213,290,000	200,209,600	-	-	213,290,000	200,209,600	93,87	13,080,400	0
521211	Belanja Bahan					-	-	66,678,000	66,678,000	-	-	66,678,000	66,678,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	5,050,000	5,050,000	-	-	5,050,000	5,050,000	100,00	-	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					-	-	18,000,000	6,000,000	-	-	18,000,000	6,000,000	33,33	12,000,000	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	26,600,000	26,600,000	-	-	26,600,000	26,600,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	96,962,000	95,881,600	-	-	96,962,000	95,881,600	98,89	1,080,400	0
5630.003.002	Sekolah yang Difasilitasi Melalui Kemitraan					-	-	312,966,000	308,310,900	-	-	312,966,000	308,310,900	98,51	4,655,100	0
51	Sosialisasi Sekolah Model dan Sekolah Imbas					-	-	132,698,000	131,885,500	-	-	132,698,000	131,885,500	99,39	812,500	0
051.A	Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan Sekolah Model dan Pengimbasannya					-	-	132,698,000	131,885,500	-	-	132,698,000	131,885,500	99,39	812,500	0
521211	Belanja Bahan					-	-	23,800,000	23,800,000	-	-	23,800,000	23,800,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,450,000	1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	11,300,000	10,600,000	-	-	11,300,000	10,600,000	93,81	700,000	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	96,148,000	96,035,500	-	-	96,148,000	96,035,500	99,88	112,500	0
53	Monitoring dan Evaluasi					-	-	64,820,000	64,420,000	-	-	64,820,000	64,420,000	99,38	400,000	0
053.A	Supervisi Tugas dan Fungsi Melalui Pembinaan TPMPD					-	-	64,820,000	64,420,000	-	-	64,820,000	64,420,000	99,38	400,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	4,850,000	4,850,000	-	-	4,850,000	4,850,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	11,200,000	11,200,000	-	-	11,200,000	11,200,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	48,770,000	48,370,000	-	-	48,770,000	48,370,000	99,18	400,000	0
54	Diseminasi Hasil					-	-	115,448,000	112,005,400	-	-	115,448,000	112,005,400	97,02	3,442,600	0
054.A	Diseminasi Hasil Sekolah Model dan Pengimbasannya					-	-	115,448,000	112,005,400	-	-	115,448,000	112,005,400	97,02	3,442,600	0
521211	Belanja Bahan					-	-	8,600,000	8,600,000	-	-	8,600,000	8,600,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,450,000	1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	10,800,000	10,800,000	-	-	10,800,000	10,800,000	100,00	-	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	94,598,000	91,155,400	-	-	94,598,000	91,155,400	96,36	3,442,600	0
5630.006	Satuan Pendidikan yang melaksanakan Kurikulum 2013	Sekolah	513	513	100,00	-	-	10,620,123,000	10,327,065,750	-	-	10,620,123,000	10,327,065,750	97,24	293,057,250	0
5630.006.001	SD yang melaksanakan Kurikulum 2013					-	-	4,627,698,000	4,525,272,139	-	-	4,627,698,000	4,525,272,139	97,79	102,425,861	0
51	Bimbingan Teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013					-	-	452,864,000	448,652,389	-	-	452,864,000	448,652,389	99,07	4,211,611	0
051.A	Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota Kurikulum 2013 SD					-	-	452,864,000	448,652,389	-	-	452,864,000	448,652,389	99,07	4,211,611	0
521211	Belanja Bahan					-	-	135,314,000	131,617,189	-	-	135,314,000	131,617,189	97,27	3,696,811	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	10,150,000	10,150,000	-	-	10,150,000	10,150,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	65,800,000	65,800,000	-	-	65,800,000	65,800,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	241,600,000	241,085,200	-	-	241,600,000	241,085,200	99,79	514,800	0
52	Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013					-	-	2,077,580,000	2,011,551,500	-	-	2,077,580,000	2,011,551,500	96,82	66,028,500	0
052.A	Bimbingan Teknis Guru SD Sasaran Kurikulum 2013					-	-	2,077,580,000	2,011,551,500	-	-	2,077,580,000	2,011,551,500	96,82	66,028,500	0
521211	Belanja Bahan					-	-	745,810,000	689,625,000	-	-	745,810,000	689,625,000	92,47	56,185,000	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	47,850,000	47,550,000	-	-	47,850,000	47,550,000	99,37	300,000	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	0,00	5,000,000	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	288,600,000	288,600,000	-	-	288,600,000	288,600,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	328,320,000	325,276,500	-	-	328,320,000	325,276,500	99,07	3,043,500	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					-	-	662,000,000	660,500,000	-	-	662,000,000	660,500,000	99,77	1,500,000	0
53	Asistensi dan Bantuan Pemerintah					-	-	1,303,250,000	1,300,000,000	-	-	1,303,250,000	1,300,000,000	99,75	3,250,000	0
053.A	Bantuan Pemerintah Pendampingan K13 SD					-	-	1,303,250,000	1,300,000,000	-	-	1,303,250,000	1,300,000,000	99,75	3,250,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	3,250,000	-	-	-	3,250,000	-	0,00	3,250,000	0
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah					-	-	1,300,000,000	1,300,000,000	-	-	1,300,000,000	1,300,000,000	100,00	-	0
54	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah					-	-	61,350,000	59,463,000	-	-	61,350,000	59,463,000	96,92	1,887,000	0
054.A	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah/Pendampingan K13 SD					-	-	61,350,000	59,463,000	-	-	61,350,000	59,463,000	96,92	1,887,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	660	540	-	-	660	540	81,82	120	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	60,690,000	58,923,000	-	-	60,690,000	58,923,000	97,09	1,767,000	0
55	Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013 untuk Seluruh Jenjang Pendidikan					-	-	732,654,000	705,605,250	-	-	732,654,000	705,605,250	96,31	27,048,750	0
055.A	Rakor implementasi Kurikulum 2013 untuk seluruh jenjang pendidikan					-	-	134,378,000	124,375,400	-	-	134,378,000	124,375,400	92,56	10,002,600	0
521211	Belanja Bahan					-	-	25,800,000	23,800,000	-	-	25,800,000	23,800,000	92,25	2,000,000	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,450,000	1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	10,600,000	10,600,000	-	-	10,600,000	10,600,000	100,00	-	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	96,528,000	88,525,400	-	-	96,528,000	88,525,400	91,71	8,002,600	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
055.B	Asistensi Bantuan Pemerintah Untuk Pendampingan Implementasi K13					-	-	299,138,000	298,182,150	-	-	299,138,000	298,182,150	99,68	955,850	0
521211	Belanja Bahan					-	-	8,300,000	8,300,000	-	-	8,300,000	8,300,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	3,250,000	3,250,000	-	-	3,250,000	3,250,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	9,000,000	8,700,000	-	-	9,000,000	8,700,000	96,67	300,000	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	278,588,000	277,932,150	-	-	278,588,000	277,932,150	99,76	655,850	0
055.C	Evaluasi dan Pelaporan Bantuan Pemerintah/Pendampingan					-	-	299,138,000	283,047,700	-	-	299,138,000	283,047,700	94,62	16,090,300	0
521211	Belanja Bahan					-	-	8,300,000	8,300,000	-	-	8,300,000	8,300,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	3,250,000	3,250,000	-	-	3,250,000	3,250,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	9,000,000	9,000,000	-	-	9,000,000	9,000,000	100,00	-	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	278,588,000	262,497,700	-	-	278,588,000	262,497,700	94,22	16,090,300	0
5630.006.002	SMP yang melaksanakan Kurikulum 2013					-	-	2,886,975,000	2,811,945,632	-	-	2,886,975,000	2,811,945,632	97,40	75,029,368	0
51	bimbingan teknis Tim Pengembang Kurikulum 2013					-	-	529,115,000	498,553,232	-	-	529,115,000	498,553,232	94,22	30,561,768	0
051.A	Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota Kurikulum 2013 SMP					-	-	529,115,000	498,553,232	-	-	529,115,000	498,553,232	94,22	30,561,768	0
521211	Belanja Bahan					-	-	193,985,000	164,077,632	-	-	193,985,000	164,077,632	84,58	29,907,368	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	10,150,000	10,150,000	-	-	10,150,000	10,150,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	84,600,000	84,600,000	-	-	84,600,000	84,600,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	240,380,000	239,725,600	-	-	240,380,000	239,725,600	99,73	654,400	0
52	Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013					-	-	1,268,380,000	1,233,631,400	-	-	1,268,380,000	1,233,631,400	97,26	34,748,600	0
052.A	Bimbingan Teknis Guru SMP Sasaran Kurikulum 2013					-	-	1,268,380,000	1,233,631,400	-	-	1,268,380,000	1,233,631,400	97,26	34,748,600	0
521211	Belanja Bahan					-	-	483,210,000	450,885,000	-	-	483,210,000	450,885,000	93,31	32,325,000	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	30,450,000	30,450,000	-	-	30,450,000	30,450,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	163,800,000	163,800,000	-	-	163,800,000	163,800,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	160,420,000	157,996,400	-	-	160,420,000	157,996,400	98,49	2,423,600	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					-	-	430,500,000	430,500,000	-	-	430,500,000	430,500,000	100,00	-	0
53	Asistensi dan Bantuan Pemerintah					-	-	904,000,000	904,000,000	-	-	904,000,000	904,000,000	100,00	-	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
053.A	Bantuan Pemerintah Pendampingan K13 SMP					-	-	904,000,000	904,000,000	-	-	904,000,000	904,000,000	100,00	-	0
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah					-	-	904,000,000	904,000,000	-	-	904,000,000	904,000,000	100,00	-	0
54	Monitoring dan Evaluasi					-	-	185,480,000	175,761,000	-	-	185,480,000	175,761,000	94,76	9,719,000	0
054.A	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah/Pendampingan K13 SMP					-	-	50,980,000	50,902,000	-	-	50,980,000	50,902,000	99,85	78,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	420	420	-	-	420	420	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	50,560,000	50,482,000	-	-	50,560,000	50,482,000	99,85	78,000	0
054.B	Reviu Realisasi Bantuan Pemerintah/Pendampingan K13 (Natuna, Lingga, Karimun)					-	-	134,500,000	124,859,000	-	-	134,500,000	124,859,000	92,83	9,641,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	26,289,000	26,289,000	-	-	26,289,000	26,289,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	2,550,000	2,550,000	-	-	2,550,000	2,550,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	21,600,000	21,600,000	-	-	21,600,000	21,600,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	84,061,000	74,420,000	-	-	84,061,000	74,420,000	88,53	9,641,000	0
5630.006.003	SMA yang melaksanakan Kurikulum 2013					-	-	1,637,902,000	1,578,456,465	-	-	1,637,902,000	1,578,456,465	96,37	59,445,535	0
51	Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum 2013					-	-	342,806,000	308,039,265	-	-	342,806,000	308,039,265	89,86	34,766,735	0
051.A	Bimbingan Teknis Penyegaran Instruktur Kab/Kota Kurikulum 2013 SMA					-	-	342,806,000	308,039,265	-	-	342,806,000	308,039,265	89,86	34,766,735	0
521211	Belanja Bahan					-	-	116,226,000	83,995,665	-	-	116,226,000	83,995,665	72,27	32,230,335	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	8,700,000	8,700,000	-	-	8,700,000	8,700,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	56,400,000	55,400,000	-	-	56,400,000	55,400,000	98,23	1,000,000	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	161,480,000	159,943,600	-	-	161,480,000	159,943,600	99,05	1,536,400	0
52	Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013					-	-	652,080,000	631,337,800	-	-	652,080,000	631,337,800	96,82	20,742,200	0
052.A	Bimbingan Teknis Guru SMA Sasaran Kurikulum 2013					-	-	652,080,000	631,337,800	-	-	652,080,000	631,337,800	96,82	20,742,200	0
521211	Belanja Bahan					-	-	234,520,000	214,145,000	-	-	234,520,000	214,145,000	91,31	20,375,000	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	14,500,000	14,500,000	-	-	14,500,000	14,500,000	100,00	-	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	93,600,000	93,600,000	-	-	93,600,000	93,600,000	100,00	-	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	98,460,000	98,292,800	-	-	98,460,000	98,292,800	99,83	167,200	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					-	-	206,000,000	205,800,000	-	-	206,000,000	205,800,000	99,90	200,000	0
53	Asistensi dan Bantuan Pemerintah					-	-	504,420,000	504,000,000	-	-	504,420,000	504,000,000	99,92	420,000	0
053.A	Bantuan Pemerintah Pendampingan K13 SMA					-	-	504,420,000	504,000,000	-	-	504,420,000	504,000,000	99,92	420,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	420	-	-	-	420	-	0,00	420	0
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah					-	-	504,000,000	504,000,000	-	-	504,000,000	504,000,000	100,00	-	0
54	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah					-	-	138,596,000	135,079,400	-	-	138,596,000	135,079,400	97,46	3,516,600	0
054.A	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah/Pendampingan K13 SMA					-	-	43,770,000	43,154,400	-	-	43,770,000	43,154,400	98,59	615,600	0
521211	Belanja Bahan					-	-	200	140	-	-	200	140	70,00	60	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	43,570,000	43,014,400	-	-	43,570,000	43,014,400	98,72	555,600	0
054.B	Reviu Realisasi Bantuan Pemerintah/Pendampingan K13 (Anambas, TPI, Bintan)					-	-	94,826,000	91,925,000	-	-	94,826,000	91,925,000	96,94	2,901,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	18,645,000	18,645,000	-	-	18,645,000	18,645,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	2,550,000	2,550,000	-	-	2,550,000	2,550,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	21,600,000	21,600,000	-	-	21,600,000	21,600,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	52,031,000	49,130,000	-	-	52,031,000	49,130,000	94,42	2,901,000	0
5630.006.004	SMK yang melaksanakan Kurikulum 2013					-	-	1,467,548,000	1,411,391,514	-	-	1,467,548,000	1,411,391,514	96,17	56,156,486	0
51	Pelatihan Tim Pengembang Kurikulum 2013					-	-	329,438,000	304,178,914	-	-	329,438,000	304,178,914	92,33	25,259,086	0
051.A	Bimbingan Teknis Penyebaran Instruktur Kab/Kota Kurikulum 2013 SMK					-	-	329,438,000	304,178,914	-	-	329,438,000	304,178,914	92,33	25,259,086	0
521211	Belanja Bahan					-	-	101,278,000	78,538,114	-	-	101,278,000	78,538,114	77,55	22,739,886	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	9,300,000	9,300,000	-	-	9,300,000	9,300,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	65,800,000	64,000,000	-	-	65,800,000	64,000,000	97,26	1,800,000	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	153,060,000	152,340,800	-	-	153,060,000	152,340,800	99,53	719,200	0
52	Pendampingan Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013					-	-	588,560,000	566,768,200	-	-	588,560,000	566,768,200	96,30	21,791,800	0
052.A	Bimbingan Teknis Guru SMK Sasaran Kurikulum 2013					-	-	588,560,000	566,768,200	-	-	588,560,000	566,768,200	96,30	21,791,800	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
521211	Belanja Bahan					-	-	210,730,000	191,370,000	-	-	210,730,000	191,370,000	90,81	19,360,000	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	13,050,000	13,050,000	-	-	13,050,000	13,050,000	100,00	-	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					-	-	5,000,000	5,000,000	-	-	5,000,000	5,000,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	101,400,000	101,400,000	-	-	101,400,000	101,400,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	71,880,000	70,048,200	-	-	71,880,000	70,048,200	97,45	1,831,800	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					-	-	186,500,000	185,900,000	-	-	186,500,000	185,900,000	99,68	600,000	0
53	Asistensi dan Bantuan Pemerintah					-	-	396,330,000	396,000,000	-	-	396,330,000	396,000,000	99,92	330,000	0
053.A	Bantuan Pemerintah Pendampingan K13 SMK					-	-	396,330,000	396,000,000	-	-	396,330,000	396,000,000	99,92	330,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	330	-	-	-	330	-	0,00	330	0
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah					-	-	396,000,000	396,000,000	-	-	396,000,000	396,000,000	100,00	-	0
54	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah					-	-	153,220,000	144,444,400	-	-	153,220,000	144,444,400	94,27	8,775,600	0
054.A	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Pemerintah/Pendampingan K13 SMK					-	-	48,910,000	48,294,400	-	-	48,910,000	48,294,400	98,74	615,600	0
521211	Belanja Bahan					-	-	180	180	-	-	180	180	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	48,730,000	48,114,400	-	-	48,730,000	48,114,400	98,74	615,600	0
054.B	Pengembangan K13 Melalui Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)					-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	0
054.C	Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan K13 Secara Mandiri					-	-	32,150,000	32,150,000	-	-	32,150,000	32,150,000	100,00	-	0
521211	Belanja Bahan					-	-	5,500,000	5,500,000	-	-	5,500,000	5,500,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	850	850	-	-	850	850	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	13,800,000	13,800,000	-	-	13,800,000	13,800,000	100,00	-	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	12,000,000	12,000,000	100,00	-	0
054.D	Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan K13 Berbasis Muatan Lokal					-	-	72,160,000	64,000,000	-	-	72,160,000	64,000,000	88,69	8,160,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	10,700,000	10,700,000	-	-	10,700,000	10,700,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,700,000	1,700,000	-	-	1,700,000	1,700,000	100,00	-	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	25,600,000	22,800,000	-	-	25,600,000	22,800,000	89,06	2,800,000	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	5,360,000	-	-	-	5,360,000	-	0,00	5,360,000	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	28,800,000	28,800,000	-	-	28,800,000	28,800,000	100,00	-	0
5630.95	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	12	12	100,00	-	-	1,735,163,000	1,576,864,992	-	-	1,735,163,000	1,576,864,992	90,88	158,298,008	0
5630.950.001	Layanan Dukungan Manajemen					-	-	1,735,163,000	1,576,864,992	-	-	1,735,163,000	1,576,864,992	90,88	158,298,008	0
51	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran					-	-	595,209,000	520,813,000	-	-	595,209,000	520,813,000	87,50	74,396,000	0
051.A	Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah					-	-	59,688,000	59,688,000	-	-	59,688,000	59,688,000	100,00	-	0
521211	Belanja Bahan					-	-	3,980,000	3,980,000	-	-	3,980,000	3,980,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	9,400,000	9,400,000	-	-	9,400,000	9,400,000	100,00	-	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	-	45,158,000	45,158,000	-	-	45,158,000	45,158,000	100,00	-	0
051.B	Bimtek Pengelolaan Keuangan Negara dan BMN					-	-	59,688,000	54,754,000	-	-	59,688,000	54,754,000	91,73	4,934,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	3,980,000	3,980,000	-	-	3,980,000	3,980,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	9,400,000	7,400,000	-	-	9,400,000	7,400,000	78,72	2,000,000	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	-	45,158,000	42,224,000	-	-	45,158,000	42,224,000	93,50	2,934,000	0
051.C	Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian dan SKP					-	-	82,498,000	81,370,000	-	-	82,498,000	81,370,000	98,63	1,128,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	4,900,000	4,900,000	-	-	4,900,000	4,900,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,450,000	1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	6,300,000	6,300,000	-	-	6,300,000	6,300,000	100,00	-	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	-	69,848,000	68,720,000	-	-	69,848,000	68,720,000	98,39	1,128,000	0
051.D	Pelatihan Tenaga Keamanan					-	-	19,195,000	18,445,000	-	-	19,195,000	18,445,000	96,09	750,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	4,880,000	4,880,000	-	-	4,880,000	4,880,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000	100,00	-	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					-	-	675	675	-	-	675	675	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	5,800,000	5,800,000	-	-	5,800,000	5,800,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	6,690,000	5,940,000	-	-	6,690,000	5,940,000	88,79	750,000	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
5630.95	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	12	12	100.00	-	-	1,735,163,000	1,576,864,992	-	-	1,735,163,000	1,576,864,992	90.88	158,298,008	0
5630.950.001	Layanan Dukungan Manajemen					-	-	1,735,163,000	1,576,864,992	-	-	1,735,163,000	1,576,864,992	90.88	158,298,008	0
51	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran					-	-	595,209,000	520,813,000	-	-	595,209,000	520,813,000	87.50	74,396,000	0
051.A	Bimtek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah					-	-	59,688,000	59,688,000	-	-	59,688,000	59,688,000	100.00	-	0
521211	Belanja Bahan					-	-	3,980,000	3,980,000	-	-	3,980,000	3,980,000	100.00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000	100.00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	9,400,000	9,400,000	-	-	9,400,000	9,400,000	100.00	-	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	-	45,158,000	45,158,000	-	-	45,158,000	45,158,000	100.00	-	0
051.B	Bimtek Pengelolaan Keuangan Negara dan BMN					-	-	59,688,000	54,754,000	-	-	59,688,000	54,754,000	91.73	4,934,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	3,980,000	3,980,000	-	-	3,980,000	3,980,000	100.00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000	100.00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	9,400,000	7,400,000	-	-	9,400,000	7,400,000	78.72	2,000,000	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	-	45,158,000	42,224,000	-	-	45,158,000	42,224,000	93.50	2,934,000	0
051.C	Bimbingan Teknis Administrasi Kepegawaian dan SKP					-	-	82,498,000	81,370,000	-	-	82,498,000	81,370,000	98.63	1,128,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	4,900,000	4,900,000	-	-	4,900,000	4,900,000	100.00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,450,000	1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	100.00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	6,300,000	6,300,000	-	-	6,300,000	6,300,000	100.00	-	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	-	69,848,000	68,720,000	-	-	69,848,000	68,720,000	98.39	1,128,000	0
051.D	Pelatihan Tenaga Keamanan					-	-	19,195,000	18,445,000	-	-	19,195,000	18,445,000	96.09	750,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	4,880,000	4,880,000	-	-	4,880,000	4,880,000	100.00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,150,000	1,150,000	-	-	1,150,000	1,150,000	100.00	-	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					-	-	675	675	-	-	675	675	100.00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	5,800,000	5,800,000	-	-	5,800,000	5,800,000	100.00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	6,690,000	5,940,000	-	-	6,690,000	5,940,000	88.79	750,000	0
051.E	Workshop Ketatalaksanaan dan Manajemen Risiko					-	-	73,030,000	34,900,000	-	-	73,030,000	34,900,000	47.79	38,130,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	3,500,000	3,500,000	-	-	3,500,000	3,500,000	100.00	-	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	850	850	-	-	850	850	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	5,800,000	5,800,000	-	-	5,800,000	5,800,000	100,00	-	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	-	62,880,000	24,750,000	-	-	62,880,000	24,750,000	39,36	38,130,000	0
051.F	Workshop Penyusunan Instrumen Penjaminan Mutu					-	-	118,260,000	89,806,000	-	-	118,260,000	89,806,000	75,94	28,454,000	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya					-	-	5,000,000	-	-	-	5,000,000	-	0,00	5,000,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	4,900,000	4,900,000	-	-	4,900,000	4,900,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,450,000	1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	7,400,000	7,400,000	-	-	7,400,000	7,400,000	100,00	-	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	-	99,510,000	76,056,000	-	-	99,510,000	76,056,000	76,43	23,454,000	0
051.G	Penyusunan dan Penerbitan Jurnal					-	-	33,660,000	33,660,000	-	-	33,660,000	33,660,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	11,660,000	11,660,000	-	-	11,660,000	11,660,000	100,00	-	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					-	-	22,000,000	22,000,000	-	-	22,000,000	22,000,000	100,00	-	0
051.H	Penyusunan dan Penerbitan Buletin					-	-	43,740,000	43,740,000	-	-	43,740,000	43,740,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	10,740,000	10,740,000	-	-	10,740,000	10,740,000	100,00	-	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					-	-	33,000,000	33,000,000	-	-	33,000,000	33,000,000	100,00	-	0
051.I	Koordinasi dan Sinkronisasi Program LPMP- Pemda					-	-	105,450,000	104,450,000	-	-	105,450,000	104,450,000	99,05	1,000,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	4,750,000	4,750,000	-	-	4,750,000	4,750,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,750,000	1,750,000	-	-	1,750,000	1,750,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	8,800,000	7,800,000	-	-	8,800,000	7,800,000	88,64	1,000,000	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	-	90,150,000	90,150,000	-	-	90,150,000	90,150,000	100,00	-	0
52	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi					-	-	299,798,000	264,569,592	-	-	299,798,000	264,569,592	88,25	35,228,408	0
052.A	Evaluasi Renstra LPMP Kepulauan Riau Tahun 2015-2019					-	-	87,620,000	87,220,000	-	-	87,620,000	87,220,000	99,54	400,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	4,822,000	4,822,000	-	-	4,822,000	4,822,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	1,450,000	1,450,000	-	-	1,450,000	1,450,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	9,400,000	9,000,000	-	-	9,400,000	9,000,000	95,74	400,000	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota					-	-	71,948,000	71,948,000	-	-	71,948,000	71,948,000	100,00	-	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
052.C	FGD Evaluasi Fungsi Kepengawasan Intern LPMP (Itjen-LPMP)					-	-	30,540,000	22,040,000	-	-	30,540,000	22,040,000	72,17	8,500,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	5,540,000	5,240,000	-	-	5,540,000	5,240,000	94,58	300,000	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	25,000,000	16,800,000	-	-	25,000,000	16,800,000	67,20	8,200,000	0
052.E	Evaluasi dan Pelaporan Lembaga					-	-	137,788,000	111,459,592	-	-	137,788,000	111,459,592	80,89	26,328,408	0
521211	Belanja Bahan					-	-	18,830,000	8,200,000	-	-	18,830,000	8,200,000	43,55	10,630,000	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	48,958,000	37,935,542	-	-	48,958,000	37,935,542	77,49	11,022,458	0
524211	Belanja perjalanan biasa - luar negeri					-	-	70,000,000	65,324,050	-	-	70,000,000	65,324,050	93,32	4,675,950	0
052.F	Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Evaluasi Program Penjaminan Mutu di Kepulauan Riau					-	-	43,850,000	43,850,000	-	-	43,850,000	43,850,000	100,00	-	0
521211	Belanja Bahan					-	-	9,400,000	9,400,000	-	-	9,400,000	9,400,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	850	850	-	-	850	850	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	22,900,000	22,900,000	-	-	22,900,000	22,900,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	10,700,000	10,700,000	-	-	10,700,000	10,700,000	100,00	-	0
53	Pengelolaan Data dan Informasi					-	-	212,758,000	173,371,100	-	-	212,758,000	173,371,100	81,49	39,386,900	0
053.A	Bimbingan Teknis Pengelolaan Data Mutu Melalui Dapodik (GTK-Dikdasmen-LPMP)					-	-	176,258,000	136,871,100	-	-	176,258,000	136,871,100	77,65	39,386,900	0
521211	Belanja Bahan					-	-	6,150,000	6,150,000	-	-	6,150,000	6,150,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	2,050,000	2,050,000	-	-	2,050,000	2,050,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	13,200,000	12,400,000	-	-	13,200,000	12,400,000	93,94	800,000	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	154,858,000	116,271,100	-	-	154,858,000	116,271,100	75,08	38,586,900	0
053.B	Layanan Pengelolaan Laman					-	-	36,500,000	36,500,000	-	-	36,500,000	36,500,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	36,500,000	36,500,000	-	-	36,500,000	36,500,000	100,00	-	0
57	Layanan Kemitraan di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan					-	-	627,398,000	618,111,300	-	-	627,398,000	618,111,300	98,52	9,286,700	0
057.A	Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Kemitraan Program Penjaminan Mutu di Kepulauan Riau					-	-	45,550,000	45,430,000	-	-	45,550,000	45,430,000	99,74	120,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	9,400,000	9,400,000	-	-	9,400,000	9,400,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	850	850	-	-	850	850	100,00	-	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blokir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	24,600,000	24,600,000	-	-	24,600,000	24,600,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	10,700,000	10,580,000	-	-	10,700,000	10,580,000	98,88	120,000	0
057.B	Bimbingan Teknis bagi Tim PMP Daerah					-	-	174,358,000	165,356,300	-	-	174,358,000	165,356,300	94,84	9,001,700	0
521211	Belanja Bahan					-	-	3,450,000	3,450,000	-	-	3,450,000	3,450,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	2,050,000	2,050,000	-	-	2,050,000	2,050,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	14,200,000	13,300,000	-	-	14,200,000	13,300,000	93,66	900,000	0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota					-	-	154,658,000	146,556,300	-	-	154,658,000	146,556,300	94,76	8,101,700	0
057.E	Layanan Bimbingan Teknis Penjaminan Mutu Pendidikan Untuk Daerah 3T					-	-	407,490,000	407,325,000	-	-	407,490,000	407,325,000	99,96	165,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	75,120,000	75,120,000	-	-	75,120,000	75,120,000	100,00	-	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	4,350,000	4,350,000	-	-	4,350,000	4,350,000	100,00	-	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					-	-	1,500,000	1,500,000	-	-	1,500,000	1,500,000	100,00	-	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	43,200,000	43,200,000	-	-	43,200,000	43,200,000	100,00	-	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	283,320,000	283,155,000	-	-	283,320,000	283,155,000	99,94	165,000	0
5630.951	Layanan Internal (Overhead)	Layanan	4	4	100.00	-	-	-	-	14,154,303,000	13,869,542,349	14,154,303,000	13,869,542,349	97,99	284,760,651	0
5630.951.001	Layanan Internal					-	-	-	-	14,154,303,000	13,869,542,349	14,154,303,000	13,869,542,349	97,99	284,760,651	0
995	Pengadaan Kendaraan Bermotor					-	-	-	-	34,000,000	33,847,334	34,000,000	33,847,334	99,55	152,666	0
995.A	Pengadaan Kendaraan Bermotor Roda 2					-	-	-	-	34,000,000	33,847,334	34,000,000	33,847,334	99,55	152,666	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-	34,000,000	33,847,334	34,000,000	33,847,334	99,55	152,666	0
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					-	-	-	-	170,000,000	169,853,000	170,000,000	169,853,000	99,91	147,000	0
996.A	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi					-	-	-	-	170,000,000	169,853,000	170,000,000	169,853,000	99,91	147,000	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-	170,000,000	169,853,000	170,000,000	169,853,000	99,91	147,000	0
997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran					-	-	-	-	5,772,371,000	5,656,009,515	5,772,371,000	5,656,009,515	97,98	116,361,485	0
997.A	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran					-	-	-	-	5,772,371,000	5,656,009,515	5,772,371,000	5,656,009,515	97,98	116,361,485	0
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					-	-	-	-	5,772,371,000	5,656,009,515	5,772,371,000	5,656,009,515	97,98	116,361,485	0
998	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan					-	-	-	-	8,177,932,000	8,009,832,500	8,177,932,000	8,009,832,500	97,94	168,099,500	0
998.A	Renovasi Gedung dan Bangunan					-	-	-	-	7,867,921,000	7,831,747,000	7,867,921,000	7,831,747,000	99,54	36,174,000	0
531115	Belanja Modal Pengukuran dan					-	-	-	-	4,107,635,000	4,106,673,000	4,107,635,000	4,106,673,000	99,98	962,000	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
	Pematangan Tanah															
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan					-	-	-	-	3,376,340,000	3,376,017,000	3,376,340,000	3,376,017,000	99,99	323,000	0
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan					-	-	-	-	29,750,000	16,100,000	29,750,000	16,100,000	54,12	13,650,000	0
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan					-	-	-	-	286,162,000	286,097,000	286,162,000	286,097,000	99,98	65,000	0
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan					-	-	-	-	68,034,000	46,860,000	68,034,000	46,860,000	68,88	21,174,000	0
998.B	Jaringan Listrik Gedung dan Bangunan					-	-	-	-	310,011,000	178,085,500	310,011,000	178,085,500	57,44	131,925,500	0
534131	Belanja Modal Jaringan					-	-	-	-	310,011,000	178,085,500	310,011,000	178,085,500	57,44	131,925,500	0
5630.994	Layanan Perkantoran	Bulan	12	12	100.00	2,476,800,000	1,823,465,418	3,250,081,000	2,849,230,515	-	-	5,726,881,000	4,672,695,933	81,59	1,054,185,067	0
5630.994.001	Layanan Perkantoran					2,476,800,000	1,823,465,418	3,250,081,000	2,849,230,515	-	-	5,726,881,000	4,672,695,933	81,59	1,054,185,067	0
1	Gaji dan Tunjangan					2,476,800,000	1,823,465,418	-	-	-	-	2,476,800,000	1,823,465,418	73,62	653,334,582	0
001.A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan					2,476,800,000	1,823,465,418	-	-	-	-	2,476,800,000	1,823,465,418	73,62	653,334,582	0
511111	Belanja Gaji Pokok PNS					2,216,800,000	1,655,866,418	-	-	-	-	2,216,800,000	1,655,866,418	74,70	560,933,582	0
511129	Belanja Uang Makan PNS					210,000,000	167,599,000	-	-	-	-	210,000,000	167,599,000	79,81	42,401,000	0
512211	Belanja uang lembur					50,000,000	-	-	-	-	-	50,000,000	-	0,00	50,000,000	0
2	Operasional dan Pemeliharaan Kantor					-	-	3,250,081,000	2,849,230,515	-	-	3,250,081,000	2,849,230,515	87,67	400,850,485	0
002.A	KEBUTUHAN SEHARI HARI PERKANTORAN					-	-	978,765,000	821,653,520	-	-	978,765,000	821,653,520	83,95	157,111,480	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran					-	-	108,600,000	108,599,920	-	-	108,600,000	108,599,920	100,00	80	0
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat					-	-	6,000,000	1,962,600	-	-	6,000,000	1,962,600	32,71	4,037,400	0
521213	Honor Output Kegiatan					-	-	864,165,000	711,091,000	-	-	864,165,000	711,091,000	82,29	153,074,000	0
002.B	LANGGANAN DAYA JASA					-	-	174,000,000	135,854,127	-	-	174,000,000	135,854,127	78,08	38,145,873	0
522111	Belanja Langganan Listrik					-	-	120,000,000	84,600,677	-	-	120,000,000	84,600,677	70,50	35,399,323	0
522141	Belanja Sewa					-	-	54,000,000	51,253,450	-	-	54,000,000	51,253,450	94,91	2,746,550	0
002.C	PEMELIHARAAN KANTOR					-	-	448,430,000	430,410,888	-	-	448,430,000	430,410,888	95,98	18,019,112	0
523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan					-	-	216,600,000	215,712,250	-	-	216,600,000	215,712,250	99,59	887,750	0
523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin					-	-	231,830,000	214,698,638	-	-	231,830,000	214,698,638	92,61	17,131,362	0
002.D	PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR					-	-	1,591,136,000	1,403,561,980	-	-	1,591,136,000	1,403,561,980	88,21	187,574,020	0

Kode	Uraian	Sasaran				Belanja Pegawai		Belanja Barang		Belanja Modal		Total				Blo kir
		Satuan	Target	Capaian	%	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%	Sisa Anggaran	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran					-	-	85,575,000	85,575,000	-	-	85,575,000	85,575,000	100,00	-	0
521115	Honor Operasional Satuan Kerja					-	-	266,160,000	259,810,000	-	-	266,160,000	259,810,000	97,61	6,350,000	0
521211	Belanja Bahan					-	-	48,960,000	42,312,000	-	-	48,960,000	42,312,000	86,42	6,648,000	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya					-	-	463,805,000	322,000,000	-	-	463,805,000	322,000,000	69,43	141,805,000	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi					-	-	72,720,000	72,619,140	-	-	72,720,000	72,619,140	99,86	100,860	0
522151	Belanja Jasa Profesi					-	-	100,500,000	69,753,500	-	-	100,500,000	69,753,500	69,41	30,746,500	0
524111	Belanja perjalanan biasa					-	-	553,416,000	551,492,340	-	-	553,416,000	551,492,340	99,65	1,923,660	0
002.E	PENGgantian BARANG INVENTARIS					-	-	57,750,000	57,750,000	-	-	57,750,000	57,750,000	100,00	-	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya					-	-	57,750,000	57,750,000	-	-	57,750,000	57,750,000	100,00	-	0
	T O T A L					2,476,800,000	1,823,465,418	19,877,244,000	18,849,539,157	14,154,303,000	13,869,542,349	36,508,347,000	34,542,546,924	94,62	1,965,800,076	0